

MODERASI BERAGAMA

DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL



FAKULTAS USHULUDDIN DAN FISAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2022



Dr. Juwaini, M.Ag, dkk

MODERASI BERAGAMA
DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

TIM PENYUSUN
BUKU CHAPTER
MODERASI BERAGAMA DALAM BERBAGAI DINAMIKA
2022

PENULIS

Dr. Juwaini, M.Ag

Dr. Mawardi, S.Th.I., MA & Muqni Affan, Lc., M.A

Drs. Taslim HM. Yasin, M.Si & Nurul Maqhfirah

Dr. Husna Amin, M.Hum & Khairil Fazal, S.Th.I., M.Ag

Nofal Liata, M.Si & Nurjannah

Dra. Suraiya IT., M.A., Ph.D & Evi Yuliana, S.Th.I., M.A

Nurlaila, M.Ag & Nanda Sekti Prayetno, S.Ag., M.Ag

Dr. Fauziah Nurdin, MA & Asmanidar, S.Ag., M.Ag

Dr. Muhammad, S.Th.I., MA & Mufassirin

SAMBUTAN
KETUA RUMAH MODERASI BERAGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY



Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, dengan rasa syukur saya sangat menyambut baik atas penerbitan Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 2022, ini merupakan kolaborasi antar sesama dosen dan mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama dari berbagai aspek keilmuan. Tema Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural, merupakan titik pijak dari diskusi buku ini, dengan mempertimbangkan pentingnya gagasan moderasi beragama di tengah-tengah berbagai serbuan paham, maupun gerakan sosialkeagamaan yang terus menguji nilai-nilai ke-Indonesiaan kita sebagai masyarakat yang majemuk.

Saya menyadari bahwa secara substantif moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa kita. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilai-nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama.

Di Indonesia kajian terhadap moderasi beragama boleh dikata masih sangat-sangat dibutuhkan untuk diterus dinarasikan. Ini mengingat fenomena radikalisme dan fundamentalisme dalam beragama masih menjadi tantangan bangsa saat ini. Karena itu, semaian moderasi beragama perlu untuk terus dikampanyekan dalam rangka menggapai cita-cita kerukunan sosial dalam perbedaan.

Itulah sebabnya, gagasan moderasi beragama diharapkan menjadi sebuah model, rujukan, bahkan metodologi yang perlu untuk terus menerus dikembangkan, agar menjadi wawasan bagi seluruh warga kampus, serta ikut berdampak sampai ke masyarakat. Prinsip-prinsip moderasi beragama di Indonesia, kata kuncinya sebetulnya sudah dipertegas oleh nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Bapak Lukman Hakim Saifuddin, mengemukakan gagasan moderasi beragama ini terkait dengan kenyataan bahwa dalam kehidupan umat beragama di Indonesia, keragaman adalah hal yang niscaya, baik keragaman agama, maupun keragaman budaya, bahasa, etnis ,dan lainnya. Keragaman ini seringkali mengakibatkan sikap berlebih-lebihan atau ekstrem dari masing-masing pihak untuk mempertahankan kebenaran tafsir agamanya, sehingga menimbulkan konflik.

Saya berharap tulisan-tulisan para akademisi muda di buku ini menjadi awal terhadap tulisan-tulisan lainnya terkait dengan moderasi beragama, yang masih harus terus diproduksi dengan berbasis riset yang lebih baik. Ke depannya, kita perlu untuk terus melanjutkan upaya menulis bersama atau kolaborasi akademik dengan berbagai pihak dan lembaga mana pun, agar menghasilkan tema-tema yang lebih beragam

dan menarik, sehingga fungsi Perguruan Tinggi Islam sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan dapat terwujud.

Apalagi civitas akademika PTKIN, semacam UIN, IAIN, dan STAIN, yang memiliki basis dan akar kuat keilmuan Islam harus menjadi lokomotif terdepan dalam menebarkan pesan-pesan agama yang penuh dengan kedamaian, toleransi, sesuai dengan misi rahmatanlil 'alamin. Ucapan terimakasih banyak kepada Dosen-Dosen Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mempersembahkan karya ini.

Banda Aceh, Oktober 2022
Ketua Rumah Moderasi Beragama,

Dto.

Dr. Mawardi, S.Th.I., MA

SAMBUTAN
TIM PENULIS PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriringan salan kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing kita umat manusia ke jalan kebenaran.

Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan buku pertama yang di tulis oleh Program Studi Agama-Agama (SAA), yang mana proses penyusunannya merupakan buah kerja keras bersama oleh banyak pihak yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada TIM Penyusun Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama yang telah bekerja dengan ikhlas dalam penyusunan materi dalam buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural ini. Hadirnya Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini guna membantu dan pedoman dalam dunia pendidikan maupun sebagai referensi penunjang

kegiatan penelitian nantinya. Harapannya Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini dapat memenuhi fungsinya sebagai pedoman pembelajaran sebaik-baiknya.

Banda Aceh, Oktober 2022

Tim Penulis

Prodi Studi Agama-Agama,

Dto.

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmatnya sehingga penerbitan Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama ini dapat terlaksanakan dengan baik. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah mengantarkan manusia pada alam berperadaban.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan salah satu karya yang berusaha menjelaskan Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural yang ditulis oleh para dosen Prodi Studi Agama-Agama. Materi yang diangkat berupa tema-tema Moderasi Beragama secara umum. Diawali dengan penjelasan tentang Manajemen Keagamaan Dalam Moderasi Beragama, Inklusivisme Dalam Moderasi Beragama, Agama dan Masyarakat Multikultural, Agama dan Organisasi Keagamaan, Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial, Esoterisme, Toleransi Dan Dinamika Keagamaan Di Era Modernisasi, Peran Lembaga Agama Sebagai Sarana Kerukunan Antar Umat, Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Umat Beragama dan Moderasi Beragama Dalam Konteks Budaya.

Buku ini terutama disediakan untuk kepentingan para mahasiswa yang melakukan studi agama dalam bidang studi agama-agama. Dengan ketersediaan buku ini, diharapkan buku ini menjadi salah satu referensi awal bagi mahasiswa untuk menelaah referensi-referensi berikutnya. Tentu saja diyakini bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim penyusun Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama yang telah berkenan menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sekaligus Ketua Prodi Studi Agama-Agama atas dedikasinya dalam upaya mewujudkan tersusunnya Buku Chapter Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Prodi Studi Agama-Agama.

Akhirnya, berbagai kontribusi baik kritikan maupun saran selalu kami harapkan untuk kesempurnaan tulisan-tulisan berikutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Banda Aceh, Oktober 2022

Dto.

Tim Penulis

DAFTAR ISI



**SAMBUTAN KETUA RUMAH
MODERASI BERAGAMA ~ i
SAMBUTAN TIM ENULIS
PRODI STUDI AGAMA-AGAMA ~ iv
KATA PENGANTAR ~ vi
DAFTAR ISI ~ viii**

**Esoterisme, Toleransi Dan Dinamika Keagamaan
Di Era Modernisasi ~ 1-22
(Dr. Juwaini, M.Ag)**

**Manajemen Keagamaan Dalam Moderasi Beragama ~ 23-41
(Dr. Mawardi, S.Th.I., MA & Muqni Affan, Lc., M.A)**

**Inklusivisme Dalam Moderasi Beragama ~ 42-64
(Drs. Taslim HM. Yasin, M.Si & Nurul Maqhfirah)**

**Agama dan Masyarakat Multikultural ~ 65-82
(Dr. Husna Amin, H.Hum & Khairil Fazal, S.Th.I., M.Ag)**

**Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial ~ 83-102
(Nofal Liata, M.Si & Nurjannah)**

**Agama dan Organisasi Keagamaan ~ 103-121
(Dra. Suraiya IT., M.A., Ph.D & Evi Yuliana, S.Th.I., M.A)**

Peran Lembaga Agama Sebagai Sarana

Kerukunan Antar Umat ~ 122-146

(Nurlaila, M.Ag & Nanda Sekti Prayetno, M.Ag)

Moderasi Beragama Dalam Konteks Budaya ~ 147-168

(Dr. Fauziah Nurdin, MA & Asmanidar, S.Ag., MA)

Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan

Kesadaran Umat Beragama ~ 169-190

(Dr. Muhammad, S.Th.I., MA & Mufassirin)

DAFTAR PUSTAKA ~ 191

Esoterisme, Toleransi Dan Dinamika Keagamaan Di Era Modernisasi

(Juwaini)



A. Latar Belakang

Tuntutan pada Era Globalisasi menjadi bagian penting dan merupakan suatu yang dinamis dan kompetitif. Kedua perkara tersebut adalah kemampuan dan musthail rasanya sebagai bangsa dituntut untuk hidup sejajar dengan berbagai bangsa lain di penjuru dunia. Perkara urgen untuk maju dan berkembang adalah dengan IPTEK sebagai unuk meningkatkan kualitas SDM kepada anak bangsa terutama dalam dunia pendidikan. Manusia berkecendrungan ingin kepada perubahan dan perkembangan, hal ini adalah akan selalu realitas berlaku kepada warga anak bangsa semuanya, disetiap saat kapanpun dan dimanapun manusia berada. Perubahan terjadi kadang-kadang berlangsung secara tidak diketahui kapan, boleh jadi secara sekaligus maupun tiba-tiba. Sebagai masyarakat yang dalam kehidupan sosial sudah barang tentu menjadi subyek dan obyek perubahan. Prosesnya kadangkala bisa berlangsung dengan cepat dan juga boleh jadi lambat atau bahkan sedang terhadap perubahan dari bermacam jenis kemajuan.¹

Kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik disektor ekonomi yang begitu maju dengan tehnologi yang canggih maupun ilmu pengetahuan yang begitu mudah didapatkan, tentu hal ini tidak boleh dipungkiri. Selain itu, kemudahan mengakses pengetahuan tidak terkecuali dalam persoalan keberagaman seseorang. Agama berperanan penting didalam berkehidupan bagi menata nilai-nilai tatanan kemasyarakatan dan kemanusiaan.

¹Siti Makhmudah, Dinamika dan Tantangan Masyarakat Islam di Era Modernisasi, dalam *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Volume 1, Nomor 2, September 2015, h. 242-243.

Agama merupakan keperluan bagi jiwa dan sebagai spiritual untuk manusia dalam penyerahan diri kepada Ilahi Rabbi. Dalam berbagai agama telah diajarkan perihal perkara kebaikan dan menghindari/ melarang perbuatan yang tidak baik atau kejahatan didalam hidupnya. Seruan agama dan penyempaian terhadap yang berbeda untuk saling rukun dan damai. Walaupun demikian, konflik agama tidak bisa dihindari, agama menjadi bahan, selalu terbawa untuk kepentingan pribadi seseorang. sebagai pencegahan supaya supaya tidak terjadi permasalahan, perlu kepada sikap toleransi adalah saling menghargai terhadap perbedaan. Dalam filsafat manusia diajukan untuk berpikir logis dan berprilaku dan berbuat baik baik seagama atau berbeda, hal juga sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang konsep moderasi agama. Oleh karena itu, secara filosofis dapat dijelaskan bahwa “manusia, moralitas dan agama” merupakan satu spesies, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. sebab beragama harus diimplementasikan dalam seluruh rangkaian kehidupan manusia.

Melalui toleransi manusia bisa saling menghargai antara beragama agama yang berbeda. Karena Dalam bermasyarakat orang-orang saling bergantung sama lainnya. Saling memberi dan saling tolong menolong satu sama lain. Karena itulah menjadi suatu kewajiban untuk menanamkan kepada generasi penerus sikap toleransi.² Sebagai contoh, ketika salah seorang teman memberi hadiah seumpama makanan/minuman dibolehkan untuk menerima jika itu halal. Tetapi bila memerikan sesuatu ada hubungannya dengan ritual agama dan tidak halal maka itu tidak dibolehkan, karena itu berbeda dengan keyakinan. Toleransi beragama merupakan sikap supaya bisa saling menerima dan terbuka kepada umat yang berbeda dan beragama dengannya.³ Hal ini penting karena dengan toleransi beragama akan membuat keharmonisan dan tercipta kerjasama yang baik diantara umat beragama.

²Syahrin Harahab, *Theologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 79-80.

³Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. h. 14-15.

Faktanya jelas terlihat kemajuan teknologi merupakan kontribusi dan sumbangan yang sangat besar dan berharga dalam kehidupan umat manusia. Walaupun demikian dari berbagai kemamfaatan dan kebaikan yang terdapat dari teknologi tersebut. Sudah barang tentu terdapat akibat dari teknologi juga berdampak kepada keburukan dan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sosial masyarakat. Persaingan dagang yang begitu ketat, pengurangan tenaga kerja dalam berbagai sektor dan kegiatan sosial yang mulai renggang. Bagi anak-anak milenial atau kaum muda, dengan teknologi bisa memberi percepatan menuju kesuksesan, tetapi bagi orang-orang tua, tentu sulit belajar memahami kemajuan teknologi yang sudah mapan tersebut. Hal semacam ini berakibat kepada polimik dan perdebatan diantara pihak yang mengamini perkembangan jaman dengan yang menolak kemajuan itu sendiri.⁴

Dampak yang tidak baik akibat terjadi daripada kemajuan teknologi jika tidak bisa mengontrol persoalan keberagamaan manusia itu sendiri. kalau mau mencontohkan dalam menyimpulkan secara sederhana bahwa terjadi berbagai konflik atas kemajuan teknologi, persaingan dagang dianggap kapitalistik, akses vidio porno, kejahatan berbasis online dan banyak perkara lainnya termasuk masalah keberagamaan setiap orang. Kasus demi kasus yang terjadi berhubungan dengan agama yang ada di jejaring sosial media setiap orang, kasus penghinaan agama, perbedaan mazhab, pembubaran pengajian disebabkan beda pemahaman dan banyak kasus lainnya yang terjadi sekaligus viral di media sosial.

Tesa di atas menggambar dampak berbagai komentar di media sosial yang menjurus kepada penghinaan kepada antar masyarakat. Berita hoak dimana-mana dan bertebaran tentunya di media sosial, menyebabkan sulit untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk dalam kehidupan seseorang. tidak peduli kepada hoak, kadang masyarakat termakan dengan isu-

⁴Abdul Munir Mulkhan, *Sufi Piinggiran: Menembus Batas-Batas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 20-21.

isu tersebut dan menelan mentah-mentah tanpa memahami apakah itu suatu kesalahan/ keburukan ataupun sebuah kebenaran.⁵ Terdapat dua hal dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dibedakan dan menghargai perbedaan. *Pertama*, adalah persoalan hubungan sosial seseorang dengan lingkungannya, *Kedua*, adalah perkara hubungan seseorang dengan agama dan Sang Pencipta yaitu Allah s.w.t.

Kedua perkara ini mempunyai hubungan yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Karena keduanya memiliki dimensi yang berbeda, bahwa mempunyai cara dan kekhasannya tidak sama sebab bergantung kepada penglihatan manusia itu sendiri. Biasanya dalam hal ini masyarakat terjebak dalam makna beragama yang hanya di pahami sebatas ritual atau terlihat saja.⁶ Agama Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia, melarang penghinaan, olok-olok, caci maki, penyembahan kepada penganut agama berbeda. Keteraturan ini disebabkan Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Dalam Agama Islam juga diterangkan tentang cara menjaga hubungan, bersilaturahmi sesama masyarakat, tolong menolong dan berlaku adil walaupun terhadap yang berbeda agama. Agama Islam menuntun umatnya berpegang teguh pada dua pedoman dari Nabi Muhammad saw, yaitu al-Quran dan sunnah Nabi.⁷

B. Pengertian Esoterisme, Toleransi dan Dinamika

1. Esoterisme

Kata Esoterisme berasal dari bahasa Yunani yaitu esoterikos diambil dari kata esoteris yang diberi arti dengan batini yaitu yang dalam. Esoterisme kalau

⁵Ahmad Tafsir, *Berjalan Menuju Langit*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), h. 15-17.

⁶Anand Khrisna, *Islam Esoteris: Kemuliaan dan Keindahan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. XVI-XVII.

⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 211.

dalam Inggris disebut dengan esoteric yang mempunyai arti yang dalam. Kamus Dictionary of philosophy dijelaskan bahwa esoteric yaitu di dalam yang bermakna ritual atau doktrin.⁸ pemakaian kata Esoterisme dapat pula diartikan “hanya dapat diketahui dan dipahami oleh beberapa orang tertentu saja”. Kemudian kata untuk perkembangan selanjutnya diartikan sebagai aspek dalam bathin hakikat atau substansi sebagai lawan dari eksoterik yang diartikan sebagai aspek luar, aspek materi dan aspek syariat.⁹

Jadi Esoterisme Agama merupakan ajaran dari berbagai agama yang menekankan kajiannya pada aspek bathin karena berhubungan dengan inti dari agama. Kalau melihat dari apa yang dijelaskan oleh Pythagoras bahwa Esoterisme adalah sebuah ajaran rahasia yang diberikan kepada sebahagian murid-muridnya yang terpilih, demikian Plato punya tradisi membicarakan Esoterisme kepada sebagian kecil murid-muridnya, tradisi ini juga dilanjutkan oleh Aristoteles¹⁰. Nars mengartikan Esoterisme adalah sesuatu yang terdapat dalam qalbu manusia, tersembunyi hanya dirasakan yang hati bersih oleh sedikit manusia.¹¹

Menurut Schuon Agama tidak memiliki esensi tanpa dimensi esoteric, demikian juga agama tidak akan dikenal disebabkan tidak berwujud tanpa eksoterik. lebih lanjut Schuon menyebutkan bahwa kesatuan agama hanya akan terjadi pada level esoteric yaitu pada level tidak berbentuk dan eksoterik adalah adalah wujud juga tabir dari esoteric. Jika pemeluk agama menolak keberadaan esoteric (esensi) maka agama akan rapuk.¹² Oleh karena itu boleh disebutkan bahwa eksoterik adalah aspek diluar dari agama yang meliputi dalam penyebutan

⁸Thomas Mautner, *Dictionary of philosophy: the Language and Concepts of Philosophy Explained*, England: Pequin Book, 2005, h. 198.

⁹Media Zainul Bahri, *Esoterisme dan Kesatuan Agama-Agama dalam Jurnal Titik Temu*, Volume 2, No 1 Juli Desember 2009, h. 119.

¹⁰Margareth Drabble, *The Oxford Companion to English Literature*, Oxford University: Oxford, 1998, h. 321.

¹¹Seyyed Husein Nars, *Pengetahuan dan Kesucian*, Ter. Suharsono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 87.

¹²Nars ed. *The Essential of Frithjof Schuon dalam Media Zainul Bahri*, h. 121

nama Tuhan dan simbol sesuai dengan ciri khas setiap agama masing-masing. Tetapi Esoterisme yaitu aspek yang ada dalam berhungan dengan bathiniyah merupakan actualisasi daer beragama.

2. Toleransi

Toleransi merupakan sikap seseorang untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik secara ataupun berkelompok bertujuan agar mendapatkan perdamaian dalam keberagaman, karena itu diperlukan kepada sikap toleransi. Dari segi etimologi, toleransi diambil dari kata *tolerate* yaitu bahasa Latin, memiliki arti sabar dan menahan diri.¹³ Secara terminologi, toleransi yaitu suatu sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antarsesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Sesuai defisi tersebut di atas bahwa toleransi bermakna setiap orang untuk bisa bersabar dan menahan diri atas segala sesuatu tidak sepaham dengannya. Ketika seseorang memiliki sikap toleransi, konflik diantara yang berbeda. Toleransi sebagai kunci utama dalam perdamaian sesama umat yang harus dipelihara. Karena ini merupakan perkara urgen untuk menjaga bangsa Indonesia yang majmuk mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam dalam segala hal seperti terhadap keyakinan, suku, ras, dan lain-lain.

Sebagaimana tersebut di atas toleransi adalah sebuah doktrin yang berupaya untuk menghilangkan sifat eksklusif umat beragama.¹⁴ Toleransi atau yang dikenal dalam Islam sebagai “*Teologi Inklusif*”, namun dalam keterkaitannya

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h 308.

¹⁴Bermakna berupaya kepada sikap bahwa tidak ada agama yang sifatnya mutlak, berusaha untuk menyamakan semua agama. Hal ini disebutkan sebagai doktrin pluralisme agama. Pluralisme yaitu doktrin peradaban Barat Postmodern yang ingin mencoba untuk membangun persamaan dari sebuah perbedaan dan bahkan cenderung menghilangkannya. Sumber dari pluralisme adalah filsafat relativisme Nietzsche adalah salah satu tokoh filosof Barat. Hamid Fahmi Zarkasyi, “*Islam: Toleransi Tanpa Pluralisme*”, *Insists*, Ahad, 12 November 2017.

dalam kehidupan sosial digunakan istilah multikulturalisme dan lain sebagainya.¹⁵ Islam mengatur ummatnya saling tolong menolong dan bekerja sama sesama manusia. Dalam ranah sosial, dimana manusia hidup dengan beragam kemajemukan masyarakat.¹⁶ Realitasnya tidak semua pemeluk agama dapat paham dengan pemeluk agama lain, karena terjadi perubahan sosial dan ketidakadilan sehingga ketidak toleransinya berkehidupan dalam masyarakat.¹⁷ Amin Abdullah menjelaskan bahwa sebuah fenomena sosiologis harus memiliki sebuah identitas yang memiliki kepentingan atas dasar agama, demi tercapainya sebuah kerukunan antar umat beragama.¹⁸ Walaupun tentang kerukunan dalam ranah sosial sering dibenturkan dengan pernyataan bahwa semua agama mengakui kebenaran dari masing-masing agama lain yang disebut dengan pluralisme.

3. Dinamika

Menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” penyebutan dinamika diartikan sebagai “gerak dari dalam”, adanya tenaga yang menggerakkan. Pengertian dinamika disebut juga dengan gerakan dari masyarakat yang berterus-menerus sehingga berakibat timbulnya tatanan hidup masyarakat berubah. “Dinamika” juga merupakan suatu proses kepada berubahnya perilaku, pemikiran dan kehidupan sosial kehidupan masyarakat. Melalui “dinamika adanya kecenderungan akses kepada timbulnya geseran nilai bagi hidup masyarakat. Implikasinya akan tercipta sebuah tatanan baru dalam kehidupan. disamping itu, dinamika akan

¹⁵Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam, (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis)*, (Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), Cet. I, 2009), h. 106-107.

¹⁶WA Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2004), h. 27.

¹⁷Roma Ulinuha, *Islam, Ruang Publik dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 09, Nomor 2, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 31.

¹⁸Syahrin Harahab, *Theologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 79.

menjadi konsekuensi dan sering muncul pada sekelompok masyarakat.¹⁹ Berubahnya ini berhubungan dengan banyak perkara seperti, kehidupan fisik manusia yang juga turut berubah.

Jika merujuk kepada pandangan Islam, Nabi Muhammad s.a.w dengan kekuasaan ditangannya membuat bermacam cara pada tatanan dimasyarakat jahiliah agar berubah. Setelah baginda melakukannya, perubahan akan terus berlanjut sampai masa sekarang. Perubahan tersebut adalah dinamakan dengan “dinamika”. Perkara ini dipercayai para intelektual, duniawi ini sedang menghadapi “the grand process of modernization”. Dalam Agama Islam disebutkan bahwa perubahan merupakan sunnatullah.

Disamping itu otoritas agama dan politik menjadi senjata yang ampuh dalam pembahasannya, perubahan disini dengan menggunakan etis dalam sosial keagamaan. Untuk menjaga kerukunan sehingga sering menggunakan tindakan rasis atau perkusi yang sebenarnya harus dibuang jauh-jauh karena untuk menjaga kepentingan orang banyak dengan tidak mempertahankan segelintir orang. Demokrasi di Indonesia belum bisa melepaskan dari perkara-perkara yang posudural dan melupakan perkara substansif tentang perlindungan bangsa walaupun masyarakatnya agama minoritas.

C. Aliran Keagamaan: Sebuah Gejala Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Didalam sejarah Islam, dijelaskan dengan nama “aksioma” adalah Agama Islam” serta kitab suci al-Qur’an merupakan “*interpretable*”. Dalam hal ini walaupun ulama sama-sama mengamini/sepakat bahwa bukanlah seluruh masyarakat/orang mempunyai kemampuan/otoritas dalam penafsiran al-Qur’an juga menyampaikan pendapatnya atau ideanya yang berhubungan dengan Islam

¹⁹Elly M. Setiadi, Usman Kolip, “*Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecabannya*”, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 49.

dan al-Qur'an, hanyalah manusia tertentu yang memiliki syarat dan kualifikasi keilmuannya.

Dengan dunia dunia/zaman yang semakin berkembang, “otoritas” atau peran seperti itu menjadi/telh “terfragmentasi” akibat tumbuhnya keinginan/sikap sekelompok orang/masyarakat yang prinsipnya yaitu “interpretasi Islam” dilarang untuk menjadi monopoli kalangan orang-orang khusus/tertentu saja, dalam menafsirkan al-Qur'an punya hak bagi orang punya syarat, juga menyampaikan, berpendapat dan menyebarkan konsep pikirannya berhubungan dengan Islam kepada masyarakat luas dengan keilmuan yang yang dimilikinya secara sempurna.

“*Fragmentasi otoritas*” adalah berhubungan dengan realitas yang tidak dihindarkan. Perkara ini bisa disebutkan diantaranya karena sebab pemikirannya dipengaruhi dengan kecerdasan yang dimilikinya, kemampuan pengetahuan dan kedisiplinan ilmu dan ketekunanya dalam belajar, ekprimen atau pengalaman, hasil riset ilmiah seseorang tumbuh subur dan berkembang pada masanya, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan politik di zamannya, *mazhab fiqh*, kecenderungan teologi sebagai anutannya serta masih banyak yang lainnya. Konsekuensi dari “*fragmentasi otoritas*” sebagaimana tersebut di atas yaitu lahirnya “para mufassirin baru” mungkin dalam mengemukakan dan berargumen dalam berbagai perkara tidak sama/berbeda dengan “para mufassirin terdahulu” juga mufassirin yang akan datang. “*Fragmentasi otoritas*” tidak hanya dibatasi kepada penafsir al-Qur'an saja, tetapi akan meluas pada aspek-aspek lainnya dari ajaran agama, seperti sunnah Nabi Besar Muhammad Rasulullah s.a.w. Perkara ini bisa dilihat kepada bermunculan berbagai *mazhab fiqh* dan bermacam aliran teologi.

Islam di Indonesia yang merupakan negara multi kultural, dinamika “*otoritas keagamaan*” muncul dan terjadi, disini dapa dilihat dari “fenomena pergeseran posisi sentral ulama dalam persoalan agama. Perkara terlihat pada permulaan abad- 20, “pergeseran ortodoksi Islam” dan “kiblat keilmuan dari Makkah ke Mesir”, sudah nampak dan terlihat seperti diantaranya dengan

bermunculan banyak permintaan fatwa berbagai kalangan muslim Melayu adalah “Muhammad Abduh dan Rashid Ridha”, khusus pada ulama Rashid Ridha, via tulisannya *jurnal al-Manar*. Permintaan fatwanya bukan hanya terlihat pada satu pergeseran rujukan/referensi paham keagamaan, karena sebelumnya permintaan fatwa ditujukan kepada ulama Mekah.²⁰ “Fenomena pergeseran ortodoksi” juga adanya “kecenderungan pragmentasi otoritas” terus melebar luas di dunia Islam termasuk di Indonesia.

Perkara ini terlihat jelas seperti abad ke-19 bahwa “Otoritas Tengku” tentu dengan rujukan “Kitab Gundul Kuning” merupakan sumber utama referensi keagamaan tentu beralih atau bergeser dengan terbitnya sejumlah tulisan pada jurnal ilmiah, berbagai surat kabar, tidak keculai penelian atau hasil riset dan berbagai karya yang dijadikan sebagai buku keislaman. Pergeseresan sebagaimana tersebut di atas akan terus berlangsung tidak henti-hentinya sampai saat sekarang ini, realitasnya dengan banyaknya dan dimana-mana baik media online dan toko-toko buku merupakan karya intelektual sarjana dan terbentuknya komunitas pemikir yang menonjolkan terminologi khusus bagi mereka sehingga lahir sejumlah pribadi mengklaim dirinya yang punya pemegang otoritas Islam, akhirnya muncullah “*Tokoh Agama*” yang kurang pendalaman pemahaman pendidikan agama. Seiring dengan berkembangnya teknologi maka, referensi dan rujukan keagamaan semakin bertambah. banyak oaring mulai memanfaatkan berbagai media online sebagai rujukan keagamaan.²¹

D. Kehadiran Agama dan Ekspresi Keberagamaan

Agama hadir dalam diri manusia sepanjang sejarah eksistensinya di muka bumi, agama juga hadir berdasarkan kebutuhan yang amat manusiawi,

²⁰Jajat Burhanuddin, “The Pragmentation of Religius Authority: Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia” dalam *Studia Islamica*, Vol 11. No. 1 2004. h. 29.

²¹Hartono Ahmad Jaiz, *Faham dan Aliran Sesat di Indonesia*, (Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 47

paling tidak dari segi emosional manusia itu sendiri.²² Atas sifatnya yang sejalan dengan sifat-sifat manusia inilah kemudian agama diyakini dan dijadikan sebagai landasan hidup *worldview*, karena agama dalam posisinya yang sakral dianggap sebagai blue print Tuhan yang diformulasikan untuk selanjutnya dijadikan rujukan untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup.²³ Dalam konteks yang demikian, agama sejatinya diturunkan dan dianut oleh masyarakat dikarenakan memiliki sebab dan tujuan-tujuan tertentu, dan yang paling fundamen dari sebab dan tujuan tersebut adalah harapan tempat menyangatkan kedamaian, kebaikan, dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Agama juga telah dijadikan sebagai ideologi dalam menciptakan dan menggerakkan spirit motivasional bagi manusia sebagai bentuk mengaktualisasi diri dalam kehidupan, dan sebagai gerakan revolusioner untuk pembebasan diri dari tirani, hegemoni, dan ketidakadilan sosial politik, budaya serta ekonomi²⁴ Atas dasar sifat dan fungsi agama yang demikianlah masyarakat memeluk agama, di samping karena beragama atau bertuhan sudah menjadi fitrah manusia. Dengan karakteristik dan peran agama yang demikian, tidak heran jika terdapat pandangan yang mengatakan bahwa jika kita mau mengetahui peradaban dunia atau suatu kelompok masyarakat dan negara, maka yang harus dibuka adalah pintu jendela agama. Dalam pandangan yang demikian maka kesimpulannya adalah, bahwa peradaban terbentuk berdasarkan keyakinan dan nilai religiusitas masyarakat, sehingga mempelajari kebudayaan atau peradaban tidak akan mencapai hasil maksimal jika penelitian tentang agama diabaikan.

Dalam teori budaya yang dikembangkan Clifford Geertz terlihat bahwa agama menjadi fondasi bagi terbentuknya suatu kultur dan tradisi dalam masyarakat, yakni manifestasi agama dalam budaya. Jika dilihat dari fakta

²²Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*. cet. I. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 10.

²³Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. I. (Bandung: Mizan, 1999), h. 209.

²⁴Fachry Ali dan Bahtiar Efendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986), h. 20.

historis berupa data-data arkeologis, karya-karya seni dan bangunan-bangunan sejarah, maka teori tersebut terbukti dengan sendirinya sebagai sebuah kebenaran sosial-kultural dan historis, seperti bangunan-bangunan candi yang masih berdiri kokoh di Jawa, seperti candi Borobudur, candi Prambanan, candi Loro Jonggrang, dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia, semua itu merefleksikan kuatnya agama dalam kehidupan masyarakat Jawa, dan candi merupakan simbol dari peradaban yang dibangun di atas fondasi agama, yakni Hindu dan Budha. Jika kita melangkah ke wilayah dunia lain juga akan ditemukan bukti-bukti historis yang sama, seperti Masjid Tajmahal di India, Piramida di Mesir, dan sebagainya. Semua itu merefleksikan sebuah peradaban keyakinan manusia atas agamanya.²⁵

Agama sebagai sistem nilai yang universal, memiliki daya tarik secara an sich dan begitu menarik untuk ditawarkan kepada manusia, sebagaimana yang dikatakan Joachim Wach bahwa agama memiliki tiga bentuk dalam pengungkapan nilai universalnya, yakni, *belief system* (pengungkapan teoretik yang terwujud sebagai sistem kepercayaan), *system of worship* (sebagai sistem penyembahan), *system of social relation* (sebagai sistem hubungan masyarakat). Sedangkan dalam tataran nilai religiusitas, agama memiliki lima dimensi, yaitu; dimensi belief (ideologi), dimensi practice (praktik agama), dimensi feeling (pengalaman), dimensi knowledge (pengetahuan) dan dimensi effect (konsekuensi).²⁶

Agama juga merupakan wilayah atau bagian dari fenomena hidup yang susah untuk dipahami, sebab agama yang sama akan berubah bentuk pemahaman pada wilayah yang berbeda, tergantung dari setting sosial-kultural masyarakat. Sebab itu kita menemukan beberapa pendefinisian agama oleh para pakar, sosiolog dan antropolog, seperti Clifford Geertz dengan merumuskan

²⁵Fahrurrozi, Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Islam Indonesia: Mozaik Multikulturalisme Indonesia, dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015, h. 17.

²⁶Fahrurrozi, *Ekspresi ...*, h. 18.

agama sebagai. *Pertama*, Sebuah sistem simbol yang berfungsi untuk membangun perasaan dan motivasi yang penuh kekuatan, pervasif dan tanpa akhir dalam diri manusia. *Kedua*, merumuskan konsep mengenai tatanan umum eksistensi. *Ketiga*, membungkus konsepsi-konsepsi tersebut dengan suatu aura faktualitas sehingga perasaan dan motivasi di atas menjadi realistis.

E. Toleransi Spiritual dalam Religiusitas

Salah seorang Islam diantara para intelektual adalah Soroush mengklasifikasi beberapa jenis religiusitas dan membedakannya bermacam jenis tersebut. Baginya ini bukanlah idea baru disebabkan di dalam petunjuk al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana cara membeda-bedakan jenis religiusitas tersebut. Pembuktian ini disampaikan karena dalam al-Qur'an terdapatnya penggolompokan terhadap orang kanan yaitu "*asbaab al-Yamiin*" juga orang terdahulu disebut dengan *al-Saabiqun*. Menurut Soroush pengklasifikasian religiusitas kepada tiga jenis. Semua jenis ini dilakukan untuk dipinjamkan dalam mengkonstruksikan tempat yang ideal bagi "toleransi spiritual". Kesatu, beliau sebut dengan "religiusitas pragmatis" yang bermakna bahwa religiusitas ini mempunyai berbagai sifat, diantaranya adalah sifat "*dogmatis, ritualistik, ideologis, terikat identitas, kolektif, legalistik-yuristik, imitative*" dan tradisional, sifat-sifat religiusitas hanya dimiliki oleh para ulama-ulama serta orang-orang yang mengikutinya.

Ulama-ulama disini berperan memberi dan mengajarkan pendidikan religiusitas kepada masyarakat secara keseluruhan manusia. Pendidikan moral yang merupakan moralitas agama menempati posisi penting dalam agama. Dengan religiusitas orang terus berusaha untuk mendapatkan kebenaran tentunya melalui gerakan, ini disebut dengan 'atribut ideologis'. Kalangan ini menjadikan atau dapat "menyaksikan agama" merupakan pelayan yang bermacam-macam/beragam didalam kehidupannya, seumpama apa yang dikenal dengan "pelayan sistem sosial dan politik".

Secara historis mengenal tentang pribadi yang berreligius dan berkarakteristik dalam kehidupan masyarakat. Disebabkan pada penekanan perbedaan dogmatis, sehingga religiusitas pragmatis menghasilkan kepada pembagian ideologis, adanya penghuni surga dan neraka, pandangan kepada pencipta yaitu Tuhan adalah milik satu-sat aliran. Sempitnya pengertian dan makna terhadap kebenaran juga mendapat ruang yang luas dalam mengartikan dan pemdefinisan kepada kepalsuan, identitas sebagai manusia yang sesungguhnya, menekankan secara mendetail perbedaan dan mengkotak-kotak dalam perbedaan aliran dan mazhab.²⁷

Sebenarnya Perbedaan religiusitas pragmatis bisa diterima dengan baik jika dijustifikasi sesuai dogma/tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jika pada seseorang/sekelompok pribadi masyarakat sudah teridentifikasi mempunyai kecenderungan religiusitas pragmatis berarti menanggapi akan perbedaan kepercayaannya/ atau yakin terhadap “*normatif-formalistik*”. Makna toleransi disini yaitu toleransi memiliki syarat seperti sempit dan ini untuk kemamfaatan dan kegunaan secara praktis. Semangat dan dorongan yang harus dilakukan yaitu adalah saling menghormati kepada oaring-orang yang berkeyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Terdapat juga toleransi prinsip resiprokalitas, hal seperti ini bisa didapatkan dalam berbagai ragam komunitas keagamaan dalam masyarakat.

Kedua, Apa yang disebut dengan “*religiuisitas gnostic*”, tentang hal ini sangat sensitif pada seseorang menggunakan rasio dalam klaim kepada sebuah kebenaran akan keyakinannya. Jika “religiuisitas pragmatis” sifatnya dogmatis, akibatnya “*religiuisitas gnostic*” menghasilkan kepada keraguan/skeptis intelektualis. Demikian pula, bila “religiuisitas pragmatisnya” yang sifatnya kelompok, menghasilkan “*religiuisitas gnostic*” yang sifatnya pribadi/individu, sehingga terus dengan refleksi dan revisi secara terus menerus.

²⁷Abdol Karim Soroush, “Jenis-jenis Religiositas”, *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam*, Vol. 2 No.4, 2001, h. 94-96.

Disini bisa terlihat bahwa "*religiusitas gnostic*" bukan menjadi stabil dan *fluktuasi*, tidak mengakui keragaman, kritis, investigasi juga independen kepada kebenaran. Keyakinan pribadi tentu tidak sama, sudah tentu juga tidak seragam/identik dengan pluralism baik dari teori maupun interpretasinya. Soroush menjelaskan bahwa di dalam ajaran Agama Islam, toleransi bisa terwujud bila ada sebuah klaim kebenaran dengan keyakinan dan kepercayaannya kepada kebenaran yang hakiki bisa menjadi bagian dari pluralitas.

Karena itulah di dalam "*religiusitas gnostik*", pendalaman dan keorisinalitasnya *al-Ilmu* atau *al-Ma'rifah* berindentic dengan *al-Thariqah* yang paling tepat untuk bisa ketahap toleransi. Keyakinan/kepercayaannya kepada agama akan melahirkan atau mendapatkan pengertian rasional bagi manusia yang merupakan sebagai pribadi yang memiliki nalart. Prosesnya tentu sesuai dengan perjalanan pemahanan dan keagamaan yang dimiliki oleh seseorang dan keyakinannya terhadap apa yang diyakini dalam hal ini adalah suatu kebenaran, tentu ada jembatan toleransi kepada orang-orang atau bagi individu yang berbeda.

Ketiga, *Religiusitas Eksperiensial*" memberi makna kepada "religiusitas pragmatis" adalah mempunyai kemamfaatan yang praktis. Kalau "*religiusitas gnostic*" dituntut kepada pengetahuan rasional, tetapi "religiusitas eksperien" harus bisa dibuktikan, disyaksikan dan dimanifestasikan. Rreligiusitas ini pada hakikatnya tidaklah "religiusitas instrumen" mental dan teoritis orang kepada pengalaman keyakinan dan kepercayaannya pada moralitas orang-orang dengan keyakinannya terhadap moralitas cinta. Jika cinta itu berbuah akan menghasilkan persatuan dan kebahagiaan, karena itulah mahabbah seperti yang dimiliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah merupakan sebuah kerahasian. Semuanya Ini sangat memungkinkan disebabkan dalam pemahaman agama dibolehkan dalam hal perbedaan. Pluralitas dari berbagai pengalaman dan religiusitas adalah persoalan prinsip yang tidak boleh terelakkan. Sebab itulah, religius eksperient

bercenderung kepada untuk peace dan individualis.²⁸ Term “*religiusitas eksperiensia,*” juga toleransi terhadap keyakinan/kepercayaan adalah sebagai bukti penyaksian kedamaian dan sangat dekat dengan Sang Pencipta.

Argumen rasional tentang prosisi “*Dokmatis*” bukanlah syarat yang harus ada secara mutlak dalam toleransi. Disebabkan “religius eksperient”, adalah menggap hal kontradiksi secara terus-menerus, demikian juga terhadap klaim keyakinan/kepercayaannya, sudah barang tentu berbeda dengan yang lain, ini adalah kebenaran yang diharapkan. Walaupun demikian ada batas tertentu dari jenis religius mempunyai kepada kesadaran bahwa berbedanya keyakinan/kepercayaan merupakan suatu keniscayaan sudah barang tentu memerlukan kepada toleransi, tetapi perkara toleransi spiritual mengakar dan bersarang kepada jenis “religiustitas eksperients”. Manifes kebenarannya dapat wujud, dirasa, mengalami, diyakini dan didekati. *Religius eksperient* sepertinya bisa dikatakan tumbuh dengan suburnya dikalangan sufistik, apakah *al-Tashawwuf al-Falsafī* ataupun *al-Tashawwuf al-‘Amalī*.

F. Peran Lembaga Keagamaan Dalam Menangani Perkembangan

Aliran Keagamaan

Perkembangan berbagai aliran keagamaan sempalan dengan segala dinamikanya harus diakui sebagai satu kenyataan sejarah. Bahkan Nabi Muhammad saw. pun dalam salah satu hadisnya sudah memprediksi akan lahirnya sejumlah aliran keagamaan dalam Islam yang jumlahnya melebihi jumlah aliran keagamaan pada dua agama samawi pendahulunya. Memiliki beberapa faktor sosiologis berakibat kepada lahir dan berkembang berbagai aliran keagamaan seperti terdapat secara historis pada masa dahulu, oleh karena itu bisa disebutkan untuk masa sekarang adalah. *Pertama*, pemahaman tentang ilmu keagamaan masyarakat muslim pada tingkatan terendah.

²⁸M. Akmansyah, Membangun Toleransi Dalam Perspektif Pendidikan Spiritual Sufistik, dalam *Kalam*, Volume 10, No. 2, Desember 2016, h. 523-524.

Kedua, Cerita/pragmentasi otoritas keagamaan selalu muncul dan terus ada disekitar masyarakat. *Ketiga*, lapa yang dikenal lembaga belajar agama seperti lebaga tradisional masih belum berfungsi dengan baik sebagaimana keinginan masyarakat secara keseluruhan. *Keempat*, umumnya keinginan/kecendrungan kepada hal-hal praktis melekat dikalangan masyarakat umat Islam, karena itulah, jika hal seperti itu masih ada, dapat dipastikan potensi lahir dan berkembang aliran yang tidak diharapkan akan bermunculan atau exsis aliran keagamaan dalam masyarakat Islam.

Ketika empat hal di atas tetap exsis, maka dengan sendirinya menyebabkan kepada implikasi bahwa; 1. Terdapatnya aliran keagamaan tumbuh subur dengan baik di daerah tertentu, mungkin juga ada yang tumbuh seterusnya hilang dengan sendirinya, 2. Terdapat juga aliran keagaman yang memungkinkan bertujuan untuk membentuk agama baru. Proses inilah berakibat kepada ada “truth claim” dan dominasi kebenaran terhadap aliran keagamaan sebelumnya, sudah pasti aliran ini sudah mengakar dan mapan di dalam masyarakat. tidak bisa dipungkiri pada waktu yang bersamaan juga aliran baru yang diciptakan/dilahirkan akan terus mengambil peran dalam melakukan pergulatan posisi juga ikut serta dalam memberi pendefinisian “kebenaran”, meminjam istilah “Geertz struggle for the real”.²⁹

Melihat tesa di atas bahwa penanganannya kepada gejala muncul dan berkembang terhadap aliran keagamaan dalam masysrakat janganlah menjadikan umat Islam mempunyai sikap “reaktif-emosional”, seharusnya yang harus dilakukan sebetulnya dengan pengembangan pendekatan filosofis dan argumentatif rasional guna keyakinannya bagi penganut aliran keagamaan dan dapat menjelaskan terhadap kekeliruan yang terdapat ada pada ajaran yang dianut. Karena itulah, pengantisipasi untuk perkembangan aliran keagamaan diperlukan upaya maksimal baik pada “tataran akademik” maupun “tataran

²⁹Mawardi, dkk, *Manajemen Lembaga Keagamaan*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019), h. 77-78.

praktis”. Kedua tataran ini terutama pada segi akademik berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi dan menghindari terhadap muncul serta berkembang aliran keagamaan dalam masyarakat oleh para ilmuan/ulama.

Usaha yang telah dilakukan biasanya/umumnya sifat pembelaan kepada ajaran anutan Agama Islam yang “*mainstream*”, penjelasan yang tegas serta jelas bahwa sesuaiannya ajaran dasar umat Islam terhadap pokok ajarannya seperti disebutkan di dalam “*al-Qur’an al-Karim*” serta hadis Rasulullah s.a.w, diperkuat baik penkelasan naqli dan aqli, sehingga terlihat bagaimana kelemahan-kelemahan argument yang ada pada aliran atau ajaran keagamaan yang mereka percayai dan anut. Demikian untuk membendung akan menyebar aliran keagamaan yang berbeda di atas, apa yang disebut sempalan secara praktis merupakan hal penting untuk paham benar atau memahami dengan baik terhadap realitas dalam masyarakat terhadap ajaran yang berkembang.

Maka suatu keperluan yang sangat penting dilakukan yaitu pendidikan pengetahuan harus ditingkatkan bagi generasi muda dalam masyarakat muslim dalam segala aspek ajaran Agama Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa sangat rendahnya pemahaman agama atau pengetahuan agama apalagi cenderungnya masyarakat hanya kepada yang praktis/pragmatis bagi pelaksanaan bidang ajaran keagamaan menyebabkan juga suatu kontribusi atau sumbangan yang sebenarnya tidak harus ada sehingga menyebabkan meningkatnya pengikut “aliran/gerakan keagamaan” dalam masyarakat pada umumnya. Melihat realitas seperti itu terutama tentang rendahnya pengetahuan masyarakat dalam hal pendidikan, disisi lain tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat dan peningkatan pengetahuan mereka kepada pemahaman agama serta cenderungnya mereka akan “aktualisasi nilai-nilai agama” dikehidupannya. Akhir-akhir ini, seiring dengan kebijakan pembangunan untuk peningkatan

kepada kualitas dalam berkehidupan terutama dalam bidang keagamaan, timbul juga fenomena-fenomena sosial keagamaan dengan bentuk yang berbeda.³⁰

Dalam hal ini masyarakat dengan sendirinya berinisiatif membangun dan membentuk balai-balai pengajian agama secara individu atau patungan bersama masyarakat juga mengajak warga untuk bergabung di dalam majelis taklim. Demikian juga banyaknya penyelenggaraan diskusi ilmiah di berbagai forum tentang pembahasan isu yang berkembang, hal ini biasa dilakukan di kampus-kampus atau lembaga pendidikan, serta penyelenggaraan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Besar Muhammad s.a.w dan Israk dan Mikraj Baginda. Sebagaimana kegiatan keagamaan inilah diharapkan agar masyarakat Islam dapat membendung hal yang negatif untuk berubah kepada positif didalam perkehidupan beragama untuk secepatnya. Disamping itu, perlu juga usaha maksimal dalam pemberdayaan lembaga keagamaan dan proaktif pengurus lembaga keagamaan terhadap persoalan “keberagaman umat Islam”. Suatu keniscayaan terhadap usaha maksimal sebab sekarang ini, kuatnya arus/proses sekularisasi tentu berpengaruh/dampak kepada mudurnya dampak tersebut bagi agama didalam kehidupan.

Penanganannya terhadap aliran keagamaan yang muncul tersebut atau yang disebut dengan “sempalan” diperlukan “Peran lembaga keagamaan”, terutama lembaga pendidikan tertinggi yaitu PTAI {Perguruan perguruan Tinggi Islam} merupakan tempat strategis dan sangat menentukan. perkara ini dikarenakan bukan disebabkan aspek SDMnya yang banyak di Perguruan Tinggi tersebut tetapi merupakan PTAI adalah sebagai menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian Dosen kepada masyarakat. Ditambah lagi banyak luaran dari PTAI (alumni) yang sudah menyebar kesuluruh daerah sampai ke pelosok-pelosok desa. Banyak juga para alumni dari PTAI yang memegang peranan penting di daerahnya (desanya) suatu

³⁰Mawardi, dkk, *Manajemen...*, h. 78.

langkah yang sangat mudah untuk mengambil kebijakan dalam penentuan daerah yang dipimpinya. Adanya alumni PTAI tentu mampu menjawab prolem ketertinggalan/kekurangan pemahaman tentang Ilmu Agama dalam masyarakat terhadap orang-orang atau pribadi-pribadi yang mempunyai dasar pemahaman agama lebih baik sehingga mampu untuk bisa meredam dan menghindari supaya jangan sampai luas “pragmentasi otoritas keagamaan”. Exsisnya terhadap “*Pemberdayaan Lembaga Keagamaan*” juga muncul/tumbuh sikap proaktif dalam kepengurusan dan tata kelola yang baik lembaga ini dalam menjawab persoalan keberagaman masyarakat Islam menjadi harapan untuk menjegal bila ada gejala kemunduran sehingga sangat menjadi urgen “peran agama” sebagaimana uraian tersebut penjelasan diatas bisa dihilangkan. Oleh karena itu, perlu terus menerus kepada untuk sama-sama, bahu membahu untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat muslim secara menyeluruh. Hal inilah yang bisa untuk mengatasi agar kecenderungan/kenginnanya akan perkembangan terhadap “aliran keagamaan sempalan” mampu dianti sipasi sejak dini.³¹

³¹Mawardi, dkk, *Manajemen...*, h. 78-79.

REFERENSI

- Abdol Karim Soroush, "Jenis-jenis Religiositas", *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam*, Vol. 2 No.4, 2001.
- Abdul Munir Mulkhan, *Sufi Piinggiran: Menembus Batas-Batas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Ahmad Tafsir, *Berjalan Menuju Langit*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012).
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. I. (Bandung: Mizan, 1999).
- Anand Khrisna, *Islam Esoteris: Kemuliaan dan Keindahan*, (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*. cet. I. (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Hamid Fahmi Zarkasyi, "Islam: Toleransi Tanpa Pluralisme", *Insists*, Ahad, 12 November 2017.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip, "Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya", (Jakarta: Kencana, 2011).
- Fachry Ali dan Bahtiar Efendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986).
- Fahrurrozi, Ekspresi Keberagaman Masyarakat Islam Indonesia: Mozaik Multikulturalisme Indonesia, dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015.
- Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam, (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis)*, (Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), Cet. I, 2009).
- Hartono Ahmad Jaiz, *Faham dan Aliran Sesat di Indonesia*, (Pustaka Al-Kautsar, 2003).

- Jajat Burhanuddin, "The Fragmentation of Religious Authority: Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia" dalam *Studia Islamica*, Vol 11. No. 1 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- M. Akmansyah, Membangun Toleransi Dalam Perspektif Pendidikan Spiritual Sufistik, dalam *Kalam*, Volume 10, No. 2, Desember 2016.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1992).
- Margareth Drabble, *The Oxford Companion to English Literature*, Oxford University: Oxford, 1998.
- Mawardi, dkk, *Manajemen Lembaga Keagamaan*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019).
- Media Zainul Bahri, *Esoterisme dan Kesatuan Agama-Agama dalam Jurnal Titik Temu*, Volume 2, No 1 Juli Desember 2009.
- Nasr ed. *The Essential of Frithjof Schuon dalam Media Jainul Babri*.
- Roma Ulinnuha, *Islam, Ruang Publik dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 09, Nomor 2, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Seyyed Husein Nars, *Pengetahuan dan Kesucian*, Ter. Suharsono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Siti Makhmudah, *Dinamika dan Tantangan Masyarakat Islam di Era Modernisasi*, dalam *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Volume 1, Nomor 2, September 2015.
- Syahrin Harahab, *Theologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Syahrin Harahab, *Theologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Thomas Mautner, *Dictionary of philosophy: the Language and Concepts of Philosophy Explained*, England: Penguin Book, 2005.
- WA Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2004).

Manajemen Keagamaan Dalam Moderasi Beragama

(Mawardi & Muqni Affan)



A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang unik yakni dapat sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan, kebutuhan ini juga mencakup kebutuhan spiritual, dalam hal ini adalah agama. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam bentuk kesiapan mengikuti semua petunjukNya. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghambakan diri pada yang lain, juga tidak diperhambakan oleh manusia lain. Di sinilah terlihat jelas esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir, manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi.¹

Suatu manusia yang telah memiliki agama, maka ia akan membentuk atau mengikuti lembaga keagamaan tertentu yang dianutnya. Ekspresi sosial dari ajaran serta kepercayaan agama dihidupkan dan dipelihara oleh adanya lembaga keagamaan. Tidak ada satu agamapun yang dapat hidup terus tanpa lembaga keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tahun 2019 sebagai “Tahun Moderasi Beragama”. Moderasi beragama dijadikan jargon serta nafas dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian

¹Kadek Hengki Primayana, Putu Yulia Angga Dewi Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital “*Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*”, Volume 19, Nomor 1. 2021, h. 46.

Agama. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, institusi ini berupaya untuk menempatkan diri sebagai institusi penengah (moderasi) di tengah keragaman dan tekanan arus disrupsi yang berdampak pada aspek kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Moderasi beragama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas. Moderasi beragama didiskusikan, dilafalkan, diejewantahkan, dan digaungkan sebagai framing dalam mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural.²

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama, yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dijadikan jalan tengah di tengah keberagaman beragama. Wajah moderasi beragama nampak dalam hubungan harmoni antara agama (Islam, Hindu, Budha dan Kristen) dan kearifan lokal (*local value*) di Indonesia. Kearifan lokal ini sebagai warisan budaya Nusantara, mampu disandingkan secara sejajar sehingga antara spirit agama dan kearifan budaya berjalan seiring, tidak saling menegasikan.³

Menurut Zain selaku Kepala Pusat Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi bahwa agama dan budaya memperkuat kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia. Ulama dan tokoh agama pun turut

²Kadek Hengki Primayana, Dalam “*Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindi*”, h. 46.

³Faiqah, Nurul dan Toni Pransiska. 2018. “Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018. H. 33-60.

serta dalam memprakarsai berdirinya Indonesia dalam kepaduan dan harmonisasi agama dan budaya. Berbagai persoalan fikih ataupun tafsir kehidupan dijawab dan disatukan dengan budaya. Agama datang memahkotai budaya lokal bukan menggerus ataupun mempertentangkannya.⁴

Upaya penguatan moderasi beragama dapat menjadikan tradisi ritual keagamaan sebagai penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Tradisi ritual keagamaan merupakan dimensi ekspresif dari agama yang tertanam secara turun temurun. Tradisi ritual keagamaan dapat dikelola menjadi medium kultural yang dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kebangsaan moderasi beragama berbasis toleransi, solidaritas kebangsaan dan kesetaraan.⁵

B. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan.⁶ Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Latin yaitu asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke Bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).⁷

⁴Siswayanti, Novita. Menguatkan NKRI dengan Moderasi Beragama. Diunduh dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menguatkan-nkridengan-moderasi-beragama>, pada tanggal 22 Nopember 2020.

⁵Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Agama, *Moderasi Beragama*. (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), h. 119.

⁶Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 1.

⁷Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 6.

Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Dapat dikatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni, yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.⁸ Berdasarkan berbagai paparan di atas, manajemen dapat didefinisikan sebagai “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. Definisi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Manajemen merupakan sebuah proses. Artinya, seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan ke dalam empat fungsi manajemen dilakukan secara berkesinambungan dan semuanya bermuara kepada pencapaian tujuan perusahaan/organisasi.
- 2) Pencapaian tujuan perusahaan/organisasi dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen dan mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian.
- 3) Pencapaian tujuan dilakukan secara efektif dan efisien. Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. Sedangkan efisien menunjukkan pencapaian tujuan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang paling minimal.
- 4) Pencapaian tujuan perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi.⁹

⁸Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1-2.

⁹Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga), h. 4.

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya¹⁰

Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran semua ahli tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.¹¹ Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi. Dalam makna yang sederhana “*management*” diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dipahami sebagai manajemen.¹²

Nawawi menyatakan, yaitu: “manajemen adalah kegiatan yang memerlukan kerja sama orang lain untuk mencapai tujuan”¹³ Pendapat kedua pakar di atas, dapat disimpulkan, bahwa manajemen merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, pengertian manajemen dinyatakan oleh Martayo, ia menyatakan bahwa “manajemen adalah usaha untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi

¹⁰Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 41.

¹¹Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 86.

¹²Syafaruddin & Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 16.

¹³Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Cet V (Jakarta: Jaha Masagung, 1993), h. 13.

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.¹⁴

Menurut Terry, yang dikutip Anoraga, menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁵ Manajemen merupakan sebuah proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen, ialah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Dengan demikian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien.

Jadi, dalam hal ini kegiatan dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai pelaksana. Jadi manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisiensi.

C. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen pada hakikatnya merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun. Mengenai macamnya fungsi manajemen itu sendiri, ada persamaan dan perbedaan pendapat, namun

¹⁴Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet IV (Yogyakarta: BPPFE, 1980), h. 3.

¹⁵Pandji Anoraga, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Cet I (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 109.

sebetulnya pendapat-pendapat saling melengkapi. Bila dilihat dari berbagai bentuk definisi yang digambarkan oleh para ahli administrasi dan manajemen, maka ada hal-hal yang perlu dianalisis untuk menjelaskan fungsi-fungsi tersebut. Perbedaan itu dipengaruhi oleh berbagai “factor filsafat” yang dianut. Perkembangan yang terjadi di masyarakat, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan yang dominan tentang kecenderungan-kecenderungan dalam manajemen sumber daya manusia.¹⁶

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Fungsi manajemen beraneka ragam seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, penanggulangan resiko, pengambilan keputusan dan pengawasan. Maka proses atau pendekatan operasional mempersamakan manajemen dengan apa yang dibuat seorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Sebaliknya, apa yang dibuat oleh sang manajer adalah berbeda, ia adalah suatu aktivitas yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok¹⁷ diantaranya:

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penataan staff (*staffing*), memimpin (*leading*), memberikan motivasi (*motivating*), memberikan pengarahan (*directing*), memfasilitasi (*facilitating*), memberdayakan staff (*empowering*) dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan

¹⁶Rahmat Yani, *Manajemen Pembinaan Keagamaan Panti Asuhan*, (Banda Aceh: (UIN Ar-Raniry, 2018), h. 23-25.

¹⁷George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 9.

pekerjaan yang benar sesuai ketentuan (*doing the right things*), sedangkan efisien berarti melakukan pekerjaan dengan benar (*doing thing right*).

D. Lembaga Keagamaan

1. Pengertian Lembaga Keagamaan

Lembaga-lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi adat-istiadat, kemudian berkembang menjadi tata kelakuan. Menurut W. Hamilton, bahwa lembaga merupakan tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai derajat sanksi. Kemudian Soerjono Soekanto menyimpulkan menurut sudut pandang sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Sumner melihatnya dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan cita-cita, sikap dan pelengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat kita simpulkan lembaga adalah suatu kelompok, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan peranan sosial pada kelompok masyarakat. Jadi lembaga ada seginya yang kulturil yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang ada segi kulturilnya yang berupa berbagai peranan sosial. Kedua segi itu berantar hubungan erat satu dengan yang lainnya.¹⁸

Lembaga keagamaan berarti badan atau organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama. Lembaga keagamaan

¹⁸Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), h. 23.

merupakan badan tempat mengembangkan dan membina kehidupan beragama. Lembaga keagamaan memiliki arti penting dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan membina kerukunan hidup antar umat seagama dan antar umat yang berbeda agama. Lembaga keagamaan menjadi salah satu lembaga yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya mengenai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang perlu diwujudkan untuk seluruh masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial guna hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.¹⁹

Dengan adanya lembaga keagamaan, setiap kelompok penganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai wadah tempat pembinaan. Selain itu, jika terjadi sesuatu pertentangan atau konflik antar umat beragama, para aparat lembaga keagamaan melakukan dialog, kerja sama, dan musyawarah untuk mengatasinya, di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Agama. Dengan demikian Lembaga keagamaan adalah lembaga mengatur kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli, salah satunya tokoh sosiologi Emile Durkheim yang menyatakan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral dan dilarang.

Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur hidup/kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hidup beragama. Selain itu pengertian lembaga agama adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan hidup beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian lain lembaga agama adalah praktek keagamaan dan sistem keyakinan dalam masyarakat yang

¹⁹Fadilla Mutmaina, Fungsi Lembaga Keagamaan Dalam Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Wahdah Islamiyah, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2022), h. xiv.

telah dibakukan dan dirumuskan. Para ahli mendefinisikan lembaga agama sebagai berikut:

- a) Emile Durkheim Pengertian lembaga agama menurut Emile Durkheim adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat praktek yang berhubungan dengan agama, kepercayaan dan hal-hal suci yang berguna untuk mempersatukan umat.
- b) Bruce J Pengertian lembaga agama menurut Bruce J adalah lembaga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Fungsinya untuk pencarian identitas moral, memberikan tafsiran dan penjelasan serta meningkatkan solidaritas kelompok.²⁰

2. Ciri-Ciri Lembaga Agama

Lembaga agama memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

- a) Merupakan sistem keyakinan.
- b) Merupakan perwujudan sesuatu yang diyakini sebagai hal gaib.
- c) Menjadi pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku.
- d) Mempersatukan umat.
- e) Bertujuan memuliakan umatnya.

3. Macam-macam Lembaga Agama

Lembaga agama dalam masyarakat secara umum antara lain;

- a) KUA (Kantor Urusan Agama) yang berfungsi untuk memberikan regulasi oengaduan KDART ataupun Pernikahan.
- b) Depag (Departemen Agama), menjadi salah satu contoh lembaga agama yang memberikan kontribusi pada peranan pendidikan-pendidikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

²⁰Rya Fitrianasari, *Peran Lembaga Agama Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Di Lazdai Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 22-23.

- c) Pengadilan Agama, merupakan salah satu bentuk lembaga agama yang memberikan regulasi tindakan-tindakan menyimpang dengan norma atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat
- d) Kementerian Agama (Kemenag), menjadi salah satu jenis lembaga agama yang diakui sebagai peranan tertinggi masyarakat dengan upaya memberikan hubungan kepada lembaga legislatif yaitu presiden. Adapun beberapa contoh institusi agama yang ada di Indonesia ini tidak terlebih haruslah mampu memberikan perlindungan pada semua keyakinan, antara lain sebagai berikut;

a. Islam

Contoh-contoh lembaga agama informal dalam Islam sebagai Agama Masyoritas diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki, Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI. Peranan MUI ini penting, selain memiliki fungsi memberikan jaminan halal/haram juga memberikan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan dinamika kehidupan sosial. Sedangkan lembaga eksternal islam antara lain Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh seperti LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh MUHAMADIYAH).²¹

b. Kristen

Lembaga agama lainnya yang mengatur tentang tata kelola hidup masyarakat, salah satu diantaranya adalah Persekutuan Gereja-Gereje Indonesia yang lebih dikenal dengan PGI. PGI ini sendiri memiliki peranan untuk mencitai dan mengasihi anak tuhan.

c. Katolik

Bentuk-bentuk lembaga keagamaan yang lainnya ialah khatolik, dengan lekat pada keyakinan ini adalah Konferensi Wali Gereja

²¹Rya Fitrianasari, *Peran...*, h. 23-24.

Indonesia yang kemudian disingkat menjadi KWI. Peranan KWI ini selain berkerjasama untuk memberikan perlindungan atas pemeluknya.

d. Buddha

Contoh lainnya yang berkaitan dengan lembaga agama, salah satunya ialah Agama Buddha dengan simbol institusinya adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang disingkat menjadi WALUBI. Fungsi institusi ini selain memberikan regulasi juga memberikan fatwa-fatwa tentang keagamaan.

e. Hindu

Jenis lembaga agama selanjutnya yang ada dalam Agama Hidup adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PHDI. Institusi ini memberikan pengulasan tentang berbagai masalah sosial di Indonesia serta memberikan perlindungan bagi seluruh WNI yang beragama Hindu.

f. Khonghucu

Khonghucu merupakan agama termuda di Indonesia yang telah diakui secara legalitasnya oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, sebagai salah satu keyakinan, ia memiliki lembaga agama dengan nama Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Dengan penyebaran pemeluknya hampir ada disebagaian besar Provinsi-Provinsi di Indonesia itu sendiri.

4. Fungsi Dan Peran Lembaga Agama

Secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu manifes (nyata) dan laten (tersembunyi).²²

a) Fungsi Manifes Lembaga Agama

1) Edukatif

²²Rya Fitrianasari, *Peran...*, h. 25-26.

Lembaga agama mengajarkan dan membenikan pendidikan moral (berfungsi edukatif) bagi pemeluknya tentang hal-hal yang baik atau buruk sebagai pedoman tingkah laku pemeluknya. Ajaran agama memberikan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan dan dihindari oleh umat beragama.

2) Penyelamat

Melalui lembaga agama setiap masyarakat memiliki keyakinan akan terselamatkan kehidupannya baik di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya. Setiap manusia tidak terhindar dan berbagai masalah dalam kehidupannya sehingga agama dapat menjadi penyelamat manusia.

3) Pengawas Sosial

Lembaga agama berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan yang ada dalam kitab suci setiap agama. Dalam kitab suci dan ajaran agama terdapat sanksi yang kelak akan diterima apabila masyarakat melanggarnya.

4) Persaudaraan

Lembaga agama mampu mempertemukan kelompok atau golongan manusia yang heterogen dalam hal kebudayaan, ras, dan suku bangsa ke dalam suatu keluarga besar lembaga agama. Keterikatan persaudaraan terjalin ketika masyarakat merasakan adanya solidaritas dan kesatuan yang kuat karena adanya satu kepercayaan agama tertentu.²³

b) Fungsi Laten Lembaga Agama

Fungsi laten lembaga agama adalah memunculkan sikap fanatisme. Anggapan bahwa agama tertentu lebih baik daripada agama

²³Rya Fitrianasari, *Peran...*, h. 27.

lain dapat menimbulkan sikap fanatisme sehingga dapat mengganggu kerukunan dan ketenteraman hidup beragama. Pendapat lain mengenai peran dan fungsi lembaga agama antara lain: Fungsi pokok lembaga agama yaitu memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan tuhan. Lembaga agama juga memiliki fungsi lain yang dibentuk oleh masyarakat, institusi agama sering kali memberikan dasar bagi perilaku yang ajeg (berpola) dalam masyarakat.

Para ahli hukum adat telah menyatakan bahwa hukum adat terdiri atas unsur asli dan unsur agama. Pernyataan ahli hukum ini memperkuat teori bahwa agama memberikan dasar pembentukan perilaku yang berpola. Kemudian masyarakat menyusun sanksi (positif dan negatif) melalui peraturan yang merupakan konsensus umum, dalam berbagai kasus, disamping membentuk dasar pola perilaku, lembaga agama juga berfungsi menyatukan nilai dan etika menjadi prinsip-prinsip dan menyediakan pedoman untuk mengambil kebijakan sosial. Disamping yang telah disebutkan diatas, masih terdapat fungsi lembaga agama, seperti :

1. Memberikan bantuan terhadap pencarian identitas moral.
2. Memberikan penafsiran untuk membantu menjelaskan keadaan lingkungan alam maupun social.
3. Peningkatan kadar keramahan bergaul, kohensi sosial, dan solidaritas kelompok.²⁴

E. Konsep Lembaga Keagamaan

Masyarakat sederhana biasanya tidak memiliki lembaga agama secara terpisah. Kelompok agama juga dapat disebut sebagai komunitas. Fenomena keagamaan terjalin dalam berbagai kegiatan, mulai dari kehidupan keluarga

²⁴Rya Fitrianasari, *Peran...*, h. 27-28.

sampai bidang-bidang social dan ekonomi. Dalam masyarakat-masyarakat yang kompleks lembaga keagamaan diperlukan demi terselenggaranya pertemuan, pengajaran, ritual dan untuk menjalin hubungan antar anggota secara internal maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Lembaga keagamaan yang formal umumnya baru dijumpai pada masyarakat yang telah berkembang diferensiasi, spesialisasi dan stratifikasi sosialnya. Kehadiran lembaga keagamaan yang khusus seperti itu sebagai konsensi dan meningkatnya spesifikasi dan pembagaian kerja sebagai atribut masyarakat. Tipe hubungan antara diferensiasi agama dengan lembaga keagamaan (Ronald Roberston):

- a. Tipe 1 adalah hubungan agama dengan masyarakat luas, terdapat di bagian dunia industry. Agama secara lembaga terpisah dari kehidupan ekonomi, politik dan pendidikan. Pada masyarakat ini, pembagian kerja dan spesialisasi telah berkembang secara lanjut.
- b. Tipe 2 adalah secara historis sering terdapat di kerajaan yang menganut agama negara, dan system birokratis sentral seperti Mesir yang mempunyai kecenderungan melaksanakan teokrasi secara ketat. Agama terorganisir pada tingkat pemerintahan difungsikan dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan dan kegiatan lain. Hal itu juga terdapat pada masyarakat Roma Katolik apda jaman modern seperti di daerah Portugal dan Spanyol. Demikian pula beberapa masyarakat muslim, memperlihatkan tipe ini. Masyarakat muslim umumnya cenderung diorganisir relative tidak memisahkan kegiatan agama dan non-agama.
- c. Tipe 3, relative jarang, contohnya adalah kelompok pengikut sekte agama di Amerika Serikat yang terpisah dari suasana aktivitas yan terorganisir, hanya menyebarkan literature agama dan sewaktu-waktu berkumpul.²⁵

²⁵Mawardi, dkk, Manajemen Lembaga Keagamaan, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019), h. 5-6.

- d. Tipe 4 terdapat di masyarakat primitif, dimana diantara kegiatan agama dan kegiatan lainnya erat hubungannya. Agama tidak terpisah dari kegiatan lainnya. Tetapi tidak ada lembaga keagamaan yang khusus, terpisah.

F. Kultur Moderasi Beragama

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan.

Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi teladan. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berbagai ritual budaya yang berakar pada tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal juga banyak dilestarikan, demi menjaga harmoni dan keseimbangan.²⁶

²⁶Kadek Hengki Primayana, Dalam "Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu", h. 49-50.

Peran negara dalam menjaga keseimbangan ini amat penting, karena akan sangat menentukan terciptanya moderasi, yang salah satu pilarnya adalah keadilan. Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk sangat besar. Namun demikian, kemajemukan pada tingkat agama dan internal agama tersebut harus diakui potensial bagi terjadinya konflik berlatar isu keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multi agama di mana masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinya lah yang paling benar, sedangkan yang lain salah, maka konflik yang mengatas namakan agama di Indonesia tergolong permasalahan yang rawan terjadi.

Luc Reychler (2006: 7) mengemukakan teori Arsitektur Perdamaian yang menyebutkan, dalam pengelolaan perbedaan agama dibutuhkan sejumlah syarat yaitu;

1. Ada-nya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial;
2. Bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama;
3. Adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-konflik;
4. Struktur sosial-politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat; dan
5. Struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi social.²⁷

²⁷Kadek Hengki Primayana, Dalam "Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu", h. 50-51.

REFERENSI

- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000).
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Agama, *Moderasi Beragama*. (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Fadilla Mutmaina, *Fungsi Lembaga Keagamaan Dalam Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Wahdah Islamiyah*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2022).
- Faiqah, Nurul dan Toni Pransiska. 2018. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018.
- George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Cet V (Jakarta: Jaha Masagung, 1993).
- Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Kadek Hengki Primayana, Putu Yulia Angga Dewi *Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital "Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu"*, Volume 19, Nomor 1. 2021.
- Mawardi, dkk, *Manajemen Lembaga Keagamaan*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019).
- Pandji Anoraga, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Cet I (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Rahmat Yani, *Manajemen Pembinaan Keagamaan Panti Asuhan*, (Banda Aceh: (UIN Ar-Raniry, 2018).
- Rya Fitrianasari, *Peran Lembaga Agama Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Di Lazdai Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).

Siswayanti, Novita. Menguatkan NKRI dengan Moderasi Beragama. Diunduh dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menguatkan-nkridengan-moderasi-beragama>, pada tanggal 22 Nopember 2020.

Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet IV (Yogyakarta: BPPFE, 1980).

Syafaruddin & Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*, (Medan: Perdana Publishing, 2011).

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Inklusivisme Jalan Menuju Dialog

(Taslim HM. Yasin & Nurul Maqhfirah)



A. Latar Belakang

Kerukunan umat beragama bukanlah hal baru. Para pendahulu kita telah memberikan keteladanan dalam membangun bangsa ini. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi penghalang di dalam menjalin persaudaraan dan persatuan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, seperti terlihat dalam sejarah lahirnya Sumpah Pemuda dan juga hasil rumusan Pancasila. Indonesia adalah bangsa yang penduduknya multi kultural dan multi agama yang ingin hidup dengan aman, damai dan tertib dalam kebersamaan dan kebinekaan. Untuk itulah pola pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia dikembangkan dengan rumusan tri kerukunan umat beragama yaitu: *pertama*, kerukunan intern umat beragama, *kedua*, kerukunan antar umat beragama dan *ketiga*, kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan intern umat beragama adalah terciptanya kerukunan di antara aliran-aliran, paham-paham, mazhab-mazhab yang ada dalam suatu agama atau umat tertentu atau komunitas agama. Kerukunan antar umat beragama adalah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, contohnya antara pemeluk agama Islam dengan Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Fu Tzu. Sedangkan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah adalah terciptanya keserasaian dan keselarasan antara pemuka agama dengan pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun rakyat Indonesia yang berjiwa agama, sehingga diharapkan akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur serta taat menjalankan perintah agamanya.

Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam upaya turut serta memajukan kehidupan beragama dan bermasyarakat serta menjamin kebebasan

setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sedangkan para pemeluk agama tidak perlu mengingkari kaedah kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Sebaliknya tidak perlu menjadi manusia yang mengingkari imannya untuk menjadi bangsa Indonesia yang patuh terhadap bangsa dan negaranya.

Selanjutnya, pembicaraan mengenai dialog antar agama nampaknya hanya bisa dimulai dengan mengandaikan adanya keterbukaan sebuah agama terhadap agama yang lain. Masalahnya mungkin baru timbul bila kemudian mulai dipersoalkan secara terperinci apa yang dimaksud dengan keterbukaan, segi-segi mana dari suatu agama yang memungkinkannya untuk terbuka terhadap agama lain, pada tingkat mana keterbukaan itu dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain perlu adanya rumusan batas-batas kemungkinan keterbukaan itu dapat dilakukan.

Berawal dari pandangan di atas, sebetulnya, kita telah memulai mengambil arah untuk berbicara tentang agama dari beberapa sudut pandang dengan akibat bahwa perkataan agama-pun akan berubah konotasi dan tekanan artinya dari tiap sudut pandang tersebut. Dalam tulisan ini, sama sekali tidak bermaksud mengajukan beberapa kerangka teoritis dalam hal membicarakan agama. Di sini yang dicoba adalah mencari kemungkinan bagaimana dengan menerima dan menghayati agama suatu agama, seseorang atau kelompok, dalam kualifikasinya sebagai orang beragama, dapat berdialog dengan kelompok orang dari keyakinan agama lainnya.

B. Pola Dialog Antar Umat Beragama

Martin Buber (1990:118) dalam analisisnya tentang masalah dialog membedakan relasi dalam dua kategori yaitu: pola hubungan *I - It* dan pola hubungan *I - You*. Pada relasi *I - It* merupakan pola hubungan di mana

seseorang muncul sebagai ego dan menganggap yang lain harus ditundukkan, dikuasai, dan digunakan. Sedangkan pada relasi *I - You* bersifat pola hubungan membuat seseorang sebagai person dan melihat orang lain sebagai person-person, sehingga pola hubungan seperti ini akan menimbulkan hubungan timbal balik yang harmonis dan dinamis.

Pada relasi model *I - It* seseorang menyikapi orang lain tidak dalam bentuk pola hubungan antar sesama manusia, tetapi lebih merupakan relasi antar manusia dengan benda, yaitu objek yang dapat ditata sesuai dengan keinginannya, diperalat sesuai dengan kemauannya serta tidak boleh diganggu apa yang menjadi kepentingannya. Sebaliknya, pada hubungan *I - You* seseorang akan berusaha menyapa manusia lain dengan penuh keakraban sehingga akan menimbulkan dialog sejati berupa perjumpaan antar sesama. Pola hubungan seperti ini akan menjadi relasi puncak dengan sang Pencipta yang diimplementasikan dalam bentuk kepatuhan melaksanakan ajaran agama, yang diantaranya berupa pengembangan nilai-nilai kemanusiaan di alam ini.¹

Sejalan dengan pandangan di atas, bahwa dialog yang saat ini dikembangkan lebih bersifat pola relasi *I - It*, akibatnya dialog ditekankan pada muatan kepentingan sepihak sehingga kurang memberikan ruang dan dampak positif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dialog yang lebih bersifat substansial perlu dikembangkan; suatu dialog yang tidak hanya mempertahankan kebenaran sepihak dan menafikan kebenaran pihak lain. Dalam konteks ini dialog dapat menjadi alat untuk menguasai dan alat dari kehendak untuk menguasai seseorang atau kelompok tertentu.

Konkretnya, melalui dialog sering suatu kebenaran dipaksakan untuk diterima oleh pihak lain. Pada saat pihak lain tidak dapat menerima kebenaran itu, maka yang akan muncul adalah permusuhan dan saling mencurigai. Dengan demikian peluang terjadinya konflik terbuka lebar. Dari itu semua yang paling

¹K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman, (Jakarta, 1983), h. 56-60.

penting adalah tindak lanjut pasca-dialog. Dari dialog yang dialogis itu hendaknya dikembangkan serangkaian program nyata yang mencerminkan keutuhan dan kebersamaan.

Selanjutnya, kerukunan umat beragama² merupakan salah satu hasil dari dialog. Dialog, berbeda dengan polimik. Polimik bersifat ofensif bertujuan mengalahkan lawan atau melumpuhkan kegiatannya. Di samping itu dialog berbeda dengan apologi. Apologi bersifat defensif. Seorang penulis apologi berusaha membuktikan kebenaran kaidah-kaidahnya namun apabila diserang kadang-kadang bernada polemis juga. Kedua-duanya, yaitu apologi dan polemik tidak keluar dari alam pemikiran orang lain. Yang dicari dalam dialog ialah kebenaran universal yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Dialog antar agama bukan saja untuk mencari saling pengertian akan tetapi juga untuk mengambil bagian dalam pengalaman batin orang lain. Ketentuan-ketentuan dialog yang baik diperhatikan ialah keterbukaan. Hormat, komunikasi, kesabaran, keinginan menerima, kesediaan memberi, koreksi dari, ketaatan terhadap kebenaran dan kebaikan.

Dialog ada dua macam yaitu dialog formal, dan dialog karya. Dialog formal ialah dialog mengenai suatu doktrin tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tema yang demikian dapat dibicarakan dalam suatu pertemuan yang terbuka ataupun tertutup. Selain itu dapat pula dibicarakan dalam suatu tulisan kemudian dipublikasikan. Dialog karya ialah mencakup segala bentuk pergaulan, kerja sama, hubungan sosial antara penganut berbeda-beda agama. Dialog semacam ini dapat pula diharapkan membawa hasil hilangnya curiga-mencurigai, bertambahnya penghargaan sekelompok dengan kelompok agama lain.. Tetapi dialog bukan usaha untuk mencoba memancing orang lain ke dalam agama sendiri.

²Zakiah Daradjat, dkk. *Perbandingan Agama-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 144-146.

Terlaksananya suatu dialog memerlukan persyaratan kesadaran agama pada kedua belah pihak. Apalagi dialog tematis belum dapat dilaksanakan, tidak ada alasan untuk meninggalkan dialog sama sekali. Dalam hal ini dialog karya dalam bidang sosial dapat dilanjutkan. Dialog dalam bidang sosial tampaknya lebih menguntungkan dari pada dialog doktrin atau tematis. Karena dialog berusaha mengetahui batin orang lain, maka lebih baik terlebih dahulu memulai dari dialog karya, baru kemudian pada dialog doktrin atau tematis. Usaha dialog antaragama telah lama dirintis. Beberapa tokoh agama yang berpandangan jauh ke depan telah tampil memprakarsainya, namun inisiatif tersebut belum mendapat iklim yang baik untuk maju secara lebih luas. Terlebih-lebih untuk dialog yang membicarakan suatu doktrin tertentu seperti Tuhan, wahyu, nabi, dan lain sebagainya.

C. Pentingnya Studi Perbandingan Agama

Sebenarnya, menurut Mukti Ali³ sejak tahun 1969 dialog antar pemeluk pelbagai agama di Indonesia sudah pernah dilaksanakan. Dialog itu diprakarsai oleh pemerintah dan dihadiri oleh pemimpin agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Tetapi, dapat dikatakan bahwa usaha itu tidak berhasil. Ada satu hal yang tidak dapat disetujui oleh Protestan dan Katolik, yaitu saran hendaknya penyiaran agama tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah beragama. Pemimpin-pemimpin Kristen dan Katolik tidak setuju dengan saran itu, hingga akhirnya pertemuan itu tidak menghasilkan perumusan sebagaimana diharapkan.

Sejak tahun 1971 dialog antar pelbagai pemeluk agama di Indonesia diadakan lagi. Dengan menyadari kegagalan yang dialami pada tahun 1969 itu, mulai tahun 1971 dialog tidak langsung dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi lebih banyak oleh badan atau lembaga bukan pemerintah. Demikian juga yang

³A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 83-86.

mengikuti dialog itu bukan hanya pemimpin agama, tetapi sarjana-sarjana agama. Dan masalah yang dibicarakan bukan masalah teologi atau keyakinan, tetapi masalah pembangunan. Demikianlah, setelah beberapa kali dan di beberapa tempat diadakan dialog, maka dapat dibentuk badan Konsultasi Antar-Umat Beragama yang merupakan badan yang membicarakan berbagai masalah pembangunan yang menyangkut kehidupan umat beragama di Indonesia. Hasil-hasil dialog yang semacam itu merupakan modal yang sangat besar bagi pembangunan bangsa.

Salah satu faktor yang juga mendukung suksesnya dialog antar agama di Indonesia adalah pantulan-pantulan dari berbagai macam pertemuan pemimpin-pemimpin agama yang bersifat regional dan internasional yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari Indonesia, yang hasilnya dibawa ke Indonesia, baik berbentuk uraian maupun dalam bentuk karangan. Hasil-hasil dialog regional yang tujuannya tidak lain hanyalah untuk menciptakan kehidupan dunia yang aman dan damai itu juga tidak kecuali pengaruhnya untuk suksesnya dialog-dialog antara umat beragama di Indonesia.

Selain dari itu, mental bangsa Indonesia berupa “musyawarah untuk mufakat” yang merupakan prinsip bukan hanya dalam kehidupan politik tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dengan kemampuan “merelatifkan” segala sesuatu, sebenarnya merupakan dasar bagi berhasilnya dialog antar umat beragama di Indonesia. Tetapi, di sini selalu timbul suatu masalah yang sangat serius, yaitu bagaimana hubungan antar ilmu perbandingan agama dengan dialog. Jika memang dialog itu menjadi tujuan dari Ilmu Perbandingan Agama, maka apakah dengan itu Ilmu Perbandingan Agama masih bisa obyektif dalam melakukan kajiannya?

Sebenarnya, mengaitkan studi Perbandingan Agama dengan tujuan untuk menciptakan hidup rukun antar umat beragama dengan melakukan dialog, baik regional maupun internasional, sudah lama dilakukan. Dan memang hal itu manimbulkan perdebatan yang hangat di sekitar pembahasan

tentang ilmu Perbandingan Agama. Pada tahun 1958, di Tokyo, diadakan Kongres Internasional oleh The International Association for the History of Religions. Itu merupakan kongres kesembilan yang pertama diadakan di luar Eropa. Dalam kongres itu, Friedrich Heiler dari Marburg menyatakan uraian tentang “*The History of Religions a Way to Unity of Religions*”, yang menerangkan bahwa memberi penerangan tentang kesatuan semua agama merupakan salah satu dari tugas-tugas yang amat penting dari studi ilmu agama.

Pertanyaan itu sering dijawab oleh orang-orang yang juga menekuni ilmu perbandingan agama, dengan menyatakan bahwa studi perbandingan agama itu mempunyai alasannya sendiri, dan bahwa mencampur-aduk tujuan itu kategori-kategori “subyektif” dan emosional, seperti “dialog”, tidak bisa-tidak akan menghilangkan ketetapan dan kualitas, dan bahwa sebenarnya melaksanakan dialog itu adalah bukan bagian dari tujuan mempelajari ilmu perbandingan agama.

Selanjutnya, dalam Kongres itu Heiler menyatakan bahwa teradisi agamais Barat, secara tradisional, adalah sikap mereka terhadap agama-agama lain dengan memberikan kepada agama mereka sendiri validitas mutlak. Namun demikian, terhadap teradisi toleransi di dunia ini sejak dari Asoka sampai kepada bapak-bapak perbandingan agama. (“...orang-orang seperti Friedrich Max Muller, Nathan Soderblom, Rudolf Otto, Tor Andrae, Alfred Loisy, Gerardus van der Leeuw, Raffaele Pettazzoni”) dan yang memberikan kepada kita, “...seonggok kebijaksanaan yang dengan itu fanatisme yang telah berabad-abad umurnya dihilangkan. “ Heiler melihat betapa dekatnya agama-agama itu satu sama lain; dengan membandingkan strukturnya, keyakinan dan amalannya, ia dibawah kepada sesuatu yang “transenden” melampaui semua namun tetap imanen dalam hati manusia.

Oleh karena itu, studi ilmu Perbandingan Agama merupakan pencegah yang paling baik untuk menghadapi dan melawan eksklusivisme, karena ia mengajarkan cinta; di mana ada cinta tentu di situ ada kesatuan dalam jiwa. R.J.

Zwi Werblowsky, seorang Yahudi anggota terkemuka dari IAHR, menganggap bahwa buku Joachim Wach, *The Comparative Study of Religions*, yang banyak kami kutip dalam penjelasan ini, telah dikritik olehnya, dengan mengatakan bahwa pengarangnya mencampuradukkan antara *Religionswissenschaft* dengan teologi.

Memang Wach sangat menghargai tradisi Katolik dan Protestan. Tetapi ia juga giat mengambil bagian dalam gerakan ekumene. Toleransi dalam kehidupan agama merupakan tujuan studi Perbandingan Agama. Werblowsky menyatakan dalam usaha untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan hampir seluruhnya kepada ahli-ahli teologi, atau paling tidak kepada pembaca-pembaca yang bersimpati kepada jangkauan tertentu dari nilai-nilai teologi. Kesulitannya, menurut Werblowsky, diciptakan oleh situasi di mana, ahli teologi memeluk suatu agama dan mengaku mempunyai nilai mutlak, dalam waktu yang sama juga menerima nilai-nilai liberal tertentu yang tidak membiarkan diri menulis bentuk-bentuk agama lain hanya sebagai omong-kosong atau kesalahan belaka.

Wach adalah seorang ahli teologi, dan bukunya itu ditujukan kepada ahli-ahli teologi lain. Itulah kesulitannya, karena “Perbandingannya Agama” atau *Religionswissenschaft* selamanya tidak dapat membiarkan dirinya berkompromi dengan cara ini. Demikian juga masalah-masalah dalam buku itu adalah bukan soal “Perbandingan Agama murni”, tetapi “teologi yang berusaha keras ke arah pendekatan positif terhadap Perbandingan Agama”. Dan lagi “kekacauan antara teologi dan *Religionswissenschaft* adalah ciri dari buku itu secara keseluruhan.”

Paralel dengan Kritiknya terhadap Joachim Wach, maka Werblowsky juga tidak setuju dengan pandangan Heler tentang Perbandingan Agama, karena menurutnya Heiler mencampuradukkan antara tujuan ilmu yang murni obyektif dengan tujuan “kerukunan hidup antara umat beragama” yang subyektif. Pandangan Werblowsky merupakan aliran keilmuan yang “obyektif ilmiah murni”. Setiap pemikiran yang sebenarnya, ia menulis, “...harus menyingkahkan

kepercayaan agamanya dari studinya, apa pun ciri ‘agama’ dari motif dan dorongan yang menyebabkan ia mempelajari agama.” Orang seperti Heiler sudah barang tentu mempunyai kelompoknya sendiri, terutama dari Amerika dan Kanada, dan Werblowsky juga mempunyai kelompoknya sendiri, terutama dari Eropa Barat.

Seorang ahli Ilmu Perbandingan Agama di Amerika, Erwin Ramsdell Goodenough, pada tahun 1959 menggambarkan iklim dari opini yang berkembang pada waktu itu dengan kata-katanya: “Generasi sekarang ini menginginkan suatu jaminan bahwa eksistensinya yang sebenarnya adalah tidak dalam dunia ilmiah, atau kata-kata yang sangat singkat tentang pilihan sangat sulit yang dihadapi oleh ilmu Perbandingan Agama sejak permulaannya. Ilmu, sebagaimana kita mengetahui, menginginkan “murni”, yang berusaha untuk memperoleh pengertian yang historis dan analitik tentang agama sebagai suatu fenomena manusia; atau menyalurkan energinya kepada usaha yang dicari oleh agamanya sendiri, yang dengan itu menjadi ilmu “terapan” yang hampir-hampir saja menjadi soteriologi. Sudah barang tentu tuntutan untuk ketetapan analitik seringkali terdengar menentang latar belakang dari kesibukan berbagai macam pertemuan tentang Perbandingan Agama. Demikian juga soteriologi bisa juga merupakan reaksi terhadap apa yang dianggap sebagai analisis yang dianggap merusak.

Tetapi Mukti Ali sendiri berpendapat bahwa mendekati agama secara ilmiah bisa digabungkan dengan tujuan untuk mempelajari agama. Oleh karena itu, dapat dilakukan bahwa seorang ahli Perbandingan Agama dengan mempelajari agama secara ilmiah dapat juga meluruskan tujuannya, bahwa mempelajari Perbandingan Agama dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kerukunan hidup antara pelbagai umat beragama. Dengan ini Mukti Ali tidak menyetujui pendapat “ilmu untuk ilmu”, sebagaimana juga tidak menyetujui pendapat “seni untuk seni”. Tetapi setuju dengan pendapat bahwa

ilmu, juga seni, untuk ibadah “karena keyakinan bahwa kehidupan seorang itu adalah untuk ibadah kepada Allah Swt.”

Kembali kepada studi ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, ternyata sedikit atau banyak telah membantu memudahkan pelaksanaan dialog antar umat beragama di negeri ini. Dengan dialog itu, kerukunan hidup antara umat beragama, sebagaimana kita melihat, adalah sangat memuaskan. Dengan itu studi ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, di samping mempelajari agama secara ilmiah, juga dimaksudkan untuk pembangunan masyarakat dan negara di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, tujuan mempelajari ilmu Perbandingan Agama adalah untuk ikut serta bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai maksud baik, menciptakan dunia yang penuh dengan ancaman rudal dan nuklir yang akan membinasakan umat manusia.

D. Sikap Dialog Antar Umat Beragama

Pluralisme, menurut Budhy Munawar Rachman⁴ tidak dapat dipahami dengan hanya mengatakan bahwa masyarakat kita mejemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justeru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluramentasi juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*) hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme. Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antar sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia, “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan

⁴Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 34-48.

segolongan yang lain, maka pastilah bumihancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam. “(Q.S.al-Baqarah 251).

Kutipan panjang pembukaan di atas menegaskan adanya masalah besar dalam kehidupan beragama yang ditandai oleh kenyataan pluralisme dewasa ini. Dan salah satu masalah besar dari paham pluralisme yang telah menyulut perdebatan abadi sepanjang masa menyangkut masalah keselamatan adalah bagaimana suatu teologi dari suatu agama. Untuk mendapatkan suatu pemahaman teologi yang pluralis seperti dikemukakan di atas, sangat penting mengerti segi-segi konsekuensial dari sikap keberagamaan kita: bahwa sikap keberagamaan kita menentukan bagaimana pandangan terhadap agama-agama lain. Dalam penelitian ilmu agama-agama, paling tidak ada tiga sikap keberagamaan yaitu eksklusivisme, inklusivisme dan paralelisme.

Pertama, eksklusif sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini. Bagi agama Kristiani inti pandangan ini adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau melalui Aku” (Yohanes 14:6). Ayat ini persepektif orang yang bersikap eksklusif sering dibaca secara Literal. Juga ada ungkapan yang selalu menjadi kutipan, “Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain- maka terkenallah istilah *No Other Name!* – yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” (Kisah Para Rasul 4,12). Sehingga istilah “*No Other Name!*” itu lalu menjadi simbul tentang tidak adanya keselamatan di luar Yesus Kristus.

Pandangan seperti ini sudah dikenal lama bahkan sejak abad pertama dari Gereja, yang kemudian dapat perumusan seperti *extra ecclesiam nulla salus!* (Tidak ada keselamatan di luar Gereja), juga berkaitan dengan masa depan, *extra ecclesiam nullus propheta!* (Tidak ada nabi di luar Gereja) Pandangan ini pernah dikukuhkan dalam Konsili Florence 1442. Di antara tokoh teolog Protestan

yang menganut pandangan ini adalah Karl Barth dan Hendrick Kraemer. Hendrik Kraemer menulis buku *The Christian Message in a Non-Christian World*, sebuah buku yang disebut-sebut sebagai buku yang menjadi basis untuk pengajian selama bertahun-tahun sejak pertama kali diterbitkannya. Katanya dalam buku tersebut, “Tuhan telah mewahyukan *jalan, Kehidupan dan Kebenaran* dalam Yesus Kristus dan menghendaki ini diketahui di seluruh dunia.” Sementara Karl Barth merupakan tokoh teologi dialektis, dan secara tajam menentang kecenderungan teologi liberal, khususnya yang berasal dari Amerika, yang memberi ruang terhadap berkembangnya paradigma inklusif.

Untuk contoh Islam, banyak penafsir yang menyempitkan Islam pada pandangan-pandangan eksklusif, beberapa ayat yang bisa dipakai sebagai ungkapan Islam adalah :

Hari ini orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Janganlah kamu takut kepada mereka; takutlah kepada-Ku. Hari ini kusempurnakan agamamu bagimu dan Ku-cukupkan karunia-Ku untukmu dan Ku-pilahkan Islam menjadi agamamu.

Barang siapa menerima agama selain Islam (tunduk kepada Allah) maka tidaklah akan diterima dan pada hari akhirat ia termasuk golongan orang yang rugi. Sungguh, agama pada Allah ialah Islam (tunduk pada kehendak-Nya)

Kedua, inklusif pandangan yang paling eksperesif dari paradigma inklusif ini tampak pada dokumen Konsili Vatikan II, mempengaruhi seluruh komunitas Katolik sejak 1965. Dokumen yang berkaitan dengan pernyataan inklusif berkaitan dengan agama lain, ada pada “Deklarasi tentang hubungan Gereja dan Agama-Agama Non Kristiani”. Teolog terkemuka yang menganut pandangan ini adalah Karl Rahner.

Di sini, Rahner memunculkan istilah inklusif, *the Anonymous Christian* (Kristen anonim) yaitu orang non-Kristiani. Para “Kristen anonim” ini adalah pandangan Rahner juga akan selamat, sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah mendengar Kabar baik. Tetapi pandangan ini dikritik oleh

paradigma pluralis, sebagai membaca agama lain dengan kaca mata agama sendiri.

Dikalangan Islam inklusif menganut suatu pandangan bahwa agama semua Nabi adalah satu. “Para Nabi adalah saudara satu ayah; ibu mereka banyak, namun agama mereka satu.” (Hadits: Rasulullah s.a.w. bersabda, “Aku adalah orang yang paling berhak atas ‘Isa putra Maryam di dunia dan akhirat. Para Nabi adalah saudara satu bapak, ibu mereka berbeda-beda namun agama mereka satu (Bukhari). Menurut kalangan Islam Inklusif ini, Allah memang tidak menghendaki adanya kesamaan manusia dalam hal (monolitisisme). Adanya perbedaan menjadi motivasi berlomba berbagai kebaikan; dan Allah akan menilai dan menjelaskan berbagai perbedaan yang ada itu (QS. al-Maidah 48).⁵

Ketiga sikap paralelisme. Paradigma ini percaya bahwa setiap agama (agama-agama lain di luar Kristen) mempunyai jalan keselamatannya sendiri, dan karena itu klaim bahwa Kristianitas adalah satu-satunya jalan atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain haruslah ditolak, demi alasan-alasan teologi dan fenomenologis. Tokoh utama yang paling impresif mengemukakan paradigma pluralis ini adalah John Harwood Hicks dalam karyanya, *God and the Universe of Faiths* (1973). Melalui buku ini ia dianggap sebagai tokoh yang telah melakukan revolusi dalam teologi agama-agama. Dalam buku ini, dalam soal Kristen dan agama-agama lain, ia menggunakan analog astronomi. Dalam astronomi Ptolemeus, dikatakan bahwa bumi adalah pusat dari seluruh alam semesta ini.

Diterangkan juga tentang pergerakan planet-planet lain oleh *postulating epicycle*. Pertumbuhan jumlah *epicycle* menjadikan gambaran Ptolemeus makin tidak masuk akal. Karena itulah akhirnya muncul gambaran Kopernikus, yang menggantikan gambaran Ptolemeus, dengan menganggap bahwa mataharilah yang sebenarnya merupakan pusat alam semesta, bukan bumi. Dengan analogi

⁵Departemen Agama RI, *Bingkai Teologi, Proyek Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1979).

ini Hicks hendak mengatakan bahwa teologi Ptolemeus kuno (maksudnya tentu saja orang seperti Barth, Kraemer, dan lainnya) dan pertumbuhan *epicycle*-nya (pada Rahner, dan Lainnya) yang menganggap bahwa Yesus Kristus adalah pusatnya, makin tidak mungkin menerangkan agama-agama lain. Karena itu ia melakukan revolusi Kopernikan dalam bidang pemikiran teologi diperlukan, dengan mengganti *Kekeristenan* (Yesus-Kristus) kepada *tuhan* sebagai pusat dari alam semesta iman manusia. Semua agama melayani dan mengelilingi-Nya.

Sementara tafsir Islam pluralis adalah pengembangan secara lebih liberal dari Islam inklusif. Banyak upaya dilakukan untuk mengembangkan paham Islam pluralis ini. Misalnya perbedaan dalam meletakkan prioritas antara “perumusan iman” dan “pengalaman iman.” Menurut para penganut Islam pluralis (misalnya Seyyed Hossein Nasr), setiap agama pada dasarnya distruktur oleh dua hal tersebut: perumusan iman dan pengalaman iman. Hanya saja setiap agama selalu menganggap yang satu mendahului yang kedua. Persis dalam perbedaan ini, sikap pluralis bisa diterima, karena misalnya antara agama Islam dan Kristen perbedaannya terletak dalam menaruh mana yang lebih penting antara hal kedua tersebut.⁶

Islam mendahulukan “perumusan iman” (dalam hal ini *tawhid*) dan pengalaman iman mengikuti perumusan iman tersebut. Sebaliknya agama Kristiani, mendahulukan pengalaman iman (dalam hal ini pengalaman akan Tuhan yang menjadi manusia pada diri Yesus Kristus, yang kemudian disimbolkan dalam sakramen, dengan rumusan dogmatis mengenai trinitas. Perbedaan dalam sturuktur perumusan dan pengalaman iman ini hanyalah ekspresi kedua agama ini dalam merumuskan dan mengalami Tuhan yang sama. Pada dasarnya pandangan Pluralis tidak menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah keseragaman bentuk agama. Sebab gagasan pluralisme

⁶Ahmad Norma Permata, (ed.). *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Kanius, 2000), h. 23.

keagamaan, seperti kata Raimundo Panikkar “berdiri di antara pluralitas yang berhubungan, dan kesatuan monolitik.”

E. Dialog dan Kerjasama

Pada tahun 1993 di Chicago, Perlembagaan Agama-agama Sedunia mengeluarkan suatu deklarasi menuju etika global. Tidak ada tata global baru tanpa suatu etika global baru. Suatu tuntunan mendasar adalah bahwa setiap orang harus diperlakukan secara baik. Menurut A.B.Sinaga⁷ (1997, 118-122) ada 4 komitmen yang menjadi orientasi yaitu: (1) komitmen terhadap budaya tanpa kekerasan dan budaya hormat terhadap kehidupan, (2) komitmen terhadap budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, (3) komitmen terhadap budaya toleransi dan kehidupan yang setia terhadap kebenaran, (4) komitmen terhadap budaya dengan kesamaan hak-hak dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya deklarasi menegaskan, bahwa bumi tak akan dapat diperbaiki, kecuali kita mencapai transformasi dalam kesabaran orang-orang mau pun dalam kehidupan masyarakat.

Secara lebih konkret, membangun kerukunan antar umat beragama dapat digambarkan dalam 4 macam bentuk kegiatan yaitu: *Pertama*, dialog kehidupan antar umat beragama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling mengenal. Dialog ini terjadi dalam kehidupan bersama sehari-hari, di mana orang-orang dengan iman yang berbeda-beda mengalami situasi yang sama, suka, kecemasan dan pengharapan bersama. Dari situ muncullah kepedulian pula. Orang-orang yang hidup berdampingan sebagai suatu komunitas menghadapi kebutuhan-kebutuhan bersama, kebutuhan air bersih, perumahan yang sehat, pendidikan yang cukup, kebutuhan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Komunitas yang sama mempunyai kepedulian bersama terhadap situasi yang tidak adil yang merugikan sesamanya. Bersama-sama pula dirasakan

⁷Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Religius*, (Jakarta: Kanisius, 1994), h. 120.

perlunya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup agar tidak dimanipulasikan oleh kepentingan komersial yang tidak adil, yang tidak hanya menelantarkan orang-orang, tetapi juga menghancurkan alam. Dialog kehidupan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan memunculkan keperdulian bersama.

Kedua, dialog pengalaman religius. Di sini umat yang beragama berbeda-beda berbagai pengalaman iman secara lebih mendalam. Pada dataran ini umat satu sama lain dapat saling memperkaya penafsiran dan penghayatan iman, saling mentransformasikan hidup berimannya. Dialog yang jujur mengandaikan kebebasan dan kesanggupan untuk berbagi pengalaman. Kalau momen ini bisa terjadi, maka dialog antar umat beriman dan umat beberapa agama akan mampu bersama-sama mencari dan menemukan kehendak dalam situasi hidup nyata yang dialami dan dihadapi bersama, tanpa hal ini dialog menjadi dangkal.

Ketiga, dialog teologis. Pada dataran ini dapat dijalankan dialog macam-macam ungkapan atau fungsi keagamaan. Bersama-sama dapat dijalankan analisis mengenai situasi yang dialami bersama, dapat pula diadakan kajian teologis, baik pada taraf teologis ilmiah maupun pada taraf berbagai pengalaman yang lebih sederhana. Dapat pula dibicarakan hal-hal yang merupakan pertanyaan bahkan kecurigaan dari dua belah pihak. Demikian misalnya dapat dibicarakan isu mengenai Kristenisasi, mengenai Islamisasi, dapat dibahas perbedaan-perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai situasi sosial yang ada.

Keempat, dialog aksi atau kerjasama untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adil. Pada dialog aksi umat antara agama bersama-sama mentransformasikan masyarakat akan menjadi lebih adil, agar keutuhan ciptaan, lingkungan hidup dilestarikan. Dalam konteks pluralisme religius dan tantangan kemiskinan, jati diri lembaga agama komunitas pelayanan yang bersifat dialogal dan transformatif. Transformasi yang terjadi bukanlah hanya kehidupan masyarakat, melainkan juga kehidupan beriman, menjadi lebih mendalam.

Dalam kesaksian iman, di mana perjuangan untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan merupakan bagian integral jati diri. Berbagai macam dialog sebagaimana diuraikan di atas kiranya bukanlah suatu yang asing dalam masyarakat Indonesia. Kalau disadari hal yang sudah berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan, kiranya hal itu juga dapat lebih disyukuri dan dikembangkan.

F. Masa Depan Agama-agama

Dalam analisisnya, Harold Coward⁸ (1989:185) mengatakan bahwa untuk mengkonseptualisasi dan membagi pengalaman keagamaan juga sangat berakar dalam hakikat manusia untuk menolak sikap berdiam diri dan memberikan jawaban yang dapat diterima. Sebetulnya kaum Madhyamika sendiri tidak dapat dikatakan mengambil sikap berdiam diri. Ketentuannya mengenai sikap berdiam diri hanya dimaksudkan untuk penegasan di atas pengetahuan *mutlak*. Sejauh batas itu dihormati, maka diskusi, termasuk diskusi teologis dapat berlangsung.

Maka sebagai langkah pertama kita berusaha untuk menunjukkan beberapa praanggapan yang menjadi dasar dialog mengenai masa depan agama. Ada enam praanggapan yaitu (1) bahwa dalam semua agama ada pengalaman mengenai suatu realitas itu dipahami dengan berbagai cara baik dalam masing-masing agama maupun dikalangan semua agama dan bahwa pengakuan terhadap pluralitas diperlukan baik untuk melindungi kebebasan beragama maupun untuk menghormati keterbatasan manusia; (2) bahwa bentuk-bentuk pluralitas agama berfungsi sebagai alat; (3) bahwa karena keterbatasan dan sekaligus kebutuhan akan komitmen terhadap suatu pengalaman pertikular mengenai realitas yang transenden, maka pengalaman pertikular, meskipun terbatas, akan berfungsi dalam arti sepenuhnya sebagai kriteria yang

⁸Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, (Jakarta: Kanisius, 1989), h. 185.

mengabsahkan pengalaman keagamaan pribadi sendiri; (5) bahwa ajaran mengenai toleransi dan keharusan moral harus selalu diperhatikan; dan (6) bahwa melalui dialog yang kritis terhadap diri sendiri harus menerobos lebih jauh ke dalam pengalaman pertikular sendiri mengenai realitas transenden (dan mungkin ke dalam realitas transenden kepada orang-orang lain).

Mari kita membahas masing-masing praanggapan ini secara rinci. Praanggapan ke-1 hanya menyatakan pangakuan yang terdapat dalam setiap agama yang disilidiki. Praanggapan ini tidak dapat menilai apakah realitas transenden itu sama atau berbeda di antara agama-agama. Penilaian seperti itu akan bersifat mutlak, akan melebihi batas-batas pengetahuan manusia, dan, oleh karena itu, paling baik apabila hal itu tidak dibicarakan.

Praanggapan ke-2 timbul karena eksistensi dan hakikat pluralisme keagamaan dan karena keterbatasan dalam penyusunan teologi yang telah dibahas dai atas. Praanggapan itu mencegah ditegaskannya semacam kemutlakan yang dapat menyebabkan dialong antara agama menghancurkan diri. juga praanggapan itu melindungi kebebasan beragama.

Praanggapan ke-3 menekankan pentingnya fungsi bentuk-bentuk agama sebagai media untuk berlangsungnya pengalaman keagamaan bahwa wahyu dan doktrin, dari banyak agama merupakan sarana untuk mencapai realitas yang transenden. Sudah tersimpul di dalamnya, bahwa pluralitas bentuk-bentuk alat juga menekankan keanekaragaman kecondongan rohani orang-orang – suatu fakta yang sering diabadikan oleh absolutisme keagamaan masa lalu, sehingga merugikan diri mereka sendiri.

Beranggapan ke-4 barang kali merupakan barang yang paling penting dan paling sulit. Sepintas lalu mungkin tampak bertentangan dengan praanggapan ke-2, yang melindungi pluralitas agama. Tetapi sesungguhnya tidak bertentangan. Kemutlakan yang disingkirkan dalam praanggapan ke-2 adalah secara kemutlakan yang memaksakan pengalaman mengenai komitmen keagamaan diri sendiri pada orang lain sebagai kebenaran Dinilai. Sebaliknya,

istilah *mutlak* dalam praangapan ke-3 digunakan hanya untuk melukiskan hakikat *perasaan* mengenai komitmen terhadap yang transenden melalui suatu pengalaman pribadi partikular mengenai agama. Itu adalah suatu pengakuan bahwa komitmen keagamaan yang mendalam perlu dirasakan sebagai yang mutlak, dan sebagaimana diketahui, berfungsi sebagai kriteria yang mengabsahkan seluruh pengalaman pribadi seseorang. Akan tetapi, ini tidak berarti memaksakannya pada orang lain atau mengesampingkan pengakuan bahwa dalam orang lain ada suatu komitmen mutlak yang serupa terhadap pengalaman partikular, yang sebagaimana dinyatakan dalam praangapan ke-2, berbeda dari pengalaman partikular diri sendiri.

Jadi, seseorang mampu menghormati komitmennya sendiri sebagai mutlak untuk dirinya sendiri dan sekaligus menghargai komitmen mutlak yang berbeda dari orang lain. Dengan cara ini keterbatasan-keterbatasan yang dijelaskan di atas dihargai, namun kebutuhan akan komitmen keagamaan yang mutlak terhadap suatu agama partikular diakui. Dalam sebuah dialog, hal ini berarti perbedaan-perbedaan dilestarikan secara layak dan dalam suasana saling menghargai.

Praangapan ke-5 melukiskan sifat penghargaan timbal balik sebagai satu toleransi kritis dan keharusan moral. Karena perbedaan kita dijamin, maka kita terdorong untuk melancarkan kritik membangun dan dengan demikian belajar satu dari yang lain. Kritik yang kita lancarkan hendaknya bersifat membangun, toleran, dan dilandasi oleh keharuman moral terhadap orang lain. Dalam suasana seperti itu pluralisme merupakan peluang untuk penilaian diri dan perkembangan rohani. Dikatakan bahwa seluruh kegiatan penyusunan teologi harus, dapat ditangkap oleh teologi lain.

Praangapan ke-6 menyatakan bahwa perkembangan rohani timbul bukan karena mengasingkan diri atau sikap eksklusif melainkan lebih dalam konteks pluralisme keagamaan. Penelitian yang dilakukan terhadap setiap agama memperlihatkan bahwa dalam seluruh contoh, masa-masa kreatif adalah masa-

masa yang ditandai oleh tantangan pluralisme. Praangapan itu diperkuat oleh pengalaman orang-orang yang sekarang secara serius terlibat dalam dialog, yakni bahwa hasilnya memperkaya dan memperdalam pengalaman keagamaan mereka sendiri. Untuk dialog pada masa yang akan datang perlu diselidiki apakah pendalaman rohani tersebut dapat mencapai suatu pengertian mengenai pengalaman bersama.

Agar dapat dilaksanakan dialog masa depan seperti itu setiap peserta harus memperoleh informasi yang tepat mengenai agama dari peserta yang lain. Memenuhi persyaratan ini begitu sulit, sehingga merupakan hambatan terbesar bagi keberhasilan dialog antar agama. Dewasa ini banyak orang yang buta terhadap agamanya sendiri, apalagi terhadap agama orang lain. Disiplin akademis studi-studi keagamaan memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. Pengetahuan intelektual mengenai fakta-fakta agama dibutuhkan, namun itu saja tidak memadai. Kita tidak akan mampu memperoleh pengertian mengenai realitas transenden yang diusahakan penyampaiannya oleh masing-masing agama, jikalau yang dicapai hanyalah pengetahuan intelektual. Empati dan pemahaman sejati menuntut penguasaan bahasa orang lain, karena disitulah terletak nuansa-nuansa penting pengalaman transenden. Syarat yang berat, karena membutuhkan pengabdian dan upaya dari semua orang yang akan ambil bagian dalam dialog untuk menjaga masa depan yang lebih harmoni.

G. Membangun Inklusivisme

Akhir-akhir ini, menurut Zuly Qodri⁹, kehidupan sering dikagetkan dengan banyak peristiwa di luar prediksi pemikiran manusia. Banyak kejadian yang ditelusuri lebih jauh dan mendalam merupakan simbol-simbol dari apa yang selama ini telah kita lakukan dalam bermasyarakat. Sebagai masyarakat yang beragama (*religious society*) sering diguncang dengan banyaknya peristiwa

⁹M. Quraish Shihab, dkk. *Atas Nama Agama*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), h. 285.

yang sentimental, rasial, *collective violence*, dengan upaya-upaya seperti mengail di air keruh sehingga tampak bermuatan keagamaan. Semuanya itu berubah menjadi peristiwa yang sarat dengan sentimen-sentimen keagamaan sehingga tak jarang membuyarkan harapan bahwa agama adalah pembawa damai dan keselamatan bersama. Agama menjadi semacam ancaman yang bisa dengan tiba-tiba datang memberangus kehidupan bersama.¹⁰

Perilaku umat beragama tampak tak bersesuaian dengan anjuran kitab suci agama. Suasana paradoks sering mengiringi kehidupan umat. Lebih-lebih bagi mereka yang merasa dengan melakukan pelanggaran atau penghalangan terhadap sesama pemeluk agama adalah sebuah investasi pahala. Perbuatan menghalangi atau melarang adalah jihad yang didorong oleh justifikasi agama. Suasana semacam ini akhirnya membawa dampak pada keterbelakangan kehidupan agama. Perasaan sentimental pada umat beragama yang telah mengental tidak berdiri sendirian: ia mendapat legitimasi kekuasaan yang merupakan justifikasi terkuat karena disahkan untuk memaksakan sebuah kebijakan sehingga pada ujung-ujungnya anatara umat beragama pun bisa saling membunuh atas nama agama. Sumber legitimasi tersebut barangkali memang perlu mendapatkan perhatian serius, sehingga tidak mendorong agama-agama untuk memanfaatkan momen-momen tertentu yang dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menelikung saudara sebangsa dan setanah air.

Kekuatan legitimasi dari wacana agama menjadi semakin kuat dominasinya dalam sebuah negara yang memang dengan senganja memanfaatkan agama sebagai sumber justifikasi atas apa yang hendak difatwakan, walaupun salah satu atau sebagian dari anggota masyarakat itu dirugikan atau banyak orang keberatan karena itu diluar pemikiran manusia. Tetapi, karena merasa mendapat angin dari pihak agama (dogma-dogma agama) dan sekaligus dukungan sebuah rezim politik tertentu, maka kebijakan tersebut

¹⁰M. Qurish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 45.

tetap difatwakan secara tegas. Tragis memang, dan mendistorsi wacana agama, tetapi itu sering menjadi realitas yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Wacana agama dikerangkeng dalam sangkar besi yang teramat kuat sehingga tidak terjangkau masyarakat awam dan menjadi sangat eksklusif serta mencekam setiap orang yang beragama namun tidak memiliki akses politik kekuasaan, atau hanya sedikit akses politik karena telah segala pintu dan wilayah sehingga tidak bisa memasuki, karena dijaga oleh tradisi politik keagamaan yang dominan.

Dalam konteks seperti di atas, sudah saatnya bagaimana agama bisa dihadirkan kembali sebagai wacana yang tidak menakutkan, tetapi penuh kedamaian dan kasih sayang. Penganut agama-agama agaknya perlu berpikir ulang secara bersama mengenai semangat inklusivisme. Pemegang otoritas dominan atas tafsir teks kitab suci agama barangkali perlu dikonstruksi kembali, sehingga tidak membelenggu wacana agama itu sendiri yang memang dengan seperangkat ajarannya telah mengajarkan supaya umatnya hidup damai, harmonis dan selalu dalam keterbukaan. Inilah beberapa pemikiran awal untuk menuju dialog dan menghilangkan sekat-sekat eksklusivisme dan menjalin hubungan antar agama.

REFERENSI

- A.Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1992.
- Ahmad Norma Permata, (ed.). *Metodologi Studi Agama*, Yogyakarta, 2000.
- Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Bingkai Teologi*, Proyek Kerukunan Umat Beragama, 1979.
- Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, Kanisius, Jakarta, 1989.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Jakarta, 1983.
- M.Quraish Shihab, dkk. *Atas Nama Agama*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1998.
- M.Qurish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Mizan, 1996
- Raimundo Panikar, *Dialog Intra Religius*, Kanisius, Jakarta.1994.
- Zakiah Daradjat, dkk. *Perbandingan Agama-2*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Agama dan Masyarakat Multikultural

(Husna Amin & Khairil Fazal)



A. Latar Belakang

Agama merupakan fenomena universal manusia. Selama ini belum pernah ada laporan penelitian dan kajian yang menyatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konsep tentang agama, termasuk Indonesia yang multikultural. Meskipun perubahan sosial telah mengubah orientasi dan makna agama, namun hal itu sampai pada meniadakan eksistensi agama. Sehingga kajian tentang agama selalu akan terus berkembang dan tetap menjadi sebuah kajian penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena sifat universalitas agama dalam masyarakat, maka kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai salah satu faktornya.

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini agama memiliki posisi dan peranan yang sangat penting. Agama dapat berfungsi sebagai faktor motivasi (pendorong untuk bertindak yang benar, baik, etis, dan maslahat), profetik (menjadi risalah yang menunjukkan arah kehidupan), kritik (menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar), kreatif (mengarahkan amal atau tindakan yang menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain), intergratif (menyatukan elemen-elemen yang rusak dalam diri manusia dan masyarakat untuk menjadi lebih baik), sublimatif (memberikan proses penyucian diri dalam kehidupan), dan liberatif (membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan). Agama sebagai suatu bentuk kepercayaan, diyakini manusia sebagai sistem nilai yang harus diejawantahkan ke dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman historis manusia, baik sebagai individu maupun kelompok.¹

¹Ali Imran, *Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat*, dalam *Jurnal Hikmah*, Vol. II, No. 1 (Januari-Juni 2015), h. 2.

Dalam perspektif teori struktural fungsional, agama dipandang sebagai sumber tata nilai yang menjadi sandaran manusia dan masyarakat dalam berperilaku pada kehidupan bermasyarakat. Sementara itu dalam perpektif antropologis-sosiologis, agama juga ditengarai sebagai produk manusia dan masyarakat sebagaimana budaya. Bahkan agama dalam pandangan antropologis dianggap sebagai bagian dari budaya. Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai macam suku, ras, etnik, agama serta budaya. Kekuatan yang majemuk tersebut tentunya dapat menjadi sebuah kekuatan sosial dan sebuah kumpulan yang indah apabila antara satu dengan yang lainnya dapat saling bahu-membahu, saling bekerjasama untuk dapat membangun negara.

Namun dilain pihak, kemajemukan tersebut akan menjadi sebuah kekuatan penghancur dari dalam apabila keragaman yang ada tidak dibina dan dikelola secara tepat. Keragaman kultur dan agama yang menjadi latar belakang dan menjadi suatu mozaik yang indah bagi negeri ini, yang sudah ada semenjak negara ini dilahirkan dapat memicu konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara Indonesia. Masalah tersebut semakin mengkristal ketika dikaitkan dengan fenomena meletusnya berbagai kerusuhan bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam beberapa tahun terakhir semenjak 1996.²

B. Pengertian Multikultural

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan

²Abdullah Idi, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 119.

kemanusiannya.³ Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁴

Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Istilah “multibudaya” (multiculture) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan

Amerika khususnya di New York dan California.⁵ Will Kymlicka berpendapat, multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya.⁶ Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang

³Parsudi Suparlan, “*Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*,” Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h. 1.

⁴Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam, dalam *ADDIN*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 133.

⁵James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984), h. 164.

⁶Will, Kymlicka, “*Misunderstanding Nationalism*” dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), h. 24.

tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Interaksi tersebut berakibat pada terjadinya perbedaan pemahaman tentang multikulturalisme. Lebih jauh, perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku dalam menghadapi kondisi multikultural masyarakat. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan hidup masyarakatnya.⁷

Dari karakteristik ini, dapat dikembangkan pemahaman mengenai multikulturalisme yaitu sebagai sebuah paham tentang kultur yang beragam. Dalam situasi keragaman kultur ini meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, penghargaan, penghormatan, kerjasama dan lainnya agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik dan kekerasan.⁸ Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis dan agama. Konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik dan budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai dengan kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Adapun masyarakat multikultur adalah masyarakat yang mampu menekankan dirinya sebagai arbitrer yaitu sebagai penengah bagi proses rekonsiliasi ketika proses dialektika tersebut menemui titik jenuh. Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan

⁷Rustam Ibrahim, Pendidikan..., h. 135.

⁸Ngainun Naim dan Ahmad Syaqui, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 125.

konsep dan praktek, oleh Parekh dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya. *Kedua*, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlihat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.⁹

C. Eksistensi Kelompok Agama

Pada masa lalu, agama dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Agama menjadi hal yang begitu penting dan sangat dijunjung tinggi oleh setiap penganutnya. Peran ulama pada kehidupan sosial salah satunya melakukan ceramah rohani secara rutin, ceramah tersebut biasanya dilakukan di ruang-ruang publik seperti masjid dan diberbagai acara keagamaan. Hampir semua persoalan sosial pada saat itu yang dialami masyarakat biasanya akan diceritakan

⁹Suharno, *Membangun Kebangsaan Multikultural: Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2016).

kepada tokoh agama untuk dimintai pendapat. Para ulama menjadi konsultan dari persoalan sosial hingga problem keluarga.

Modernisasi kemudian menggeser peran itu. Persoalan sosial tersebut kini sudah terfragmentasi kedalam lembaga-lembaga khusus sesuai dengan keahlian dari pengelolaan lembaga tersebut. Jadi, dalam batas-batas tertentu modernisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan memang telah menggeser posisi agama. Dakwah virtual merupakan salah satu proses menyebarkan informasi dan pengetahuan yang tersedia bagi berbagai kalangan yang ditujukan oleh penggunanya. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 bahwa proses berbagi dapat terbentuk melalui proses sosial pada kultur dalam individu maupun organisasi yang menghargai aktivitas penyebaran pengetahuan.

Proses tersebut dapat berlangsung secara tradisional melalui diskusi dan kolokium, maupun melalui medium modern dengan berbasiskan teknologi. Aktivitas dakwah virtual di era digital yang syarat akan bauran teknologi ini dapat disebut sebagai *knowledge sharing*. Yanlin Zheng (2010) menambahkan, *knowledge sharing endows knowledge with wider and deeper social values. Practically, effective knowledge sharing relies on effective communication*. Artinya, pembagian pengetahuan membantu memberikan nilai sosial yang luas dan dalam pada pengetahuan. dalam prakteknya, efektifitas pembagian pengetahuan mengandalkan pada efektifitas komunikasi. Dari keseluruhan hasil reduksi data yang telah di paparkan di atas, maka dapat sejalan dengan pendapat Yanlin Zheng dkk (2010), bahwa media sosial memiliki tiga keuntungan dalam mendukung proses berbagi pengetahuan.

Pertama, konten yang dikirimkan melalui media sosial memiliki isyarat sosial (*social cues*), sehingga memberikan peluang lebih banyak bagi pengguna dalam melakukan pembagian pengetahuan (*knowledge sharing*). Isyarat sosial pengetahuan dapat memberikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana cara menemukan rekan kerja atau seorang ahli untuk mengembangkan

hubungan sosial berkelanjutan dalam pembagian pengetahuan. Memiliki jaringan pertemanan (*network*) secara online melalui media sosial dapat memberikan peluang bagi pengguna dalam memperoleh dan membagikan berbagai macam pengetahuan dari atau kepada orang lain. *Kedua*, media sosial menjanjikan harapan pengguna dalam meningkatkan motivasi pembagian pengetahuan. Jika terdapat dua arah komunikasi yang saling percaya, mereka dapat membagikan pengetahuan lebih baik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat pengguna media sosial menginginkan “pengikut” (*followers*) yang banyak, dia akan lebih aktif mempublikasikan konten dan memfasilitasi pertukaran informasi.

Ketiga, hubungan sosial sangat diperlukan untuk keberhasilan pembagian pengetahuan, artinya bahwa hubungan sosial dilakukan dengan waktu yang tepat dan keadaan yang memadai, media sosial dapat menjamin efisiensi hubungan sosial tersebut. Media sosial dapat menjamin terjadinya hubungan sosial selama 24 jam penuh. Dengan media sosial, pengguna media sosial dapat melakukan hubungan sosial dimanapun dan kapanpun untuk melakukan pembagian pengetahuan dengan pengguna lain.¹⁰

D. Agama Sebagai Komoditas

Agama dapat pula dilihat sebagai potensi transformasi, karena berbagai nilai yang diperjuangkan, sekaligus dapat difungsikan untuk menopang terwujudnya aspirasi bernegara. Ia juga merupakan tali pengikat yang dominan dalam interaksi antar manusia, sehingga mampu berperan menumbuhkan rasa solidaritas kebangsaan. Agama dapat berperan sebagai penyatu dan pengutuh berbagai perbedaan pendapat yang timbul dalam masyarakat. karena itu, agama juga mampu mengkondisikan dan memberikan kontribusi yang mempertinggi

¹⁰L. Rudy Rustandi, Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital, dalam *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 28-29.

moralitas bangsa dan negara yang menginginkan keadilan, sehingga terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur.¹¹

Oleh karena itu, umat beragama berkewajiban untuk memberi sumbangan dalam rangka tanggungjawab bersama untuk meletakkan landasan moral, etik dan spiritual serta tetap memperhatikan dan menghormati nilai-nilai tradisional maupun nilai-nilai religious yang menjadi penghayatan bersama dalam memperkokoh pembangunan masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga komoditi politik yang mudah dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan non-agama, atau seolah-olah merupakan kepentingan agama. Fenomena yang banyak terlihat dari Agama Islam sebagai pemeluk mayoritas aktualisasi politik memiliki peranan penting dalam membingkai kohesi nasional. Digunakannya Islam sebagai identifikasi komunitas muslim secara sosiologis, adalah suatu kewajiban. Yang menjadi persoalan, kompetisi untuk menggalang solidaritas kelompok.

Terlebih-lebih lagi penggalangan solidaritas ternyata dilakukan dalam lingkup varian-varian kelompok muslim, bukannya dalam entitas muslim Indonesia secara keseluruhan. Akibatnya, persaingan antar kelompok muslim memperumit peta konflik primordial yang sudah ada. Masyarakat selalu menyeret primordialisme kearah yang disintegrative. Bagaimana hal ini diupayakan. Kita perlu mengingat bahwa keperluan untuk memobilisasi primordialisme (termasuk agama) adalah karena didorong oleh keperluan untuk melawan atau menguasai negara.¹² Pada saat Indonesia dalam lilitan krisis di tahun 1950-an mobilisasi primordialisme dan ikatan keagamaan tersebut diperkuat dengan militansi dan kekuatan senjata dan menjadikan perlawanan terhadap negara semakin kentara dalam bentuk yang lebih halus terlihat dalam politik Islam yang ingin

¹¹Mawardi, dkk, *Manajemen Lembaga Keagamaan*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019), h. 63-64.

¹²Mawardi, dkk, *Manajemen...*, h. 64.

menjadikan negara sebagai instrumen pemaksa aktualisasi syariah agenda yang dikedepankan adalah menkonversi Indonesia menjadi Negara Islam.

Potensi agama sebagai bargaining power untuk menyudutkan negara dibentengi dengan legitimasi pertentangan agama dan nasionalisme. Fondasi dari proses delegitimasi ini adalah temuan kesadaran yang diadvokasi intelektual muslim bahwa Islam memiliki watak inklusif, dan fungsi agama yang utama bukanlah untuk pijakan inklusivisme diri. Membaca trend keberagamaan di Indonesia dewasa ini, terlihat sekali bahwa spirit agama belum menjadi common denominator (*kalimatun sama'*) dalam merancang etika kebangsaan dan kenegaraan. Yang terjadi agama justru dijadikan komoditas kepentingan (politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya), sehingga pesan agama dalam membangun persaudaraan dan perdamaian seringkali tersendat, terlantar, bahkan tergadaikan.¹³

Sejarah mencatat bahwa sidang konstutuan tahun 1950-an gagal mencapai kesepakatan dikarenakan elite politik menjadikan agama sebagai komoditas kepentingan, sehingga rumusan agenda kebangsaan gagal terwujud. Berbeda dengan yang dilakukan para Wali Songo. Agama ditangan para wali justru tampil sebagai spirit dalam melakukan kerja-kerja kebangsaan. Spirit agama tampil digarda depan untuk membuka kran-kran penindasan dan penjajahan. Sejarah telah banyak membuktikan dan menjelaskan kepada kita, bahwasanya agama menjadi motor penggerak handal dalam upaya melawan dominasi negara. Kita bisa mengambil cerita bagaimana Kahar Muzakar, Daud Bareureuh, Kartosuwiryo mampu mengemas agama sebagai perekat untuk melawan negara.

Kekuatan dalam perlawanan terletak pada dogma- dogma yang tercipta bahwasanya agama lebih utama ketimbang negara. Bisa juga kita melihat fenomena kerusuhan dimana aparat keamanan-pun tidak serta merta

¹³Mawardi, dkk, *Manajemen...*, h. 65.

mengayomi namun dilain sisi membantu umat seagamanya. Hal ini karena kekuatan agama mampu masuk hingga sel terkecil dari struktur budaya maupun struktur berpikir manusia Indonesia. Agama memiliki tanda yang dipahami bersama oleh setiap pemeluknya namun demikian mudahnya ketika seseorang memahami kondisi tersebut dan mampu mengambil manfaat atas simbol yang selayaknya sakral.

Terlepas dari suka atau tidak, kepatuhan dan kepatutan kita terhadap ajaran- ajaran agama terkadang membuat sebagian dari kita lebih memilih untuk bertindak dari sebuah kebiasaan atau tradisi yang berlawanan, maka dengan demikian terbukalah agama yang kemudian dijadikan komoditas untuk pencapaian tujuan. Layar televisi selalu mengiklankan halal dan haram, iklan halal diartukulasikan dengan perempuan berjilbab maupun tampilan dengan atribut agama. Perbuatan baik hanya dengan simbol orang-orang kalah namun dibalik semua itu ada peluang hegemoni untuk mengajak pada pemirsa maupun masyarakat luas bahwasanya halal yang kami tawarkan adalah kesesuaian dengan citra yang ada dalam kepala tiap manusia. Padahal kita ditarik pada masifikasi yang sebenarnya hanya berbalut simbol-simbol agama. Muslimah yang ditampilkan dengan produk apapun selalu dianggap baik karena pencitraan dengan simbol-simbol agama jauh lebih mumpuni untuk menarik peminat ketimbang menjelaskan fungsi dan dampak dari produk tersebut.¹⁴

E. Peran Agama dalam Masyarakat Multikultural

Secara horizontal, struktur masyarakat Indonesia oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan- perbedaan vertikal, antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan

¹⁴Mawardi, dkk, *Manajemen...*, h. 66-67.

agama, adat istiadat dan kedaerahan sering kali disebut sebagai masyarakat majemuk, plural societies demikian tentu saja merupakan modal sosial dan sekaligus juga potensial pada terjadinya konflik sosial yang bukan saja dapat mengganggu keserasian sosial tetapi lebih dari itu akan mengakibatkan disintegrasi sosial yang lebih luas.

Menurut Garna, berbicara tentang masyarakat majemuk, paling tidak terkait dengan dua konsep, yaitu: *Pertama*, keragaman etnik adalah suatu keadaan yang mampu memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok masyarakat yang tergabung atau disatukan, rasa menyatu melalui dasar kesetiaan, pemilihan nilai bersama dan pembagian kekuasaan. *Kedua*, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras dan etnik yang berbeda di bawah satu sistem pemerintahan dan paksaan.

Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi sehingga agama bisa memiliki banyak versi khususnya dalam aspek implementasi. Mulai dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dari masyarakat multikultural inilah lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Peranan menjadi sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat.

Pada perkembangan yang demikian itulah agama menjadi berkaitan langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat sehingga agama dan masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh. Dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku social tertentu. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu perilaku yang diperankan oleh individu ataupun kelompok itu akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial

digerakkan oleh kekuatan dari dalam, yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang telah menginternalisasi.

Peter L. Berger melukiskan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap kekacauan yang mengancam manusia. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang tidak diketahuinya.¹⁵ Kondisi masyarakat yang multikultural juga pernah terjadi dalam sejarah Islam. Pada masa kejayaan Islam seperti di Baghdad dan Kordoba, masyarakat di kota-kota tersebut adalah sangat plural. Dengan segala kemampuannya untuk mengakomodir kondisi sosial yang multikultural ini, Islam akhirnya tetap bisa eksis dan jaya. Sejarah mencatat bahwa sikap toleransi dan inklusivitas merupakan kunci dalam masyarakat multikultural.

Sikap toleran telah ditunjukkan oleh para penguasa Muslim ketika mereka menaklukkan beberapa wilayah seperti Mesir, Syiria dan Persia. Ilmu pengetahuan yang sudah berkembang dengan pesat di wilayah-wilayah itu justru sepenuhnya didukung oleh Islam untuk terus dikembangkan. Tidak hanya itu, komunitas-komunitas agama lain seperti Kristen, Yahudi dan bahkan Zoroaster juga diperbolehkan menjalankan agama masing-masing dengan bebas. Sikap inklusif atau terbuka juga bisa dilihat pada para sastrawan dan filsuf Muslim pada masa keemasan Islam. Selain menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber yang paling otoritatif, mereka juga menggunakan sumber-sumber dari kebudayaan lain.

Sampai batas tertentu, respons agama terhadap kecenderungan multikulturalisme memang masih terkesan ambigu. Hal itu disebabkan, agama kerap dipahami sebagai wilayah sakral, metafisik, abadi, samawi dan mutlak.

¹⁵Rizal Mubit, Eran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia, dalam *Epistémé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, h. 175-176

Bahkan, pada saat agama terlibat dengan urusan ‘duniawi’ sekalipun, hal ini tetap demi penunaian kewajiban untuk kepentingan ‘samawi.’ Berbagai agama, tentu saja, berbeda-beda dalam perkara cara dan berbagai aspeknya, namun agama-agama tersebut hampir seluruhnya memiliki sifat-sifat demikian itu. Karena sakral dan mutlak maka sulit bagi agama-agama tersebut untuk mentoleransi atau hidup berdampingan dengan tradisi kultural yang dianggap bersifat duniawi dan relativistik.

Oleh karena itu, persentuhan agama dan budaya lebih banyak memunculkan persoalan daripada manfaat. Apalagi, misalnya dalam konteks Islam, kemudian dikembangkan konsep bid’ah yang sama sekali tidak memberikan ruang akomodasi bagi penyerapan budaya non-agama.¹⁶ Sebenarnya, cita-cita agung multikulturalisme tidak bertentangan dengan agama; namun demikian basis teoritisnya tetap problematik. Nilai-nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius yang ditolak oleh para teolog Muslim sehingga sulit untuk mengeksplorasi tema tersebut. Memang belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Namun, gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif.

Padahal Tuhan dalam kitab-Nya jauh-jauh hari sudah menyeru tentang multikulturalisme. “Wahai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari diri yang satu, laki-laki dan perempuan dan Kami telah menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian dapat saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antaramu di mata Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mengetahui” (49:13). Perlu dicatat bahwa ayat ini tidak hanya ditujukan bagi Muslim atau golongan secara eksklusif, tetapi ia diawali dengan seruan yang inklusif, “wahai

¹⁶Rizal Mubit, Eran..., H. 177.

manusia.” Inilah seruan yang mencakup semuanya. Seruan ini mengingatkan manusia bahwa mereka adalah satu keluarga besar, dengan moyang yang sama, meskipun mereka hidup dalam keluarga yang berbeda-beda.

Ini adalah peringatan bahwa perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan adalah mungkin. Manusia layaknya seikat kembang, masing-masing bunga memancarkan keindahannya, sementara kombinasi dari semua bunga yang berwarna-warni itu akan memancarkan pemandangan yang lebih indah. Pernyataan dalam al-Qur’an yang meyakinkan tentang luasnya persaudaraan manusia ini adalah dasar yang sangat kokoh bagi kedamaian untuk semuanya.¹⁷ Dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. *Pertama*, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif.

Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi built-in dalam masyarakat-masyarakat beragama. Di sisi lain, kerancuan atau pemaknaan sepotong-potong atas doktrin keagamaan juga berdampak pada timbulnya sikap pengagungan terhadap kitab suci atau sering disebut skripturalisme. Menurut Ulil Abshar Abdalla, skripturalisme bisa disebut juga dengan “bibliolatry” atau secara terminologi berarti “pengagungan” kitab suci apa pun secara berlebihan sehingga menyerupai penyembahan.

Hal itu disebabkan oleh wawasan teologis yang bersifat “ultra-teosentris”. Artinya, wawasan yang menganggap bahwa Tuhan berbicara langsung kepada manusia via Nabi; bahwa Sabda Tuhan, adalah superior terhadap manusia; bahwa Sabda Tuhan, sejauh tidak ada alasan-alasan yang

¹⁷Jamal A. Badawi, “*Hubungan Antaragama: Sebuah Perspektif Islami*”, dalam Franz Magnis Suseno, et.al., *Memahami Hubungan Antaragama*, terj. Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eISAQ Press, 2007), h. 151.

kuat dan kokoh, harus dimengerti dalam pengertiannya yang harfiah. Akhirnya teks ditempatkan pada kedudukan yang sentral dan supreme, sementara pengalaman manusia yang riil dan kontekstual diletakkan inferior, rendah, sekunder atau bahkan tak berarti sama sekali. *Kedua*, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern.

Kita tak mungkin menghindar dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini. Hanya dengan transformasi internal dan interaksi dengan gagasan-gagasan modern, agama akan mampu melakukan reformulasi sintesis kreatif terhadap tuntutan multikulturalisme yang telah menjadi semangat zaman. Bukankah agama mengalami kejumudan saat berhenti belajar dan berdialog dengan peradaban lain? Sekarang saatnya untuk merevitalisasi persenyawaan agama dengan berbagai realitas yang mengitarinya.¹⁸

Peran agama dalam keadaan masyarakat yang majemuk adalah salah satunya sebagai perekat sosial. Sebuah teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life*. Dengan unsur solidaritas agama memiliki fungsi sosial. Agama bukan ilusi, melainkan merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial. Karena itu agama sebenarnya tidak berisi kepercayaan terhadap roh-roh atau dewa, akan tetapi lebih pada pemisahan antara yang sakral dan yang profan. Dalam perspektif solidaritas sosial, agama berperan menjembatani ketegangan, menjaga kelangsungan masyarakat ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan.

¹⁸Ulil Abshar Abdalla, *Menolak Tunduk pada Teks dalam Memahami Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), h. 43.

Dalam hal ini, agama berperan penting menyatukan anggota masyarakat melalui deskripsi simbolik suci mengenai kedudukan mereka dalam sejarah, kosmos dan tujuan mereka dalam keteraturan segala sesuatu. Agama sangat baik sekali dalam hal pembinaan masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Salah satu alasan mengapa demikian adalah *pertama*, agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. Agama memoles umatnya untuk menjadi individu-individu yang baik dan menjauhkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agamanya. *Kedua*, agama mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat nanti sebagai tujuan akhir kehidupan.

Cara-cara ini berintikan pada pelaksanaan ajaran agama masing-masing dengan sungguh-sungguh. Orang yang melaksanakan dengan baik akan memperoleh tempat yang bernama surga, sedangkan orang yang tidak melaksanakannya akan memperoleh tempat yang berkebalikan dengan surga, yaitu neraka.¹⁹ *Ketiga*, agama yang berfokus pada ajaran cinta kasih mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya sehingga antarsesama dapat saling menghargai dan saling tolong-menolong melalui institusi masing-masing yang biasanya diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. *Keempat*, secara tidak langsung agama mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajaran tersebut.

Hal ini sejalan dengan seruan-Nya dalam al-Qur'an yang berbunyi, "Jika Allah menghendaki, Ia bisa menjadikan semua manusia sebagai satu bangsa (5:48; 11:118). Selain itu, seruan untuk hidup bersama secara damai dan universal sebagaimana dalam dua ayat (60: 8-9) misalnya, adalah bukti autentik bahwa keragaman merupakan keniscayaan dan nash Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya ayat-ayat tersebut menjadikan Muslim wajib bersikap toleran dan

¹⁹Rizal Mubit, Eran..., h. 180.

penuh damai sebagai sesama makhluk yang hidup di dunia berdasarkan kesetaraan (qisth) dan kebaikan utama (birr).

Namun demikian agama juga dapat menimbulkan efek yang negatif dalam hal bermasyarakat, terutama pada masyarakat yang majemuk. *Pertama*, agama memiliki dan mengajarkan hal-hal yang bersifat eksklusif dan berbeda untuk agama yang berbeda pula. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan terhadap masalah-masalah tertentu yang dapat bergesekan. *Kedua*, agama memiliki ambisi berupa misi untuk menyebarkan ajarannya seluas-luasnya.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, namun demikian pada masyarakat yang telah beragama seolah-olah timbul pandangan yang menyatakan terjadinya perebutan umat atas agama tertentu. *Ketiga*, dalam internal agama itu sendiri terkadang terjadi suatu perbedaan pandangan ataupun tafsir terhadap ajarannya sehingga muncul aliran-aliran baru dalam agama tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang haus akan berita kebenaran. Perbedaan cara pandang juga dapat menimbulkan kaum ekstremis pada agama tersebut yang mengakibatkan fanatisme sempit dan pengucian diri terhadap pandangan lain. *Keempat*, agama memiliki potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Ketiga hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat menimbulkan konflik internal maupun eksternal yang akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri.²⁰

²⁰Rizal Mubit, Eran..., h. 181-182.

REFERENSI

- Abdullah Idi, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Ali Imran, *Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat, dalam Jurnal Hikmah*, Vol. II, No. 1 (Januari-Juni 2015).
- Jamal A. Badawi, “*Hubungan Antaragama: Sebuah Perspektif Islam*”, dalam Franz Magnis Suseno, et.al., *Memahami Hubungan Antaragama*, terj. Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007).
- James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984).
- L. Rudy Rustandi, Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital, dalam *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 1, (2020).
- Mawardi, dkk, *Manajemen Lembaga Keagamaan*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019).
- Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Parsudi Suparlan, “*Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*,” Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Rizal Mubit, Eran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia, dalam *Epistemé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam, dalam *ADDIN*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013.
- Suharno, *Membangun Kebangsaan Multikultural: Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2016).
- Ulil Abshar Abdalla, *Menolak Tunduk pada Teks dalam Memahami Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007).
- Will, Kymlicka, “*Mitsunderstanding Nationalism*” dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999).

AGAMA SEBAGAI INSTITUSI (LEMBAGA) SOSIAL

(Nofal Liata & Nurjannah)



A. Latar Belakang

Agama merupakan salah satu hidayah yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia dalam rangka menjalankan fungsi dan statusnya di alam ini. Sebagai hidayah, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling vital, di samping kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau fisik mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maka rohani membutuhkan kebutuhan berupa agama. Agama merupakan salah satu fitrah/potensi yang dibawah oleh manusia sejak lahir, yang dikenal dengan fitrah/potensi beragama atau fitrah imaniyah. Dengan fitrah imaniyah yang dimiliki oleh manusia, menyebabkan manusia selalu cenderung untuk mencari dan berhubungan dengan Tuhannya, yang terkandung dalam sifat hanif yang dibawanya sejak lahir.¹

Agama merupakan fenomena universal yang selalu melekat pada diri manusia, karenanya kajian tentang agama selalu akan terus berkembang dan tetap menjadi sebuah kajian penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitiann tentang agama telah banyak dilakukan oleh para ahli, baik para teolog, psikolog, antropolog maupun sosiolog. Seiring dengan perkembangan kajian agama, telah banyak definisi agama yang dikedepankan para teoritisi agama namun di antara mereka tidak ada kesepakatan. Keragaman definisi agama tergantung dari sudut mana para teoritisi memandang agama. Teolog melihat agama sebagai seperangkat aturan sedangkan antropolog dan sosiolog melihat agama sebagai ekspresi manusia dalam merespon terhadap permasalahan kehidupan yang melingkupi yang menarik adalah bahwa mereka

¹Sulaiman Saat, Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial, Dalam *Journal UIN Alauddin*. Volume V, Nomor 2, Juli-Desember 2016, h. 263

sepakat bahwa agama pada memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.² Perbincangan tentang agama atau keyakinan dan masyarakat memang tidak akan pernah selesai, seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Baik secara teologis, sosiologis maupun antropologis, agama dapat dipandang sebagai instrumet untuk memahami dunia. Dalam konteks itu, hampir-hampir tidak ada kesulitan bagi agama untuk menerima premis tersebut.

Sementara itu dalam pandangan teori struktural fungsional, masyarakat dipahami sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain.⁵ Indonesia merupakan negara yang penduduknya heterogen dan bersifat multidimensional. Pluralitas dalam budaya, terutama oleh perbedaan suku, agama bahasa merupakan karakteristik yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemajemukan itu antara lain disebabkan oleh perbedaan suku, status sosial, pengelompokan organisasi politik dan agama.³

Menurut pengamatan Koentjoroningrat, Pemerintah Indonesia membagi suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi tiga golongan yaitu: 1) suku bangsa yang mempunyai daerah asal dalam wilayah Indonesia 2) golongan keturunan asing yang tidak mempunyai wilayah asal dalam wilayah Indonesia karena daerah asal mereka terletak di luar negeri dan 3) masyarakat terasing, yaitu kelompok masyarakat yang dianggap sebagai penduduk yang hidup dalam tahap kebudayaan sederhana yang biasanya tinggal di lingkungan terisolasi. Dari sisi agama, Indonesia mengakui lima agama besar di dunia, di samping masih banyak terdapat agama suku.⁴

²Shonhaji, Agama Sebagai Perikat Social Pada Masyarakat Multikultural, Dalam Jurnal Al-AdYaN. Vol VII, N0. 2 Juli-Desember 2012, h. 1.

³George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 5, h. 21.

⁴Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 12-19.

B. Agama dalam Berbagai Perspektif

Agama termasuk suatu struktur institusional sosial yang penting bagi masyarakat dan turut mewarnai sistem sosial lainnya di dalam kehidupan manusia. Keberagaman seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku masyarakat, yang bersumber pada emosi keagamaan., maka ditemuilah berbagai persepsi masyarakat terhadap agama. Kemudian setiap masyarakat mempunyai pola dan tingkah laku keagamaan yang berbeda Agama sebagai struktur sosial dalam masyarakat memiliki beberapa aspek keagamaan manusia, yaitu:

1. Aspek Kepercayaan Keagamaan

Kepercayaan keagamaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi penganutnya, karena kepercayaan keagamaan memiliki aspek kognitif atau intelektualitas untuk dapat memahami dan menyakini kepercayaannya, disebabkan agama membentuk cara pandang seseorang tentang dunia, Persepektif itu akan mempengaruhi cara pandang individu sekaligus akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Bernard Raho menulis bahwa Dalam masyarakat modern, ada semacam kecenderungan bahwa orang mempraktekan iman semata-mata sebagai suatu pendapat atau cara pandang yang bertentangan dengan pengetahuan yang didasarkan pada fakta empiris.⁵

Sebenarnya kepercayaan agama bukanlah sesuatu yang abstrak, dan mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Namun, orang sering menggunakan kepercayaan-kepercayaannya itu di dalam melakukan pilihan-pilihan dalam hidup, menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang luar biasa, dan merencanakan tindakan-tindakan tertentu melalui pengetahuan mitologi. Kepercayaan dalam beragama mengambil bentuk kegiatan-kegiatan intelektualitas dalam dua macam Sebagaimana dijelaskan Thomas F. O'dea

⁵Bernard Raho, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Obor, Cet. I, 2003), h. 13.

bahwa; Kita dapat membagi pengungkapan intelektual dari agama kedalam dua bagian utama, yakni mitos dan rasional.⁶

Pertama, mitos adalah bentuk ungkapan intelektual yang primordial dari berbagai sikap dan kepercayaan keagamaan. Mitos berhubungan erat dengan perasaan dalam diri seorang individu. Ernst Cassirer, sarjana dan pengikut simbolisme menyatakan bahwa Mitos berasal dari emosi dan latar belakang emosionalnya mengilhami semua hasilnya dengan warnanya yang khusus. Manusia primitif bukan kurang memiliki kesanggupan untuk memahami berbagai perbedaan empiris dari sesuatu. Tetapi dalam konsepsinya tentang alam dan kehidupan semua perbedaan ini dihilangkan oleh perasaan yang lebih kuat.⁷ Mitos juga merupakan jenis pernyataan manusia yang kompleks, merupakan pernyataan yang dramatis, bukan hanya sebagai pernyataan yang rasional.

Kedua, dalam pengalaman manusia, disamping itu mitos berkenaan dengan cara-cara pemahaman bentuk pemikiran dan metode penjelasan lainnya. Dihubungkan dengan kontak kebudayaan antara berbagai di masyarakat ke dalam strata dengan gaya dan pengalaman yang berbeda. Para sarjana dan intelektual mengkatogorikan perkembangan ini kedalam beberapa tahap . August Comte berbicara tentang "Hukum Tiga Tahap" yang terdiri dari, tahap keagamaan, tahap metafisik (atau teological), tahap positivisme. Selanjutnya, Comte mengartikan tahapan keagamaan (tahap teological) sebagai periode pandangan dan pemahaman mistis; tahap metafisik, merupakan periode dimana yang digunakan untuk mengorganisasi dunia pengalaman bukannya kategori rasional subjektif, tetapi kategori dan konsep yang abstrak; sedangkan tahap positif merupakan periode dimana dikembangkan model pemahaman ilmiah

⁶Thomas F'dea, *The Sociologi Of Religion*, Terj. Tim.YASOGAMA, Yogyakarta: Rajawali Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Cet. I, 1985, h. 79

⁷Thomas F'dea, *The Sociologi...*, h. 80.

dan pembentukan konsep modern.⁸ Demikianlah langkah-langkah yang dilalui pemikir dalam membicarakan kepercayaan keagamaan.

2. Aspek Ritus-Ritus Keagamaan

Dalam agama, upacara ritual keagamaan biasa dikenal dengan istilah ibadat, kebaktian, berdoa, atau sembahyang. Justru itu setiap agama mengajarkan berbagai macam bentuk kegiatankegiatan ibadat kepada penganutnya, sesuai dengan momenmomen pelaksanaannya.. Bagi Durkheim, upacara-upacara ritual dan ibadah adalah untuk meningkatkan solidaritas, untuk menghilangkan perhatian kepada kepentingan pribadi. Selanjutnya Durkheim menciutkan makna yang terkandung dalam upacara keagamaan kepada keutuhan masyarakat atau solidaritas sosial.⁹ Kepercayaan-kepercayaan dan ritus-ritus merupakan simbolsymbol yang mempersatukan kelompok sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kesatuan dan solidaritas kelompok-kelompok dalam suatu agama.

Ritus-ritus keagamaan merupakan salah satu bentuk ungkapan kepercayaan keagamaan. Dengan melaksanakan ritusritus keagamaan, berarti kelompok-kelompok keagamaan memperbarui kembali komitmen, rasa persatuan, mmemperkuat kepercayaan di antara mereka, disamping itu anggota kelompok semakin mengindentifikasi diri dengan anggota-anggota kelompok dan tujuan-tujuan kelompok tersebut. Bernard menegaskan bahwa sebuah tindakan keagamaan disebut sebagai ritus keagamaan bukan hanya karena isi, tindakan, dan waktuwaktu ritus itu, melainkan karena arti atau makna yang diberikan oleh kelompok keagamaan bersangkutan.¹⁰

Kondisi ritus seperti ini dicontohkan bahwa berpuasa pada bulan Ramadhan bagi orang Islam akan memberikan sifat sabar, tenang dan

⁸Thomas F'dea, *The Sociologi...*, h. 82.

⁹Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 102.

¹⁰Shonhaji, dalam *Jurnal Al-AdYaN*. Vol VII, N0. 2 Juli-Desember 2012, h. 99

sebagainya, karena didasarkan pada keyakinan bahwa puasa itu adalah perintah Allah. Dan akan berbeda arti dan maksud puasa yang dilakukan sehari-hari, tanpa ada rasa kepercayaan keagamaan, niscaya perbuatannya itu tidak mempengaruhi kehidupannya, karena puasa itu tidak didasarkan pada kepercayaan keagamaan. Ritus-ritus keagamaan yang benar-benar diungkapkan di dalam kepercayaan memiliki kekuatan yang dahsyatnya dirasakan oleh pemeluknya. Kalimat-kalimat dalam upacara keagamaan dapat membangkitkan rasa hormat, kagum pada diri pemeluknya. Salah satu pentingnya ritus adalah memperkuat keyakinan terhadap adanya dunia yang gaib dan memberikan cara-cara pengungkapan emosi keagamaan secara simbolik.

3. Aspek Simbol-Simbol Keagamaan

Simbol merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan beragama, karena berkaitan erat dengan yang suci, namun ritus-ritus itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya simbol-simbol. Secara sederhana simbol berarti segala sesuatu yang mengandung arti tertentu yang dikenal dan difahami oleh anggota-anggota suatu kelompok masyarakat. Simbol itu tidak ada artinya pada seseorang bila artinya tidak diberikan oleh masyarakat pendukungnya, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa kepercayaan keagamaan itu merupakan struktur sosial dalam masyarakat. Inti emosi keagamaan tidak dapat diekspresikan, bila tidak ada simbol-simbol tertentu, maka untuk itu para ahli berupaya untuk membuat perkiraan-perkiraan yang bersifat simbolik untuk dapat difahami para anggotanya.

Simbol-simbol diartikan lambang-lambang yang dapat mengekspresikan jiwa individu yang dapat bersatu dengan Tuhannya. Elizabeth menjelaskan bahwa, ... Lambang-lambang tersebut sepanjang sejarah dan juga sampai sekarang merupakan pendorong-pendorong yang paling kuat bagi timbulnya perasaan manusiawi. Karena itu tidak sukar untuk difahami bahwa dimilikinya lambang bersama merupakan cara yang sangat efektif untuk mempe-

persatuan di antara pemeluk (agama) di dunia ini.¹¹ Suatu simbol keagamaan akan memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan dalam suatu kelompok.

Bernard menulis bahwa Simbol-simbol keagamaan itu membangkitkan perasaan keterikatan dan kesatuan pada anggota-anggota pemeluk agama yang sama. Memiliki simbol-simbol yang sama merupakan cara yang efektif untuk semakin memperkuat rasa persatuan di dalam kelompok pemeluk.¹² Dengan demikian, simbol-simbol yang terdapat dalam agama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan beragama bagi penganutnya, karena simbol-simbol itu menghubungkan individu untuk mengekspresikan dan relasinya dengan yang bersifat transcendent.

4. Aspek Pengalaman Keagamaan

Pada dasarnya pengalaman keagamaan itu bersifat pribadi dan subjektif, dan ahli psikologi agama mengatakan pengalaman agama (religious experience) adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang membawa seseorang kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (amaliah).¹³ Ketika berhubungan dengan yang suci para pemeluk suatu agama berusaha untuk mengungkapkan pengalaman keagamaan itu melalui doa, meditasi, beribadah, menari dan bernyanyi. Pengalaman-pengalaman keagamaan bersifat pribadi, tetap mempunyai elemen-elemen sosial bagi masyarakat, kemudian dari sisi inilah lahir istilah teologi sosial dan tasawuf sosial, karena elemen-elemen tersebut mempengaruhi seorang dalam menginterpretasikan pengalaman personal.

Pengalaman keagamaan yang dialami oleh seseorang akan berbeda dengan pengalaman keagamaan yang dilakukan oleh orang lain sesuai dengan kepercayaan keagamaannya. Bernard menulis bahwa; isi dari pengalaman religius

¹¹Elizabeth K, Nottingam, *Religion And Society*, ter, Abdul Muis Naharong, Cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 17.

¹²Bernard Raho, *Agama...*, h. 15.

¹³Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiva Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, XIII, 1991), h. 4.

itu berbeda-beda. Di dalamnya bisa terdapat pengalaman-pengalaman yang menggembarakan seperti damai, harmonis, sukacita, dan rasa aman. Namun, dipihak lain pengalaman-pengalaman keagamaan itu bisa menghasilkan teror, ketakutan, dan kecemasan. Sementara itu, isi dan pengalaman keagamaan itu sangat tergantung pada kepercayaan para pemeluk tentang apa yang dihadapinya.¹⁴

Setiap pengalaman keagamaan yang dialami oleh individu mempunyai hubungan dengan kekuasaan atau kekuatan yang suci itu, sehingga menimbulkan interpretasi-interpretasi. Bila individu mengalami perasaan aman tenteram dalam hidupnya, menandakan individu merasa dilindungi oleh yang suci itu, Sebaliknya, bila individu merasa ketakutan, resah, gelisah dan sebagainya dalam hidup berarti individu mendapat hukuman oleh kekuatan yang suci itu, dan fenomena-fenomena ini yang sering melanda masyarakat agama Masyarakat modern umumnya tidak mengakui kebenaran pengalaman-pengalaman mistik (agama) mereka mementingkan pada pemikiran rasional dan objektif empiris. Karena pengalaman-pengalaman keagamaan itu adalah sesuatu yang sangat bersifat subjektif yang sulit diuji kebenarannya dengan menggunakan pendekatan-ilmiah. Dan bukan pula tugas seseorang sosiologi agama untuk menilai benar atau salah pengalaman keagamaan seseorang.

5. Aspek Masyarakat Agama

Masyarakat agama merupakan bentuk kehidupan individu yang saling berinteraksi, bergaul cukup lama dan menganut kepercayaan atau agama sebagai dasar hidup dan kehidupannya serta membentuk suatu kebudayaan Aspek masyarakat agama sangat erat hubungannya dengan aspek simbol-simbol keagamaan, karena simbol-simbol keagamaan itu membangkitkan perasaan keterikatan dan kesatuan para anggota-anggota pemeluk agama yang sama.

¹⁴Bernard Raho, *Agama...*, h. 16.

memiliki simbol-simbol yang sama sebagai cara yang efektif untuk semakin memperkuat rasa persatuan di dalam kelompok pemeluk agama bersangkutan. Kepercayaan-kepercayaan dan pengalaman keagamaan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat agama bersangkutan, mengakibatkan timbulnya komunitas-komunitas agama dalam masyarakat, menurut Elizabeth bahwa hal ini terjadi apabila keanggotaan kelompok-kelompok semacam itu sebagian besar berasal dari kelas atau suku minoritas dalam masyarakat yang lebih luas.

Dalam kondisi ini keyakinan-keyakinan dan pengalaman-pengalaman keagamaan tersebut melaksanakan tugas rangkap; pertama sebagai pusat "kebersamaan" bagi kelompokkelompok yang tersingkirkan atau diterlantarkan dalam tatanan sosial yang semakin menghilangkan kepribadian, dan kedua, sebagai batas-batas orientasi yang mungkin bagi kecenderungan yang memecah belah, disamping itu agama tidak hanya menjamin stabilitas sosial, tetapi kadang-kadang juga mendukung konservasime dalam masyarakat. Masyarakat atau komunitas suatu agama bisa terorganisasi atau terlembaga secara formal dan informal. Organisasi keagamaan yang berbentuk formal bisa ditemukan di dalam masyarakat dengan membentuk organisasi keagamaan, misalnya organisasi keagamaan Islam, Keristen, Katolik, Budha, dan organiasi keagamaan Hindu. Dengan adanya kelompok atau penganut agama terbentuklah masyarakat agama dan melalui masyarakat itu aspek kepercayaan, aspek ritus-ritus keagamaan, simbol-simbol keagamaan, pengalaman keagamaan dan masyarakat keagamaan dapat dilestarikan dalam masyarakat.

C. Agama Sebagai Fakta Sosial

Agama merupakan fakta sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas suatu masyarakat. Agama akan selalu hadir di manapun manusia berada dan tingkat peradaban apapun yang dicapai oleh manusia. Agama selalu ada dalam kehidupan manusia, karena hanya manusialah yang membutuhkan agama.

Demikian pula sebaliknya, agama hanya diturunkan kepada makhluk yang bernama manusia. Dalam Islam, agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul selalu ditujukan pada umat tertentu, kecuali Nabi Muhammad saw., yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena hanya manusia yang mampu memahami dan membutuhkan agama. Agama merupakan fakta yang selalu muncul dalam masyarakat, pada semua tingkatan kebudayaannya. Quraish Shihab (1992) mengatakan bahwa manusia membutuhkan agama dalam mengatur lalulintas kehidupannya. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dan sikap egoismenya menyebabkan manusia tidak dapat mengatur lalu lintas kehidupannya. Dengan demikian, manusia membutuhkan aturan-aturan berupa nilai-nilai yang tidak dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Peraturan-peraturan itulah yang kemudian disebut agama.¹⁵

Pandangan Marx bahwa agama adalah candu masyarakat dan Sigmund Freud yang mengatakan bahwa agama adalah illusi dan angan-angan, sebenarnya bukanlah bentuk penolakan terhadap eksistensi agama, melainkan hanya sebagai penolakan terhadap fungsi agama. Hal ini tidak menunjukkan penolakan terhadap agama sebagai sesuatu yang ada (fakta), melainkan sesuatu yang tidak salamanya fungsional. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa sesuatu itu bisa bertahan karena ia fungsional, maka paham ini tidak dapat diterima. Hal ini dapat dijawab bahwa ternyata agama sampai saat ini tetap ada, yang berarti bahwa agama tetap fungsional, dan karena fungsionalnya, maka agama itu tidak pernah hilang di muka bumi, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa agama itu akan hilang dari suatu masyarakat (bangsa).

¹⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, cet. II, (Jakarta: Miza, 1992), h. 111.

Kahmad (2000) berkesimpulan bahwa, agama merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Agama merupakan semesta simbolik yang memberikan makna pada kehidupan dan memberikan penjelasan yang paling komprehensif tentang seluruh realitas. Agama merupakan naungan sakral yang melindungi manusia dari situasi kekacauan (chaos).¹⁶ Durkheim dengan teori bertahan hidup (*survival theory*) dalam Crapps (1995) mengatakan bahwa agama bertahan hidup dan tumbuh berkembang karena fungsional, yaitu memenuhi tuntutan kehidupan pribadi yang penting. Jika agama, apapun bentuknya, oleh siapapun dianut, entah dialami oleh orang yang masih primitif, atau orang yang sudah berkebudayaan maju, membuka bagi mereka dimenasi hidup yang paling fundamental dan kemungkinan perkembangan pribadinya dan mengintegrasikan itu semua secara kreatif dan selaras ke dalam dunia pribadinya.

Agama memberi penganutnya kesadaran yang nyaman. Penganut yang telah berkomunikasi dengan Tuahnya, adalah orang yang lebih kuat, merasa dirinya memiliki lebih banyak tenaga, bahkan untuk menjalani percobaan hidup atau menaklukkan tantangan hidup. Penganut aliran fungsional dalam D. Henropuspito (1993) mengemukakan bahwa agama merupakan suatu bentuk kebudayaan yang istimewa yang pengaruhnya meresapi tingkah laku penganutnya, baik lahiriah maupun batiniah, sehingga sistem sosialnya untuk sebagian terdiri atas kaedah-kaedah agama. Agama merupakan salah satu lembaga sosial yang memegang kunci penting untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.¹⁷ Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Penolakan terhadap agama sebenarnya bukan penolakan terhadap eksistensi agama, melainkan penolakan terhadap fungsi agama. Hal ini

¹⁶Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Cet. I, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 120.

¹⁷D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Cet. Kesembilan, (Jakarta: Kanisius, 1993), h. 28.

disebabkan karena kebingungan melihat fakta-fakta sosial yang terjadi, misalnya agama yang seharusnya menjadi perekat sosial, justru menjadi penyebab lahirnya konflik sosial di masyarakat. Agama yang seharusnya menjadi sumber motivasi bagi penganutnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan menjadi tempat pelarian (kompensasi) atas ketidakmampuan menghadapi cobaan hidup, lalu mengatakan bahwa itulah takdir. Diakui, bahwa agama membawa ajaran takdir, tetapi agama meletakkan takdir di akhir usaha manusia, bukan sebagai tempat pelarian dari ketidakmampuan dan kemalasan. Rasulullah saw. melarang untuk berlindung di balik takdir untuk suatu pekerjaan yang jelek. Misalnya, seseorang dipenjara karena mencuri, lalu mengatakan bahwa ini sudah takdir. Itu artinya menempatkan takdir (agama) sebagai tempat pelarian dari suatu perbuatan yang tidak dikendaki oleh agama seperti malas.¹⁸

Kenyataan seperti ini kerap kali dipahami sebagai tidak fungsionalnya agama. Eksistensi agama sama sekali tidak pernah diingkari oleh siapapun, yang digugat adalah fungsionalisasi agama. Demikian halnya dengan pandangan bahwa agama adalah illusi dan angan-angan, hanya merupakan reaksi terhadap pengamalan agama yang salah. Sering agama di salahkan ketika manusia menghadapi kesulitan hidup, bahkan agama dijadikan sebagai penyebab dari kesulitan itu, lalu seseorang berangan-angan keluar dari kesulitan hidup dengan berserah diri kepada Tuhan tanpa berusaha untuk keluar dari kesulitan hidup melalui aktifitas dan ikhtiar yang konkrit. Dengan demikian, berdasarkan fakta, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Jadi agama adalah fakta sosial yang eksistensinya tidak bisa diingkari. Bahkan agama merupakan sesuatu yang dilembagakan dalam masyarakat.¹⁹

¹⁸Sulaiman Saat, *Agama...*, h. 266.

¹⁹Sulaiman Saat, *Agama...*, h. 266.

D. Agama dan Eksistensi Sosial Manusia

Sampai pada konteks persoalan tentang legitimasi inilah, Berger merumuskan ide sentralnya tentang universum-simbolik. Ide ini dirumuskan oleh Berger berkaitan dengan suatu asumsinya tentang arti penting legitimasi bagi dunia sosial atas individu-manusia yang menghuni di dalamnya. Artinya, manusia berada dalam kondisi yang selalu dihadapkan dengan proses marjinalisasi situasi-situasi kehidupan, yakni keluar dari batas-batas tatanan yang telah ditentukan, sangatlah memerlukan legitimasi atas tatanan sosial objektifnya yang di diaminya. Legitimasi di sini menyangkut “prosedur” yang mampu membangun struktur kemasukalan (*plausibility structure*) dunia sosial objektif di hadapan individu-individu yang mendiaminya, sehingga mampu memberikan padanya kelangsungan yang terus-menerus.

Begitu pentingnya prosedur seperti ini karena dunia sosial itu sendiri merupakan kenyataan historis, yang sampai pada generasi baru sebagai tradisi, sementara bentang historis manusia-individual lebih pendek dibandingkan dengan bentang historis dunia sosial dengan berbagai tingkat keluasan unit yang berbeda. Sehingga demikian, Ia merupakan prosedur untuk tetap “berorientasi realitas (tetap berada dalam realitas yang didefinisikan secara resmi) dan “kembali ke realitas (kembali dari situasi marjinal ke nomos yang ditetapkan).²⁰ Prosedur ini dijalankan untuk memberikan kesahihan kognitif kepada tatanan yang sudah diobjektifkan.²¹ Sampai pada level bahasan di atas, ada berbagai bentuk dan tingkatan legitimasi, dari yang paling sederhana sampai yang paling lengkap, yang diperlukan oleh suatu tatanan sosial.

Di antara berbagai bentuk dan tingkatan legitimasi tersebut, adalah legitimasi dalam bentuk “universum-simbolik” yang terbukti sepanjang sejarah sangat penting dalam sejarah masyarakat manusia. Dianggap sangat penting

²⁰Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Element of a Sociological Theory of Religion*, (New York: Anchor Books, 1969), h. 24.

²¹Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the sociology of Knowledge*, (New York: Anchor Books, 1967), h. 93.

karena luasnya kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai bidang makna dan tatanan kelembagaan untuk diabsahkan secara kognitif dalam suatu totalitas simbolis. Atas dasar kemampuan dari bentuk legitimasi inilah, ia mampu menentukan batas-batas kenyataan sosial,²² sehingga secara lebih jauh mampu bertindak sebagai pedoman kognitif sosial individu dalam masyarakat. Sementara di antara sekian banyak instrumen legitimasi tingkat univesum simbolik itu sendiri adalah agama.

Hal ini karena agama, secara historis, mampu menciptakan naungan berupa tata lambang demi keterpaduan masyarakat. Tata lambang ini memuat berbagai makna, nilai, dan kepercayaan dalam suatu masyarakat yang “disatupadukan” dalam penefsiran atas realitas. Ia menghubungkan hidup manusia dengan kosmos sebagai keseluruhan.²³ Kemampuan tersebut didasarkan atas kemampuan dari agama dalam mentransendir dan menintegrasikan manusia atas berbagai “batas-batas” realitas yang melingkupi wilayah eksistensi hidupnya sehari-hari. Dengan kemampuan inilah, agama bisa menjadi dasar dari proyeksi manusia dalam mengatasi keberhinggaaan eksistensialnya (*to transcend the finitude of individual existence*).

Keberhinggaaan eksistensial di sini dalah “situasi batas” yang merupakan apa yang disebut oleh Schutz sebagai “daerah-daerah makna yang terbatas” (*the finite provinces of meaning*).²⁴ Dalam situasi ini, terjadi semacam diskontinuitas hubungan manusia dengan asumsi asumsi dasar yang melandarsi tatanan masyarakat yang dihuninya. Pada situasi inilah, manusia sering diganggu penerimaannya yang begitu saja terhadap karakteristik kenyataan hidup sehari-hari sebagai “yang tertib dan tertata”. Problem ini muncul sangat penting dalam bangunan pemikiran Berger tentang dunia sosial yang sifatnya konstruktif,

²²Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social...*, h. 137-146.

²³Peter L. Berger, *The Sacred...*, h. 21-22.

²⁴Alfred Schutz, *On Phenomenology and Social Relation, Edited and with Introduction by Helmut R. Wagner*, (Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1970), h. 253.

karena keberadaan manusia sangat ditentukan oleh batas-batas historis dan makna yang ia terima selama menjalani kehidupan sehari-hari.

Hal ini, tentunya, agar kehadiran dunia sosial bagi individu menjadi kewajaran yang semestinya.²⁵ Dengan kemampuan ini, konstruksi-konstruksi historis dari aktivitas manusia dengan sendirinya dapat dibimbing oleh agama untuk dilihat dari suatu titik yang tertinggi, yang mengatas-i (*transcend*) sejarah maupun manusia. Agama, melalui titik tertinggi tersebut, menempatkan semua pengalaman-pengalaman individu dan berbagai tatanan sosialnya dalam konteks suatu sejarah yang meng-atas-i mereka semua. Hal ini bisa dilakukan karena agama mampu memberikan realitas-realitas itu suatu status kognitif yang lebih tinggi, yang secara total mampu memberi dasar dalam meng-atas-i semua dimensi yang hanya manusiawi.²⁶ Oleh karena itu, jelaslah sampai pada konteks ini, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan fundamental dari legitimasi agama adalah transformasi produk manusia menjadi faktisitas supramanusiawi dan nonmanusiawi.

Sampai pada konteks bahasan tentang dimensi transendentalitas agama ini, tampak sekali persoalan yang sangat fundamental bagi setiap proses eksistensi sosial manusia, yakni kebutuhan akan transendensi itu sendiri. Kebutuhan akan transendensi ini tidak lain, sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan ungkapan atas “pengalaman batas” yang selalu melingkupi setiap proses eksistensi sosial manusia. Adapun transendensi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri tidak bisa bersifat total tanpa disandarkan pada “Yang Mutlak Lain” yang bersifat kudus sebagai tujuannya yang paling purna. Dalam hal inilah agama menjadi sangat penting karena suasana keagamaan mampu menciptakan situasi yang bersifat demikian.²⁷

²⁵Peter L. Berger, *The Sacred...*, h. 24.

²⁶Peter L. Berger, *The Sacred...*, h. 43-82.

²⁷Norman Geisler & Corduan Winfried, *Philosophy of Religion*, (Michigan: Grand Rafids, 1988), h.39.

Dalam konteks inilah, Van der Leeuw, menggambarkan fungsi sosial agama sebagai:

Perluasan kehidupan sampai batas-batas yang paling jauh. Manusia religius ingin suatu kehidupan yang lebih kaya, lebih dalam dan lebih luas; ia menginginkan kuasa untuk dirinya. Dengan kata lain, manusia ingin mencari di dalam dan pada kehidupan suatu keunggulan agar ia dapat menggunakan atau agar ia dapat memujanya”.²⁸

Asumsi ini ditekankan karena menyangkut apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang karakter kedirian manusia, yang dianggap masih selalu dalam proses “menjadi”. Manusia, singkatnya, merupakan makhluk yang “belum selesai”. Manusia, dalam hal ini, menerima kehidupan tidak begitu saja. Ia mencari kuasa untuk meningkatkan kehidupannya, untuk memberi makna yang lebih luas dalam dan pada kehidupannya. Pencarian manusia akan kuasa ini tidak hanya membawanya sampai ke batas, tetapi manusia juga tahu bahwa ia sampai ke daerah asing. Manusia sadar bahwa ada sesuatu yang me-nyambutnya, sesuatu “Yang Mutlak Lain”.²⁹ Dalam konteks kapasitas itulah, agama mampu memberikan apa yang disebut oleh Paul Tillich the universal ultimate concern. Agama dengan demikian sebagaimana Eliade ungkapkan juga merupakan solusi paradigmatik bagi setiap krisis eksistensial.

Hal ini mengingat agama dipercaya mampu membawa ke asal-usul yang transenden, sehingga memungkinkan manusia mentransendir situasi personal dan akhirnya memperoleh akses dengan dunia lain.³⁰ Apa yang telah menjadi asumsi tentang kapasitas transendensi agama di atas, sesungguhnya, tidaklah bisa dilepaskan dari pola struktur pengalaman agama itu sendiri. Artinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rodolf Otto dalam bukunya *The Idea of the Holy*, pengalaman agama itu memiliki kekhasan tersendiri dalam

²⁸Van deer Leeuw, *Religion in Essence and Manifestation*, (New York: Gloucester, 1967), h. 112.

²⁹Van deer Leeuw, *Religion...*,h. 150-160.

³⁰Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan*, (New York: Harper and Row Publ, 1957), h. 210-211.

keseluruhan pengalaman manusia karena merupakan pengalaman yang terjadi dalam “ruang bagian sebelah dalam” (*inner space*) manusia.

Dalam “ruang sebelah dalam” tersebut, ada suatu struktur a-priori terhadap sesuatu yang irasional. Struktur ini persis sebagaimana struktur a priori terhadap rasionalitas manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Kant dalam filsafat-nya mengenai akal-budi manusia. Struktur tersebut, menurut Otto, terletak dalam “perasaan hati”. Salah satu struktur a priori yang irasional yang merupakan perlengkapan jiwa manusia ini adalah “kesadaran beragama” (sensus religiusus). Jika setiap kesadaran itu sifatnya intensional, maka kesadaran beragama pun bersifat demikian. Artinya, manusia dalam kesadaran beragama keluar dari dirinya sendiri menuju “Yang Maha Lain” yang mampu menciptakan kekudusan.

Kesadaran beragama, dengan demikian, adalah kesadaran akan “Yang Kudus”. Ini artinya, kesadaran beragama adalah bentuk kepekaan kepada “Yang Kudus”. Kesadaran beragama inilah yang membuat manusia mengalami hal-hal yang sifatnya duniawi sebagai petunjuk dari hal-hal “Yang Ilahi”. Pengalaman inilah yang menyediakan bahan untuk “mengisi” gagasan “Allah”, yang menurut Kant semata-mata formal. Artinya, ia dirumuskan begitu saja, dan manusia melalui ini secara intuitif dan afektif mampu melihat misteri “Yang Ilahi” melalui penampakan simbol-simbol duniawi. Dari semua struktur pengalaman keagamaan tersebut, secara fenomenologis, cenderung menciptakan perasaan “ketergantungan yang total”. Itulah sebabnya Schleiermacher menggambarkan pengalaman agama sebagai “perasaan ketergantungan mutlak” (*feeling of absolute dependence*).

Perasaan ini muncul karena manusia terhadap “Yang Kudus” mengalami suatu perasaan misterium tremendum (menakutkan) dan misterium fascinatum (mempesona). Perasaan yang saling bertentangan itu timbul dari sifat-sifat objek perasaan-perasaan keagamaan manusia. Di satu pihak, objek perasaan itu dialami sebagai bersifat tak terhampiri, dahsyat, dan luar biasa.

Sesuai dengan sifat-sifat ini, manusia merasa dirinya sebagai “mahluk”, merasa dirinya sebagai ciptaan saja. Perasaan keterciptaan (*creature-consciousness*) ini merupakan pantulan subjektif dari sifat yang dimiliki oleh objek pengalaman beragama itu. Di pihak lain, Yang Ilahi dialami sebagai suatu misteri yang menentramkan hati manusia yang gelisah.³¹

Perasaan-perasaan inilah yang sesungguhnya memungkinkan agama menjadi prosedur bagi suatu transendensi dalam “pengalaman batas”. Agama, dengan kemampuan transendensi ini, pada akhirnya mampu memberikan basis legitimasi bagi eksistensi sosial manusia. Pasalnya, melalui transendensi ini, terjadi semacam transformasi produk-produk sosial yang sekedar manusiawi menjadi faktisitas supramanusiawi dan non-manusiawi. Muaranya adalah terbentuk dasar kognitif dan ontologis bagi kestabilan dunia sosial yang menjadi tempat tinggal manusia untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan demikian, berbagai bentuk kerawanan dari anomi dan chaos dapat dihindari sebagai fakta kestabilan dunia sosial dan proses eksistensi sosial manusia yang di dalamnya.

³¹Rodolf Otto, *The Idea of the Holy*, (England: Penguin Books, 1959), h. 19-24.

REFERENSI

- Alfred Schutz, *On Phenomenology and Social Relation, Edited and with Introduction by Helmut R. Wagner*, (Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1970).
- Bernard Raho, *Agama Dalam Perpektif Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Obor, Cet. I, 2003).
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Cet. Kesembilan, (Jakarta: Kanisius, 1993).
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Cet. I, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2000).
- Elizabeth K, Nottingam, *Religion And Society*, ter, Adbul Muis Naharong, Cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 5.
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1993).
- M. Qurash Shihab, *Membumikan Al-Quran*, cet. II, (Jakarta: Miza, 1992).
- Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan*, (New York: Harper and Row Publ, 1957).
- Norman Geisler & Corduan Winfried, *Philosophy of Religion*, (Michigan: Grand Rafids, 1988).
- Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the sociology of Knowledge*, (New York: Anchor Books, 1967).
- Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Element of a Sociological Theory of Religion*, (New York: Anchor Books, 1969).
- Rodolf Otto, *The Idea of the Holy*, (England: Penguin Books, 1959).
- Shonhaji , *Agama Sebagai Perekat Social Pada Masyarakat Multikultural*, Dalam Jurnal Al-AdYaN. Vol VII, N0. 2 Juli-Desember 2012.

- Sulaiman Saat, Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial, Dalam *Journal UIN Alauddin*. Volume V, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Thomas F'dea, *The Sociologi Of Religion*, Terj. Tim.YASOGAMA, Yogyakarta: Rajawali Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Cet. I, 1985.
- Van deer Leeuw, *Religion in Essence and Manifestation*, (New York: Gloucester, 1967).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, XIII, 1991).

Agama dan Organisasi Keagamaan

(Suraiya IT & Evi Yuliana)



A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbasis masyarakat majemuk yang antara lain ditandai oleh beragam suku, ras, dan juga agama. Keragaman ini menjadi unik oleh karena di dalam perbedaan-perbedaannya juga ada kemampuan menjalin komitmen serta kesadaran hidup bersama. Dengan demikian, keragaman bukan dilihat sebagai perbedaan (secara spasial), melainkan sebagai kekayaan secara kultural. Kesadaran masyarakat atas kemajemukan inilah yang dalam kehidupan masyarakat biasa dikenal dengan masyarakat berkesadaran plural. Satu ciri utama masyarakat berkesadaran plural adalah pengakuan atas keberbedaan, dan keberbedaan itu sesungguhnya sunatullah (kehendak Tuhan), merupakan sesuatu yang nyata dan tidak bisa dipungkiri. Sebaliknya, penolakan terhadap pluralisme justru akan menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata juga merupakan pengingkaran terhadap sunatullah tersebut.

Dalam sebuah agama memiliki organisasi keagamaan sebagai lembaga atau wadah tempat perkumpulan para tokoh agama ataupun pakar yang mengerti tentang agama itu sendiri. Organisasi keagamaan adalah organisasi yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi dan para pengikutnya. Dengan kata lain, organisasi keagamaan adalah organisasi yang memiliki nilai dasar perjuangan berlandaskan pada dogma atau ajaran suatu agama di dalam memperjuangkan terwujudnya tujuan organisasi yang tentunya organisasi keagamaan memiliki budaya organisasi yang juga berlandaskan pada ajaran agama. Dari pengalaman demikian lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang sangat terlembaga.

Di samping itu, terbentuknya berbagai organisasi ini memberikan akses terhadap kesadaran untuk memperjuangkan nasib sendiri melalui instrumen organisasi yang bersifat nasional. Misalnya organisasi keagamaan Islam yang merupakan kelompok organisasi terbesar baik dalam skala nasional maupun lokal, tidak kurang dari 40 buah organisasi keagamaan Islam yang berskala nasional memiliki cabang- cabang organisasinya di ibukota propinsi maupun ibukota kabupaten/kotamadya, seperti : Nahdlatul Ulama (NU), Sarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis DaKwah Islamiyah (MDI), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aisyiah, Muslimat NU, dan sebagainya. Sedangkan organisasi keagamaan Islam yang bersifat lokal pada umumnya bergerak di bidang daKwah dan pendidikan seperti: Majelis TaKlim, Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yatim Piatu, Lembaga-Lembaga DaKwah Lokal, dan sebagainya.

B. Pengertian Agama

Agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama (*religious*). Ensiklopedi Islam Indonesia menyebutkan, bahwa agama berasal dari kata Sansekerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Kata Agama, pada mulanya masuk ke Indonesia sebagai nama kitab suci golongan Hindu Syiwa (kitab suci mereka bernama Agama). Kata itu kemudian menjadi dikenal luas dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam penggunaannya sekarang, ia tidak mengacu kepada kitab suci tersebut tetapi dipahami sebagai nama jenis bagi keyakinan hidup tertentu yang dianut oleh

masyarakat, sebagaimana kata dharma (juga berasal dari bahasa Sansekerta). Atau dengan kata lain agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.

Secara Istilah, ada beberapa penyebutan lain terhadap agama, antara lain religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda) *religio/relegare* (Latin) dan *dien* (Arab). Kata *religion* (Bahasa Inggris) dan *religie* (Bahasa Belanda) adalah berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin “*religio*” dari akar kata “*relegare*” yang berarti mengikat. *Die religion* (Jerman) dipergunakan sebagai istilah umum yang mencakup minat-minat manusia tertentu di seluruh dunia.¹ Menurut Cicero, *relegare* berarti melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan, yakni jenis laku peribadatan yang dikerjakan berulang-ulang dan tetap. Lactancius mengartikan kata *relegare* sebagai mengikat menjadi satu dalam persatuan bersama.²

Sedangkan dalam Bahasa Arab, agama di kenal dengan kata *al-din* dan *al-milah*. Kata *al-din* sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti *al-mulk* (kerajaan), *al-khidmat* (pelayanan), *al-iẓẓ* (kejayaan), *al-dzull* (kehinaan), *al-ikrah* (pemaksaan), *al-ibsan* (kebajikan), *al-adat* (kebiasaan), *al-ibadat* (pengabdian), *al-qabr wa al-sulthan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-tadzalluhwa al-khudu* (tunduk dan patuh), *al-tha’at* (taat), al-Islam al-tauhid (penyerahan dan mengesakan Tuhan).³

Jika mengacu pada pendapat para ahli, akan kita dapatkan beragam pengertian tentang agama. Sebagaimana menurut Daradjat (2005) agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Ada juga Glock dan Stark yang

¹Depag RI, *Ilmu Perbandingan Agama, Proyek Pembinaan PT/LAIN*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1981), h.48.

²Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 28.

³Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

mendefinisikan agama sebagai sistem keyakinan, sistem simbol, sistem perilaku yang terlembaga, dan sistem nilai yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dipahami sebagai hal yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).⁴

Cliffort Geertz mengistilahkan agama sebagai (1) sebuah system simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis.⁵ Agama disebut Hadikusuma dalam Bustanuddin Agus sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.⁶

Terlepas dari pendapat-pendapat tentang definisi agama, bisa kita simpulkan bahwa agama merupakan suatu dogma yang mengajarkan sekaligus mengajak kepada umat atau pengikutnya untuk mepercayai adanya Tuhan semesta alam, serta adanya perintah dan larangannya dalam menjalankan kehidupan di dunia. Oleh karenanya, agama memiliki peran dalam menciptakan perdamaian atau sebagai pedoman setiap umat manusia untuk pengendalian diri ditengah masyarakat dan hidup dalam jalan yang baik dan teratur. Sehingga, masyarakat beragama pada umumnya memandang agama itu sebagai jalan hidup yang dipegang dan diwarisi turun-temurun oleh masyarakat, agar hidup mereka menjadi tertib, damai dan tidak kacau.

C. Pengertian Organisasi Keagamaan

⁴Zakiah Daradjat, *Ilmu Jima Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 10.

⁵Cliffort Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Jogyakarta: Kanisius, 1992), h. 5.

⁶Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 33.

Secara terminologi organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi dan agama.⁷ Organisasi keagamaan juga dipahami sebagai perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, serta berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu.

Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Konsep organisasi keagamaan yang dipakai adalah suatu pendekatan, kegiatan, atau sistem kehidupan yang irrasional. Organisasi keagamaan yang khusus mengurus upacara dan hubungan dengan tuhan dinamakan tarekat (jalan menuju kebenaran). Kelompok masyarakat yang religius atau agama secara teologis yang telah menjadi antropologis itu, mengembangkan segenap sistem budayanya dari ajaran tuhan atau wahyunya yang diungkap dalam kitab suci. Roland Robertson, membuat suatu model yang menggambarkan hubungan antara tingkat homogenitas dan heterogenitas agama yang dianut suatu masyarakat dikaitkan dengan organisasi keagamaan, ke dalam beberapa tipe:

1. Pada masyarakat yang memiliki heterogenitas dalam agama, yaitu agama secara organisasi terpisah dari kehidupan ekonomi, politik, dan pendidikan; dan agama yang tidak begitu terorganisir.
2. Pada masyarakat yang memiliki homogenitas agama, yaitu agama terorganisir dengan baik, dan agama diakui secara resmi sebagai agama Negara dan tidak terorganisir seperti pada masyarakat primitif.

Jika dilihat dari fungsi sosial agama, Bryan S Turner menyebutkan dua fungsi, pertama agama sebagai suatu bentuk ikatan yang menciptakan hubungan antara individu-individu yang mengalami pertentangan potensi, hal ini dipahami

⁷Idrus Ruslan, *Lembaga-Lembaga Keagamaan*, (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2014), h. 14.

bahwa agama dapat mempersatukan masyarakat dalam kewajiban sosial dan dengan ikatan sosial yang mempersatukan mereka. Fungsi kedua, agama dilihat sebagai suatu bentuk racun sosial yang memaksa konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Keberadaan organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat memang tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan organisasi keagamaan memang sudah menjadi sebuah keharusan ada dalam kehidupan masyarakat beragama sebagaimana fungsinya.⁸

D. Pola Keagamaan

Berdasarkan cara beragamanya, pola keagamaan masyarakat memiliki suatu perbedaan. Elizabeth K. Nottingham mengemukakan tiga model masyarakat. Masyarakat pertama, adalah tipe masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama yang sangat berpengaruh. Model kedua, merupakan kombinasi antara nilai religius dan sekuler. Sementara model ketiga, adalah tipe masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai sekuler. Ketiga model tersebut tidak menggambarkan tahapan perkembangan sejarahnya, meskipun banyak masyarakat telah atau sedang menjalani tahapan-tahapan yang seperti itu.

Model *pertama*, menggambarkan masyarakat kecil terpencil dan terbelakang. Tingkat perkembangan teknologinya rendah, hanya sedikit terdapat pembagian kerja dan pembagian kelas sosialnya sederhana. Keluarga merupakan lembaga terpenting. Spesialisasi organisasi pemerintahan dan kehidupan ekonomi sederhana, laju perubahan sosial lamban. Sistem intelektual kepercayaan dan mitos agak kompak dan relatif homogen, demikian pula agamanya. Orang-orang belum menggambarkan objek yang dipujanya sebagai sesuatu yang berbeda dengan dirinya.

Simbol agama yang sangat potensial adalah gambaran mitos nenek moyang dan pahlawan-pahlawan yang disimbolkan dalam berbagai bentuk.

⁸M. Rusli Karim, *Agama Modernisasi dan Sekulerisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,1994), h. 11.

Individu dan masyarakatnya dianggap lahir dari Tuhan alam. Sistem perilaku religiusnya biasanya langsung merupakan identifikasi antar kelompok pemuja dengan yang dipujanya, seperti tampak dalam pesta totem, dimana binatang totem dipotong, dimakan sebagai partisipasi mistik dan perilaku keagamaan. Organisasi keagamaan tidak terpisah dari keseluruhan kegiatan masyarakat lainnya, terjalin dalam aktivitas ekonomi, politik, keluarga, rekreasi dan sebagainya.

Agama dan magic penting dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi stress. Karena lembaga lain relatif belum berkembang, kecuali keluarga. Agama menyajikan sarana dalam pengintegrasian dan kesatuan masyarakat secara menyeluruh. Nilai-nilai keagamaan sering meningkatkan konservatisme dan menghambat perubahan. Hal ini merupakan alasan mengapa peranan tradisi sangat penting dalam masyarakat semacam ini. Selain itu, karena tidak adanya kepentingan yang kontradiktif dan menyatu-padunya agama dalam hampir semua aspek kehidupan sosial, memberi pengaruh kuat untuk menyatukan dan menstabilkan masyarakat. Bagi individu, agama banyak berpengaruh dalam keseluruhan proses sosialisasi. Sosialisasi ditandai oleh upacara-upacara keagamaan dalam peristiwa kelahiran, pubertas, perkawinan dan dalam fase-fase peralihan penting lainnya di dalam siklus kehidupan individu.

Organisasi kepribadian individu erat hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan yang langsung diwariskan oleh keluarga dan masyarakat kepada individu-individu yang sedang berkembang. Karena tidak adanya saingan variasi model kepribadian yang lain, yang berupa model sekuler, maka agama berperan tanpa tandingan sebagai pusat pemersatu dalam pengelolaan kepribadian individu dalam masyarakat tipe ini. *Kedua*, merupakan masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Masyarakat ini tidak begitu terpencil, perubahan lebih cepat dibanding dengan model pertama, daerahnya lebih luas, penduduknya lebih banyak, tingkat perkembangan teknologi lebih tinggi dibandingkan dengan

model pertama, pembagian kerja dan kelas sosial beraneka ragam serta tingkat kemampuan tulis-baca sudah memadai. Pertanian dan industri tangan penting dalam perekonomian desa dengan beberapa pusat perdagangan kota. Lembaga pemerintahan dan kehidupan ekonomi sedang menuju spesialisasi.

Fungsi agama di dalam masyarakat model kedua ini lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat model pertama. Agama masih memberikan makna penting kepada sistem nilai masyarakat, tetapi kadang-kadang mendorong ke arah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Pada masyarakat ini, meskipun suasana keagamaan dan sekuler terus bertumpang tindih pada aspek-aspek tertentu, tetapi pada sisi lain terus berkembang ke arah berbeda. Dalam masyarakat model kedua ini juga tidak bisa dihindarkan timbulnya perbenturan kepentingan antara organisasi keagamaan dengan organisasi politik. Karena organisasi keagamaan selain memiliki nilai acuan ukhrawi yang sifatnya transendental juga memiliki orientasi duniawi, termasuk bidang sosial, ekonomi, politik, sehingga memungkinkan terjadinya bentrokan kepentingan dan disintegrasi.

Ketiga, adalah masyarakat industri sekuler. Masyarakat ini sangat dinamik, pengaruh ilmu dan teknologi menembus berbagai bidang kehidupan, termasuk ke dalamnya bidang agama. Meluasnya sekularisasi sering mempersempit ruang gerak lingkungan sakral dan kepercayaan keagamaan. Akibatnya organisasi keagamaan terpecah-pecah dan lepas dari ikatan pemerintahan duniawi. Agama dan negara berjalan berdampingan secara terpisah. Pertumbuhan sekularisasi sangat melemahkan fungsi agama, baik sebagai pengintegrasi maupun sebagai sumber keresahan. Sebaliknya, tatanan ekonomi dan negara telah mengambil alih fungsi penting yang dulunya diperankan oleh agama, seperti pada masyarakat model pertama dan kedua. Karena adanya sikap ketidakacuhan terhadap sistem nilai sekuler yang semakin berkembang, menimbulkan toleransi terhadap perbedaan agama.

Namun, persamaan akidah dan ibadat di kalangan berbagai organisasi keagamaan, secara internal meningkatkan fungsi agama sebagai unsur pemersatu. Terutama jika kelompok itu merupakan kelompok minoritas. Meskipun pengaruh organisasi keagamaan melemah, namun nilai-nilai keagamaan yang mendasar dan universal tetap bertahan dan memberikan sumbangan terhadap keterpaduan masyarakat. Hal ini tampak pada saat-saat terjadinya ketegangan, dimana himbuan untuk kembali kepada nilai religius tradisional terus muncul. Misalnya, pada masa perang atau bahaya nasional, bencana alam dan lain sebagainya, pertolongan Tuhan dimohon secara hidmat bersama-sama. Demikian pula pada upacara-upacara penting, misalnya pelantikan presiden, pembukaan sidang juga sering disertai doa dengan harapan karunia Tuhan.

E. Tipologi Sikap Beragama

Komarudin Hidayat menyebutkan adanya lima tipologi sikap keberagamaan, yakni “*eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme*”. Kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas. Sekalipun ada perbedaan tipe-tipe teologis beragama dengan para penstudi agama lain, seperti Panikkar, yang menyebutkan tiga tipologi : eksklusif, inklusif, dan paralelisme, tetapi secara esensial penyebutan-penyebutan tipologis itu mengandung pada makna dan pengertian yang sama. Oleh karena itu, kita akan membahas tipologi-tipologi beragama sebagai berikut:

1. Eksklusivisme

Sikap eksklusivisme akan melahirkan pandangan ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama dan penganutnya terkutuk

dalam pandangan Tuhan.⁹ Sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman, dan terus dianut hingga dewasa ini. Tuntutan kebenaran yang dipeluknya mempunyai ikatan langsung dengan tuntutan eksklusivitas. Artinya, kalau suatu pernyataan dinyatakan, maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar.

Menurut Nurcholish Madjid, sikap yang eksklusif ini ketika melihat agama bukan agamanya, agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pemeluknya. Paradigma ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini : “Agama sendirilah yang paling benar, yang lain salah. Bagi agama Kristen, inti pandangan eksklusivisme adalah bahwa Yesus adalah satu-satu jalan yang sah untuk keselamatan. “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6). Juga, dalam ayat lain (Kisah Para Rasul 4,12) disebutkan, “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan”. Menurut Budhy Munawar Rachman, untuk contoh Islam, sekalipun tidak ada semacam kuasa gereja dalam agama Kristen, khususnya Katolik yang bisa memberi fatwa menyeluruh seperti contoh di atas, banyak penafsir sepanjang masa yang menyempitkan Islam pada pandangan-pandangan eksklusif.

2. Inklusivisme

Sikap inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman. Menurut Nurcholish Madjid, sikap inklusif adalah yang memandang bahwa agama-

⁹Muhtar Ghazali Adeng, *Agama dan Keberagamaan dalam Kontek Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 152., dalam Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 88-90.

agama lain adalah bentuk implisit agama kita. Paradigma itu membedakan antara kehadiran penyelamatan (*the salvific presence*) dan aktifitas Tuhan dalam tradisi-tradisi agama lain, dengan penyelamatan dan aktifitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Menjadi “inklusif” berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus.

Paradigma ini, membaca agama orang lain dengan kacamata sendiri. Sikap beragama inklusif pun bisa berarti memasukkan orang lain dalam kelompok kita. Pandangan yang paling ekspresif dari paradigma inklusif ini tampak pada dokumen Konsili Vatikan II, mempengaruhi seluruh komunitas Katolik sejak 1965. Dokumen yang berkaitan dengan pernyataan inklusif berkaitan dengan agama lain, ada pada “Deklarasi tentang Hubungan Gereja dan Agama-agama Non-Kristiani”. Teolog terkemuka yang menganut aliran ini adalah Karl Rahner, yang pandangan-pandangannya termuat dalam karya terbesarnya *the Theological Investigation* yang berjilid 20, dalam “Christianity and the Non-Christian Religions”, jilid 5, problem yang diberikannya adalah bagaimana terhadap orang-orang yang hidup sebelum karya penyelamatan itu hadir, atau orang-orang sesudahnya tetapi tidak pernah tersentuh oleh Injil? Di sini, Rahner memunculkan istilah inklusif, *the Anonymous Christian* (Kristen anonim), yaitu orang-orang non-Kristen. Menurut pandangannya, Kristen anonim juga akan selamat, sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah mendengar Kabar Baik.

Dalam contoh Islam juga sering dikemukakan misalnya istilah dari seorang filsuf Muslim abad XIV, Ibn Taymiyah, yang membedakan antara orang-orang dan agama Islam umum (yang non-Muslim *par excellence*), dan orang-orang dan agama Islam khusus (Muslim *par excellence*). Kata Islam sendiri di sini diartikan sebagai “sikap pasrah kepada Tuhan”. Mengutip Ibn Taymiyah, “semua nabi dan pengikut mereka seluruhnya disebut oleh Allah adalah orang-orang Muslim”. Hal itu sebagaimana dalam Alquran (S.3:85), “Barangsiapa yang

menganut suatu din selain al-Islam maka tidak akan diterima daripadanya al-din dan di akhirat ia termasuk yang merugi”. Dan firman-Nya, “sesungguhnya al-din di sisi Allah ialah al-Islam” (Q.S.3:19).

Dalam tafsiran penganut “Islam Inklusif”, bahwa sekalipun para nabi mengajarkan pandangan hidup yang disebut al-Islam, itu tidaklah berarti bahwa mereka dan kaumnya menyebut secara harfiah agama mereka al-Islam dan mereka sendiri sebagai orang-orang Muslim. Itu semua hanyalah peristilahan Arab. Para nabi dan rasul, dalam da’wah mereka pada dasarnya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Alquran (S.14:4) menegaskan, bahwa “Kami tidak mengutus seorang Rasul; kecuali dengan bahasa kaumnya”. Dengan demikian, kalangan Islam inklusif menganut suatu pandangan bahwa agama semua nabi adalah satu.

Sikap inklusivistik akan cenderung untuk menginterpretasikan kembali hal-hal dengan cara sedemikian, sehingga hal-hal itu tidak saja cocok tetapi juga dapat diterima. Sikap demikian akan membawa ke arah universalisme dari ciri eksistensial atau formal daripada isi esensialnya. Suatu kebenaran doktrinal hampir tidak dapat diterima sebagai yang universal jika ia sangat berkeras mempertahankan isinya yang spesifik, karena pencerapan isi selalu mengandaikan perlunya suatu ‘forma mentis’ yang khusus. Sikap menerima yang toleran akan adanya tataran-tataran yang berbeda, sebaliknya, akan lebih mudah dicapai. Sementara, suatu pola payung atau struktur formal dapat dengan mudah mencakup sistem-sistem pemikiran yang berbeda.

Tetapi, pada sisi lain, sikap inklusivitas pun membawa beberapa kesulitan. *Pertama*, ia juga menimbulkan bahaya kesombongan, karena hanya andalah yang mempunyai privilese atas penglihatan yang mencakup semua dan sikap toleran; andalah yang menentukan bagi yang lain tempat yang harus mereka ambil dalam alam semesta. *Kedua*, jika sikap ini menerima ekspresi ‘kebenaran agama’ yang beraneka ragam sehingga dapat merengkuh sistem-sistem pemikiran yang paling berlawanan pun, ia terpaksa membuat kebenaran

bersipat relatif murni. Kebenaran dalam arti ini tidak mungkin mempunyai isi intelektual yang independen, karena berbeda atau berlainan dengan orang lain.

3. Pluralisme Atau Paralelisme

Dalam pandangan Panikkar dan Budhy Munawar Rachman, masing-masing menyebutkan istilah pluralisme dan paralelisme. Sikap teologis paralelisme adalah bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya : “agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran¹⁰ yang Sama”; agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan Kebenaran-kebenaran yang sama sah”; atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”. Setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran. Paradigma itu percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri. Karena itu, klaim kristianitas bahwa ia adalah satu-satunya jalan (eksklusif), atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (inklusif), harus ditolak demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis.

Menurut Komarudin Hidayat, sikap pluralisme lebih moderat dari sikap inklusivisme, atau bahkan dari eksklusivisme. Ia berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar (paralel) sehingga semangat misionaris atas dakwah dianggap tidak relevan. Sikap paralelistis memberikan keuntungan yang sangat positif; toleran dan hormat terhadap yang lain serta tidak mengadili mereka. Sikap ini pun menghindari sinkretisme dan eklektisisme yang keruh yang membuat suatu agama mengikuti selera pribadi; sikap ini pun menjaga batas-batas tetap jelas dan merintis pembaharuan yang ajeg pada jalan- jalan orang itu sendiri. Namun demikian, sikap paralelisme ini pun tidak lepas dari kesulitan-kesulitan.

¹⁰Muhtar Ghazali Adeng..., h. 158.

Pertama, sikap ini tampaknya berlawanan dengan pengalaman historis bahwa tradisi-tradisi keagamaan dan manusiawi yang berbeda biasanya muncul dari saling campur tangan, pengaruh dan fertilisasi. *Kedua*, sikap ini dengan tergesa-gesa menganggap seolah-olah setiap tradisi manusia sudah memuat dalamdirinya sendiri semua unsur untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut; singkatnya, sikap ini mengandaikan kecukupan diri dari setiap tradisi dan seperti menyangkal adanya kebutuhan atau kesenangan untuk saling belajar. Di lingkungan Islam, tafsir Islam pluralis merupakan pengembangan secara lebih liberal dari Islam inklusif. Misalnya, perbedaan antara Islam dan Kristen (dan antaragama secara umum) diterima sebagai perbedaan dalam meletakkan prioritas antara “perumusan iman” dan “pengalaman iman”. Menurut para penganut Islam pluralis (misalnya Schuon dan Hossein Nasr), setiap agama pada dasarnya distruktur oleh dua hal: “perumusan iman” dan “pengalaman iman”.

Hanya saja, setiap agama selalu menanggapi yang satu mendahului yang kedua. Islam, misalnya, mendahulukan “perumusan iman” (tauhid) dan “pengalaman iman” mengikuti perumusan iman tersebut. Sebaliknya agama Kristen, mendahulukan “pengalaman iman” (dalam hal ini pengalaman akan Tuhan yang menjadi manusia pada diri Yesus Kristus, yang kemudian disimbolkan dalam sakramen misa dan ekaristi), dan “perumusan iman” mengikuti pengalaman ini, dengan rumusan dogmatis mengenai trinitas. Perbedaan dalam struktur perumusan dan pengalaman iman ini hanyalah ekspresi kedua agama ini dalam merumuskan dan mengalami Tuhan yang sama. Sekalipun demikian, sikap paralelistis, pada sisi yang lain, menjanjikan lebih banyak kemungkinan untuk suatu hipotesis kerja awal. Sikap ini sekaligus membawa amanat akan pengharapan dan kesabaran; pengharapan bahwa kita akan berjumpa pada akhirnya, dan kesabaran karena sementara ini masih harus menanggung perbedaan-perbedaan kita.

4. Eklektivisme

Eklektivisme adalah suatu sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersipat eklektik.

5. Universalisme

Universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena faktor historis-antropologis, agama lalu tampil dalam format plural. Menurut Raimundo Panikkar, jika suatu perjumpaan agama terjadi, baik dalam fakta yang nyata maupun dalam suatu dialog yang disadari, maka orang membutuhkan metafora dasar untuk mengutarakan masalah-masalah yang berbeda. Oleh karena itu, tiga macam model perjumpaan agama bisa berguna, yakni model fisika: pelangi, model geometri : invarian topologis, dan model antropologis : bahasa.

Paradigma atau sikap beragama yang berkembang di dunia Kristen tersebut, ada hubungannya dengan teori W.C. Smith dalam mengkaji agama orang lain. Ada beberapa tahapan dalam hubungan antar agama yang akhirnya memunculkan dialog harmonis antar umat beragama. Tahapan-tahapan ini dianalogkan dalam bentuk : *I, You dan We*. “*I*” menunjukkan eksklusif. “*You*”, menunjukkan inklusif, dan “*we*” menunjukkan keterbukaan. Para penganut agama memberikan tanggapan atau respon terhadap doktrin agamanya. Dalam memberikan respon ini, para penganut agama, paling tidak, memiliki tiga kecenderungan yang bisa diamati. Komarudin Hidayat memberikan ketiga kecenderungan itu, yang menurutnya bukan sebagai suatu pemisahan, yakni kecenderungan “mistikal” (*solitary*), “profetik-ideologikal” (*solidarity*), dan “humanis-fungsional”.

Respon keberagamaan mistikal, antara lain, ditandai dengan penekanannya pada penghayatan individual terhadap kehadiran Tuhan. Dalam tradisi mistik, puncak kebahagiaan hidup adalah apabila seseorang telah berhasil menghilangkan segala kotoran hati, pikiran, dan perilaku sehingga antara dia dan

Tuhan terjalin hubungan yang intim yang dijalin dengan cinta kasih. Tipologi *kedua* adalah profetis ideologikal. Kecenderungan beragama model ini, antara lain, ditandai dengan penekanannya pada misi sosial keagamaan dengan menggalang solidaritas dan kekuatan. Oleh karenanya, kegiatan penyebaran agama dengan tujuan menambah pengikut dinilai memiliki keutamaan teologis dan memperkuat kekuatan ideologis.

Yang *ketiga*, humanis fungsional, adalah kecenderungan beragama dengan titik tekan pada penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan oleh agama. Pada tipe ini, apa yang disebut kebijakan hidup beragama adalah bila seseorang telah beriman pada Tuhan dan lalu berbuat baik terhadap sesamanya. Sikap toleran dan eklektisisme pemikiran beragama merupakan salah satu ciri tipe ini. Kecenderungan keberagamaan di atas hanyalah merupakan respon aksentuasi dan tidak identik dengan totalitas doktrin agama itu sendiri. Partisipasi dan pelaksanaan seseorang ke dalam agama biasanya bersipat parsial, dibatasi oleh kemampuan, pilihan, serta kuat lemahnya komitmen iman seseorang. Namun demikian, dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara, tipologi keberagamaan ketiga, yang menekankan orientasi kemanusiaan, perlu mendapat apresiasi dan penekanan. Hikmah hidup keberagamaan haruslah bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan.

F. Sikap Beragama Organisasi Keagamaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama. Perbedaan-perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik-konflik terutama antara organisasi internal agama Islam. Hal ini bisa kemungkinan disebabkan oleh sikap saling curiga atau kesalahpahaman dari penganut sebuah organisasi

agama Islam terhadap sikap dan perilaku komunitas Islam lain. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk bersikap toleran agar terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat beragama dan setiap agama mengakui eksistensi organisasi-organisasi lain dan saling menghormati hak asasi penganutnya.

Di Indonesia, organisasi keagamaan bisa sangat beragama seperti, Nahdlatul Ulama (NU), Sarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis DaKwah Islamiyah (MDI), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aisyiah, Muslimat NU, dan sebagainya. Sedangkan organisasi keagamaan Islam yang bersifat lokal pada umumnya bergerak di bidang daKwah dan pendidikan seperti: Majelis TaKlim, Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yatim Piatu, Lembaga-Lembaga DaKwah Lokal, dan sebagainya.¹¹

Melihat kondisi di Indonesia yang terdiri dari beranekaragam organisasi Islam, perbedaan di antara organisasi Islam sudah menjadi perdebatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adanya perselisihan dan konflik merupakan hal yang rawan dalam hubungan seagama, maupun berbeda agama. Melihat hal itu, maka pemerintah melindungi umat beragama dan menganjurkan untuk hidup rukun pada sesamanya. Untuk itulah interaksi yang baik dalam beragama sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Munculnya paham-paham keagamaan yang ekstrem berpotensi memecah toleransi beragama, oleh karenanya pemerintah bersama dengan Kementerian Agama mengusung dan mengkampanyekan sikap moderat dalam beragama atau dikenal dengan istilah moderasi beragama.

Dalam agama Islam, konsep moderat biasa dibahasakan dengan kata “wasathiyah”, yang secara harfiah berarti tengah atau pertengahan. Sebagaimana

¹¹Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 251.

dalam Q.S. al-Baqarah 143, sebagai salah satu ayat yang paling sering dipakai untuk rujukan saat membicarakan moderasi beragama, yang artinya: “Dan demikianlah Kami menjadikan kamu ummah wasathâ agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia...” Kata “ummah wasatha” dalam ayat tersebut berarti umat pertengahan, dalam beberapa literature kata “wasatha” mengandung makna lain, yaitu al-haqq (kebenaran), al-‘adl (keadilan, dan al-syarafah (kemuliaan).¹²

Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengurangan kekerasan, dan juga penghindaran keekstriman. Orang moderat berarti orang yang bersikap tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, bersikap tidak berlebihan dan masih dalam batas wajar. Kalau orang moderat dalam beragama berarti orang yang suka mengedepankan toleransi, meyakini agama sendiri tapi juga menghargai keyakinan penganut agama lain, bukan ekstrim membenarkan agama sendiri lalu menyalahkan agama lain, namun juga bukan mau berkorban makan babi atas nama toleransi.

Berdasarkan pemahaman sikap moderasi beragama, sebenarnya umat Islam Indonesia pada umumnya sudah mengimplementasikan ajaran Islam yang moderat. Hal ini bisa kita lihat pada cerminan dari beberapa organisasi besar dalam Islam, seperti NU dan Muhammadiyah. Dua organisasi besar ini menjadi cerminan benteng pertahanan Islam moderat. Bahkan beberapa kegiatan kedua ormas tersebut telah menunjukkan bahwa Indonesia menjadi tujuan studi banding moderasi Islam.¹³

¹²Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.16.

¹³Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2018, *Moderasi Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Publishing Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2019), h. 17.

REFERENSI

- Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Cliffort Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Jogyakarta: Kanisius, 1992).
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Depag RI, *Ilmu Perbandingan Agama, Proyek Pembinaan PT/LAIN*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1981).
- Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).
- Idrus Ruslan, *Lembaga-Lembaga Keagamaan*, (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin Institut Agam Islam Negri Raden Intan Lampung, 2014).
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2018, *Moderasi Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Publishing Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2019).
- M. Rusli Karim, *Agama Modernisasi dan Sekulerisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Muhtar Ghazali Adeng, *Agama dan Keberagamaan dalam Kontek Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

PERAN LEMBAGA AGAMA SEBAGAI SARANA KERUKUNAN ANTAR UMAT

(Nurlaila & Nanda Sekti Prayetno)



A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dengan masyarakat yang multikultural, bermacam-macam budaya, suku, bahasa dan agama, menjadikan bangsa ini sangat unik dimata dunia. Namun keunikan itu membawa dampak positif dan negatif. Untuk meminimalisir dampak negatif itu, terutama dalam bidang keagamaan, bidang yang sangat sensitif dan jika tidak diorganisir kan tibul gejala-gejala perselihan yang menghancurkan rasa persatuan. Diskursus hubungan antar umat beragama saat ini menjadi persoalan penting yang dihadapi umat manusia,¹ karena adanya klaim kebenaran dan keselamatan dari masing-masing agama, yang memicu terjadinya konflik antar umat beragama yang sangat mengganggu tertatanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²

¹S.A Kamal, *Religion in A Pluralistic Society*, (Leiden: E.J Brill, 1976), h. 5.

²Membangun kehidupan umat yang beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada klaim kebenaran dari pada mencari kebenaran. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama dan sebagainya. Berbagai peristiwa yang sempat menggejolak di sebagian wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir mengindikasikan telah terjadinya pertentangan menyangkut berbagai kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. dan dalam berbagai pertentangan itu, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan sehingga tercipta suasana konflik yang cukup berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Eskalasi pertentangan yang dilapisi baju SARA seringkali menciptakan konflik kekerasan yang lebih menegangkan dan mertesahkan. Dalam suasana yang seperti ini agama seringkali menjadi titik singgung paling sensitive dan eksklusif dalam pergaulan pluritas masyarakat. Lihat Atho Mudzhar, "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pimpinan Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), h.19.

Maka dibentuklah lembaga keagamaan yang bertujuan untuk membuka mata umat beragama bahwa Indonesia bukanlah hanya memiliki satu agama namun beberapa agama yang saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Lembaga atau organisasi yang timbul dari setiap agama kiranya dapat juga menimbulkan rasa perdamaian dan persatuan sebagai cita - cita satu bangsa yang sama-sama mencari kebahagiaan dibi dunia dan akhirat/kehidupan berikutnya. Lembaga agama adalah suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia.³

Lembaga keagamaan merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam menganut agama dan kepercayaannya serta melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang tercapainya tujuan dari lembaga tersebut. Ekspresi sosial dari ajaran agama dihidupkan dan dipelihara oleh adanya masyarakat penganut yang disebut dengan lembaga keagamaan, baik yang jelas strukturnya maupun sifatnya samar- samar. Pada saat yang bersamaan, dalam rangka mempertahankan keberadaannya, setiap lembaga keagamaan pun akan membangun jaringan sosialnya melalui pengembangan kelembagaan atau kegiatan kemasyarakatan.

Munculnya lembaga keagamaan adalah dalam rangka atau untuk mengakomodasi dan memwadahi terdapatnya keaneka ragaman corak berpikir, kepentingan, orientasi, dan tujuan para penganut agama itu sendiri. Hubungan antar umat beragama tidak selalu harmonis dan bersahabat. Hubungan ini kadang-kadang atau sering diwarnai konflik, kebencian, dan permusuhan. Bentuk-bentuk hubungan antar umat beragama baik harmonis maupun konflik -meskipun lebih sering ditimbulkan oleh faktor sosial politik tidak pernah terlepas dari faktor keagamaan. Karena itu dalam memelihara dan membina hubungan yang harmonis antar komunitas-komunitas yang berbeda agama, faktor keagamaan tidak bisa diabaikan.⁴

³ <https://brainly.co.id>. Diakses Pada Tanggal 17 September 2022

⁴ Mun'im A. Sirri. (ed), *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 65.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Esposito bahwa bahwa gairah dan orientasi kaum revivalis juga mempengaruhi status dan hak-hak non-Muslim, adanya masyarakat yang fanatik terhadap suatu agama, maka akan mengakibatkan berbagai masalah seperti konflik, kekerasan serta pembunuhan mengatasnamakan agama.⁵ Abdulaziz Sachedina juga mengungkapkan bahwa kebanyakan keputusan fikih masa lampau yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan minoritas non muslim telah menjadi tidak relevan bagi konteks pluralitas yang mewarnai hubungan internasional masa kini.⁶ Aturan-aturan yang di bentuk secara gegabah pada masa sekarang ini dengan tanpa menentukan tujuan terlebih dahulu dari sang pemberi hukum serta menentukan faktor-faktor situasional maka akan menyebabkan kekeliruan dalam menilai berubahnya situasi pada umat Islam.⁷

B. Ciri-Ciri dan Macam-Macam Lembaga Agama

1. Ciri-ciri Lembaga Agama

Lembaga agama memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

- a. Merupakan sistem keyakinan.
- b. Merupakan perwujudan sesuatu yang diyakini sebagai hal gaib.
- c. Menjadi pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku.
- d. Mempersatukan umat.
- e. Bertujuan memuliakan umatnya⁸

2. Macam-macam Lembaga Agama

lembaga agama dalam masyarakat secara umum antara lain;⁹ KUA (Kantor Urusan Agama) yang berfungsi untuk memberikan regulasi oengaduan

⁵John L. Esposito, *Islam The Straight Path*, (New York: Oxford University Press, 1988), h. 192.

⁶Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001), h. 134.

⁷Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, h. 49.

⁸<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-agama-ciri-fungsi-dan-contoh-lengkap/>. Diakses pada tanggal 28 September 2022

KDART ataupun Pernikahan. Depag (Departemen Agama), menjadi salah satu contoh lembaga agama yang memberikan kontribusi pada peranan pendidikan-pendidikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pengadilan Agama, merupakan salah satu bentuk lembaga agama yang memberikan regulasi tindakan-tindakan menyimpang dengan norma atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Kementrian Agama (Kemenag), menjadi salah satu jenis lembaga agama yang diakui sebagai peranan tertinggi masyarakat dengan upaya memberikan hubungan kepada lembaga legislatif yaitu presiden. Keseluruhan lembaga ataupun institusi-institusi yang telah tersebut diatas yang ada di Indonesia seyogyanya mampu untuk memberikan rasa damai kepada seluruh penganut agama, antara lain:

a. Islam

Contoh lembaga keagamaan informal dalam Islam seperti Agama yang Paling Diyakini Orang Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI. Peranan MUI ini penting, selain memiliki fungsi memberikan jaminan halal/haram juga memberikan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan dinamika kehidupan sosial.

b. Kristen

Lembaga-lembaga keagamaan lain yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang lebih dikenal dengan PGI. PGI sendiri memiliki misi untuk mencintai dan mengasishi anak-anak Tuhan.

c. Buddha

Contoh lain terkait dengan lembaga keagamaan, salah satunya agama Buddha, dan lambang lembaga tersebut adalah Perwakilan Buddhis Indonesia yang disingkat WALUBI. Fungsi lembaga ini tidak hanya mengeluarkan peraturan tetapi juga memberikan fatwa agama.

⁹<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-agama-ciri-fungsi-dan-contoh-lengkap/>. Diakses pada tanggal 28 September 2022

d. Katolik

Bentuk lembaga keagamaan lainnya adalah Katolik, kepercayaan ini adalah Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang kemudian disingkat KWI. Peran KWI adalah bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada anggotanya.

e. Hindu

Jenis organisasi keagamaan selanjutnya dalam Religi Kehidupan adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia atau lebih dikenal dengan PHDI. Lembaga ini mengomentari berbagai masalah sosial di Indonesia dan memberikan perlindungan kepada semua orang Indonesia yang beragama Hindu.

f. Khonghucu

Agama Khonghucu adalah agama termuda di Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan sebagai agama di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang merupakan sebagai salah satu keyakinan, serta dibentuk juga Lembaga Tinggi Keagamaannya dengan nama Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Dengan penyebaran hampir sampai ke beberapa bagian besar provinsi di Indonesia.

C. Peran Dan Fungsi Lembaga Keagamaan

Peran lembaga agama, kalimat ini terdiri dari dua istilah yaitu Peran dan Lembaga Agama. Peran Menurut Friedman dan Sefudin peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu supaya dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁰

¹⁰Saefuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Cet Ke-2 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998), h. 289.

Peran didefinisikan sebagai harapan terorganisir yang terkait dengan konteks interaksi spesifik yang membentuk orientasi motivasi seseorang terhadap orang lain. Secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu manifes (nyata) dan laten (tersembunyi).¹¹ Adapun fungsi manifes lembaga agama sebagai berikut:

a) Edukatif

Lembaga agama mengajarkan dan membenikan pendidikan moral (berfungsi edukatif) bagi pemeluknya tentang hal-hal yang baik atau buruk sebagai pedoman tingkah laku pemeluknya. Ajaran agama memberikan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan dan dihindari oleh umat beragama.

b) Penyelamat

Melalui lembaga agama setiap masyarakat memiliki keyakinan akan terselamatkan kehidupannya baik di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya. Setiap manusia tidak terhindar dan berbagai masalah dalam kehidupannya sehingga agama dapat menjadi penyelamat manusia.

c) Pengawas Sosial

Lembaga agama berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan yang ada dalam kitab suci setiap agama. Dalam kitab suci dan ajaran agama terdapat sanksi yang kelak akan diterima apabila masyarakat melanggarnya.

d) Persaudaraan

Lembaga agama mampu mempertemukan kelompok atau golongan manusia yang heterogen dalam hal kebudayaan, ras, dan suku bangsa ke dalam suatu keluarga besar lembaga agama. Keterikatan persaudaraan terjalin ketika masyarakat merasakan adanya solidaritas dan kesatuan yang kuat karena adanya

¹¹<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-agama-ciri-fungsi-dan-contoh-lengkap/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

satu kepercayaan agama tertentu. Karena manusia beriman itu bersaudara sebagaimana disimpulkan oleh Nurcholish Madjid :

1. Semua orang yang beriman adalah saudara satu dengan lainnya.
2. Namun kaum beriman itu tidaklah semuanya sama dalam segala hal. Adanya perbedaan mungkin saja menimbulkan pertikaian, yang harus selalu diusahakan pendampingnya.
3. Perdamaian antara dua kelompok yang bertikai itu adalah dalam rangka taqwa kepada Allah.
4. Dan dengan taqwa itu Allah akan menganugerahkan rahmat-Nya yang mendasari jiwa persaudaraan.
5. Maka harus ada sikap saling menghormati, dengan tidak merendahkan suatu golongan lain.
6. Setiap golongan harus cukup rendah hati untuk mengakui kemungkinan diri mereka salah, dan golongan lain benar.
7. Sejalan dengan itu dilarang saling menghina sesama kaum beriman.
8. Juga dilarang memberi nama ejekan satu sama lain, apalagi jika ejekan kejahatan.
9. Yang tidak mengikuti itu semua adalah orang-orang zalim.
10. Kaum beriman harus menjauhkan banyak prasangka, karena itu bisa jahat.
11. Juga dilarang saling mencari kesalahan.
12. Dan dilarang pula melakukan pengumpatan (ghībah, beck biting), yaitu membicarakan keburukan sesama ketika yang dibicarakan itu tidak ada di tempat pembicaraan.
13. Melakukan ghībah itu bagaikan memakan daging mayat saudara sendiri, sebab orang yang dibicarakan keburukannya itu, karena tidak di tempat, tidak dapat membela diri, apalagi melawan. Jadi ghībah adalah kejahatan ganda, suatu kejahatan di atas kejahatan.

14. Sekali lagi kita kaum beriman diseru untuk bertaqwa kepada Allah, yaitu menyadari akan ada pengawasan Allah yang selalu hadir di mana pun kita berada, sehingga tidak sepatutnyalah seorang yang beriman melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh-Nya.
15. Taqwa kepada Allah menghasilkan bimbingan ke arah budi pekerti yang luhur itu, maka Allah akan mengampuni kita dan memberi rahmat-Nya kepada kita.
16. Lebih lanjut, kita diingatkan bahwa seluruh umat manusia pun diciptakan Allah berbeda-beda, karena dijadikan oleh-Nya berbangsabangsa dan bersuku-suku.
17. Itu semua tidak lain ialah agar kita saling kenal dengan sikap saling menghormati (arti luas dari perkataan Arab ta'āraf).
18. Kita tidak boleh membagi manusia menjadi tinggi rendah karena pertimbangan-pertimbangan askriptif atau kenisbatan, seperti kebangsaan, kesukuan, dan lain-lain.
19. Sebab dalam pandangan Allah, manusia tinggi dan rendah hanyalah berdasarkan tingkat ketaqwaan yang telah diperolehnya.
20. Manusia tidak akan mengetahui dan tidak diperkenankan menilai atau mengukur tingkat ketaqwaan sesamanya itu. Allah Maha Tahu dan Maha Teliti.¹²

Agama mengandung ikatan yang harus dijaga dan dipatuhi oleh manusia. Koneksi ini memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari seseorang. Ikatan itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera.¹³

Adapun fungsi laten lembaga agama ialah Fungsi laten organisasi keagamaan adalah membangkitkan fanatisme. Anggapan bahwa beberapa agama

¹²Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h.31-32

¹³Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), h. 10

lebih baik dari yang lain dan dapat menyebabkan kefanatikan yang dapat mengganggu kerukunan serta perdamaian hidup beragama. Pendapat lain tentang peran dan fungsi lembaga keagamaan adalah sebagai berikut:

Fungsi utama lembaga keagamaan adalah membimbing umat dalam hubungannya dengan tuhan. Lembaga keagamaan juga memiliki tugas lain yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga keagamaan seringkali menjadi dasar bagi perilaku yang konsisten (diteladani) dalam masyarakat. ahli hukum adat berpendapat bahwa hukum adat terdiri dari unsur adat dan unsur agama. Pernyataan para ahli hukum ini memperkuat teori bahwa agama merupakan dasar bagi pengembangan perilaku keteladanan. Masyarakat kemudian merumuskan sanksi (positif dan negatif) dengan peraturan yang disepakati secara umum, dalam berbagai kasus lembaga keagamaan tidak hanya menjadi landasan pola perilaku, tetapi juga nilai dan etika sebagai prinsip untuk bersatu sebagai pedoman kebijakan sosial.

Selain yang telah disebutkan diatas, ada beberapa fungsi lembaga keagamaan lainnya, seperti:

1. Membantu pencarian identitas moral
2. Memberikan interpretasi untuk menjelaskan alam dan lingkungan social
3. Meningkatkan sosialisasi. kohesi sosial dan solidaritas kelompok¹⁴

Demi terwujudnya kerukunan umat beragama, setiap organisasi keagamaan dituntut untuk menumbuhkan jiwa- jiwa yang berakhlak baik, berbudi pekerti, beriman, dan menciptakan manusia yang bertingkah laku baik sesuai ajaran dan kepercayaan yang dianut oleh tiap masing-masing umat yang beragama. Dalam hal ini adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Karena dengan adanya kedamaian maka seluruh unsur-unsur kebaikan dalam setiap ajaran agama dapat direalisasikan tanpa adanya

¹⁴Taufiq Rohman Dhohiri, et. al. *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), h. 69.

konflik atau perselisihan yang menghancurkan rasa persatuan dalam berbangsa dan setanah air.

D. Peran Lembaga Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Beragama

Agama adalah kepercayaan pada manusia dimana manusia percaya akan adanya kekuatan super dan kekuatan besar di luar kemampuannya. Agama dapat menjadi standar atau nilai dalam kehidupan masyarakat, sehingga agama sangat berperan penting dalam membangun kualitas masyarakat, dimulai dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan keyakinan agamanya agar terciptanya masyarakat yang beradab dan agamis.

Didalam agama terdapat ajaran agama yang mendorong umatnya untuk terpacu menuju kehidupan yang lebih baik, selain itu ajaran agama juga mendorong umatnya untuk saling tolong menolong, saling mencintai dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik bagi orang banyak atau sering dikenal dengan kehidupan yang sejahtera. Agama dan kepentingan sosialnya tersebut membutuhkan sebuah forum dimana forum ini melayani satu tujuan dalam bentuk dan menampung satu tujuan untuk mencapai masyarakat maju yang beragama, baik kehidupan sosial maupun individu terwujud dalam bentuk Lembaga Agama.

Kesejahteraan sosial merupakan faktor utama dalam membentuk peradaban yang maju. Dalam Islam dikenal dengan istilah Zakat, Infaq dan Shodaqoh, dimana fitrah zakat, rukun Islam yang ke- 4, bertujuan membantu fakir miskin dengan memberikan sebagian hartanya kepada penerima zakat, yaitu. fakir miskin, anak yatim dan penerima zakat itu sendiri. Melihat dari alur zakat itu sendiri, dapat digolongkan sebagai salah satu dari upaya mewujudkan bangsa Islam yang sejahtera. Mengingat pentingnya fungsi zakat itu sendiri,

maka diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola dan menjadi wadah untuk melaksanakan transaksi kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh.

Menurut M. A. Manan, tujuan zakat dapat dilihat dalam bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam ranah moral, zakat adalah ketamakan dan keserakahan si kaya. Sesudah kaya itu disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sektor sosial, zakat bertindak sebagai alat unik yang diberikan oleh Islam untuk mengentaskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab sosial mereka. Dalam ilmu ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan yang luar biasa di tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan itu tersebar sebelum menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ini adalah kontribusi wajib umat Islam untuk pembendaharaan negara.¹⁵

E. Peran Pemerintah Dalam Membina Kerukunan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 menetapkan berdirinya Departemen Agama RI dengan tugas pokok, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang agama. Penyelenggaraan tugas pokok Departemen Agama itu, diantara lain berbentuk bimbingan, pemnbinan dan pelayanan terhadap kehidupan beragama, sama sekali tidak mencampuri masalah aqidah dan kehidupan intern masing- masing agama dan pemeluknya. Namun, pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan kehidupan antar pemeluk agama yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada buku Pedoman Dasar Kehidupan Beragama tahun 1985-1986 Bab IV halaman 49 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

¹⁵M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Intermedia, 1992), h. 256.

1. Kerukunan hidup beragama adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
2. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan.
3. Menanamkan pengertian akan nilai kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama. Mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkahlaku yang mengarah kepadakerukunan hidup beragama.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.

Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dimaksudkan agar umat beragama mampu menjadi subjek pembangunan yang bertanggung jawab, khususnya pembinaan kerukunan hidup beragama. Umat beragama Indonesia mempunyai kondisi yang positif untuk terus dikembangkan, yaitu:

- a. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kepercayaan kepada kehidupan di hari kemudian.
- c. Memandang sesuatu selalu melihat dua aspek, yaitu aspek dunia dan akhirat.
- d. Kesediaan untuk hidup sederhana dan berkorban.
- e. Senantiasa memegang teguh pendirian yang berkaitan dengan aqidah agama.

Sebagai forum, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah dan isinya, serta bertugas melindungi dan memfasilitasi segala proses dan kegiatan keagamaan. Indonesia sebagai negara beragama menawarkan tempat yang sangat terhormat bagi keragaman warganya dan bahkan mengakui keberadaan agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Fenomena ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa bangsa Indonesia

adalah bangsa yang majemuk secara suku, ras, dan agama, di antara berbagai golongan.¹⁶

Terminologi tersebut memberi makna pada realitas sosial yang ada dan sedang terjadi di negeri ini, di satu sisi ada kesadaran akan perbedaan, di sisi lain perlu adanya persatuan dan kesatuan, kedua hal ini ditempatkan di bagian dan proporsinya masing-masing adalah sesuatu yang harus terus aktualisasi. Pembaharuan atau aktualisasi ini dilandasi oleh persepsi kolektif bahwa hidup itu dinamis, sehingga tantangan dan hambatan yang muncul bersifat dinamis sesuai zaman. Dalam konteks ini, kita membutuhkan sebuah forum atau tempat di mana kita dapat mengekspresikan, berkomunikasi, dan menyatukan perbedaan kita tanpa mengesampingkan satu sama lain.

Di sini makna Binneka Tunggal Ika sebagai kesadaran budaya diterapkan, diperbarui dan diwujudkan dalam kehidupan. Adapun makna tunggal kebenaran, dominasi, hegemoni atas orang lain, seringkali mempengaruhi rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang membawa emosi kelompok yang mengkristal. Jika ini menjadi semakin mengkristal, itu adalah tanda ketegangan sosial dan dapat menyebabkan konflik. Jika konflik yang terjadi dibalut dengan label agama, maka yang terjadi adalah kita tahu kapan konflik itu akan terjadi, tapi tidak pernah tahu kapan akan berakhir.¹⁷

F. Langkah-langkah Yang Dilakukan Agar Negara Damai, Rukun Antar Umat Beragama

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.

¹⁶Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan, Makalah di akses tanggal 11 Oktober 2022

¹⁷Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan*, Makalah di akses tanggal 11 Oktober 2022

2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.
8. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.

9. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.
10. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.
11. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah- wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.

Menyadari realitas multikultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu serta berbagai peristiwa di beberapa daerah. Maka wadah Kerjasama yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 oleh Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut PBM) mengenai pedoman sert pelaksanaan bagi kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah, sangatlah penting untuk dilaksanakan di daerah-daerah yang dibentuk atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965 jauh sebelum FKUB ini dibentuk secara formal melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan adanya penetapan oleh Presiden Nomor 1 Tahun 1965 mengenai pencegahan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama kemudian di kukuhkan menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1969. Selama masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah selalu menginisiasi berbagai kegiatan untuk menyelesaikan berbagai macam

ketegangan dalam kehidupan umat beragama dengan tujuan agar selalu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta rasa nasionalisme.

Mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditetapkan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1996 terjadi lah polemik didalam tubuh masyarakat pada tahun 2005 yang berisikan tentang sebahagian masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap sebagai penghambat atas pendirian rumah peribadatan dan sebahagian masyarakat lainnya menghendaki SKB tersebut tetap dipertahankan, dengan adanya polemik tersebut, maka Presiden memerintahkan Menteri Agama agar mengkaji kembali SKB No.1 Tahun 1996, dan setelah dilakukan kajian ulang maka hasil kajian tersebut adalah bahwa keberadaan SKB No.1 Tahun 1996 masih perlu dipertahankan dengan membentuk tim untuk menyempurkan SKB tersebut dengan mengikut sertakan beberapa perwakilan dari petinggi-petinggi agama sejumlah dua orang dari masing-masing majelis agama yang dilangsungkan sebanyak 11 kali tatap muka. Pertemuan tersebut menghasilkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang ikut di tandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006¹⁸

Kebijakan yang telah disepakati tentang Pembinaan Umat Beragama di Indonesia dari mulai Indonesia merdeka adalah berisikan sebagai berikut:

1. Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
2. Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama.

¹⁸Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), h. 1-2

3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama
6. Instruksi Menteri RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 01 BER/MDN-MAG/1969 di daerah
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1979 tentang tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Penguasaan Aliran Kepercayaan Masyarakat
10. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng
12. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja

13. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/IX/75 perihal Penjelasan Terhadap Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 tanggal 28 November 1975
14. Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Mushalla
15. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Keraanan Kerukunan Hidup Umat Beragama
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama.¹⁹

G. Hambatan Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam PMB No. 9 dan 8 Tahun 2006 mengenai Kerukunan Umat Beragama Bab I Pasal I ialah status hubungan Umat Beragama Berdasarkan toleransi dan saling pengertian, saling hormat menghormati, menghargai adanya kesetaran didalam pengamalan ajaran agama

¹⁹Ali Imron, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol. 5 No.1 Tahun 2011, h. 9-10.

dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang 1945.²⁰

Demi terwujudnya kerukunan umat beragama maka dibentuklah forum kerukunan umat beragama atau FKUB yang merupakan sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan menjaga kerukunan antar umat.²¹ Maka dari itu ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh Lembaga Keagamaan yang menjadi perhatian bersama, diantaranya:

1. Kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan dapat tercipta tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi maupun maknanya.
2. Keinginan mendirikan rumah ibadah tanpa memperhatikan jumlah pemeluk agama setempat sehingga menyinggung perasaan umat beragama yang memang mayoritas di tempat itu.
3. Menggunakan mayoritas sebagai sarana penyelesaian sehingga akan menimbulkan masalah. Misalnya, pemilikan dana dan fasilitas pendidikan untuk memaksakan kehendaknya pada murid yang belajar.
4. Makin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistis.

Dari berbagai kondisi yang mendukung kerukunan hidup beragama maupun hambatan hambatan yang ada, agar kerukunan umat beragama dapat terpelihara maka pemerintah dengan kebijaksanaannya memberikan pembinaan yang intinya bahwa masalah kebebasan beragama tidak membenarkan orang yang beragama dijadikan sasaran dakwah dari agama lain, pendirian rumah ibadah, hubungan dakwah dengan politik, dakwah dan kuliah subuh, batuan luar

²⁰ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006

²¹ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006

negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, peringatan hari-hari besar agama, penggunaan tanah kuburan, pendidikan agama dan perkawinan campuran.

Jika kerukunan intern, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis, niscaya perhatian dan konsentrasi pemerintah membangun Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT akan segera terwujud, berkat dukunag umat beragama yang mampu hidup berdampingan dengan serasi. Sekaligus merupakan contoh kongkret kerukunan hidup beragama bagi masyarakat dunia.

H. Solusi Masalah Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama merupakan faktor penting yang harus dijaga di Indonesia yang masyarakatnya hidup dalam beragam suku, ras, sekte dan agama. Untuk itu, diperlukan sikap toleran dalam menyikapi perbedaan tersebut agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Karena perdamaian nasional hanya dapat dicapai jika masing-masing kelompok agama mahir berbagi identitas kelompok agama lainnya.²² Islam mengakui hak keberadaan agama-agama lain dan mengizinkan pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya sendiri. Inilah dasar ajaran Islam tentang toleransi beragama.²³

1. Dialog antar pemeluk agama

Sejarah perjumpaan agama-agama yang menggunakan kerangka politik secara tipikal hampir keseluruhannya dipenuhi pergumulan, konflik dan pertarungan. Karena itulah dalam perkembangan ilmu sejarah dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejarah yang berpusat pada politik yang kemudian disebut sebagai “sejarah konvensional” dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang

²²M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1988), h. 209.

²³Adeng Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer Suatu Refleksi Keagamaan Yang Dialogis* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 55-58.

kehidupan sosial-budaya lainnya, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai “sejarah baru” (new history). Sejarah model mutakhir ini lazim disebut sebagai “sejarah sosial” (social history) sebagai bandingan dari “sejarah politik” (political history).

Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia akan sangat relevan, karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua agama ini di luar bidang politik, yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian, yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai (peaceful co-existence) di antara para pemeluk agama yang berbeda.

Hampir bisa dipastikan, perjumpaan Kristen dan Islam (dan juga agama-agama lain) akan terus meningkat di masa-masa datang. Sejalan dengan peningkatan globalisasi, revolusi teknologi komunikasi dan transportasi, kita akan menyaksikan gelombang perjumpaan agama-agama dalam skala intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dengan begitu, hampir tidak ada lagi suatu komunitas umat beragama yang bisa hidup eksklusif, terpisah dari lingkungan komunitas umat-umat beragama lainnya. Satu contoh kasus dapat diambil: seperti dengan meyakinkan dibuktikan Eck (2002), Amerika Serikat, yang mungkin oleh sebagian orang dipandang sebagai sebuah “negara Kristen,” telah berubah menjadi negara yang secara keagamaan paling beragam. Saya kira, Indonesia, dalam batas tertentu, juga mengalami kecenderungan yang sama. Dalam pandangan saya, sebagian besar perjumpaan di antara agama-agama itu, khususnya agama yang mengalami konflik, bersifat damai.

Dalam waktu-waktu tertentu ketika terjadi perubahan- perubahan politik dan sosial yang cepat, yang memunculkan krisis pertikaian dan konflik sangat boleh jadi meningkat intensitasnya. Tetapi hal ini seyogyanya tidak mengaburkan perspektif kita, bahwa kedamaian lebih sering menjadi feature utama. Kedamaian dalam perjumpaan itu, hemat saya, banyak bersumber dari

pertukaran (exchanges) dalam lapangan sosio-kultural atau bidang-bidang yang secara longgar dapat disebut sebagai “non-agama.”

Bahkan terjadi juga pertukaran yang semakin intensif menyangkut gagasan-gagasan keagamaan melalui dialog- dialog antaragama dan kemanusiaan baik pada tingkat domestik di Indonesia maupun pada tingkat internasional; ini jelas memperkuat perjumpaan secara damai tersebut. Melalui berbagai pertukaran semacam ini terjadi penguatan saling pengertian dan, pada gilirannya, kehidupan berdampingan secara damai.

2. Bersikap optimis

Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling menghargai antaragama, saya kira kita tidak perlu bersikap pesimis. Sebaliknya, kita perlu dan seharusnya mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Paling tidak ada tiga hal yang dapat membuat kita bersikap optimis.

Pertama, pada beberapa dekade terakhir ini studi agama-agama, termasuk juga dialog antaragama, semakin merebak dan berkembang di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain di berbagai perguruan tinggi agama, IAIN dan Seminari misalnya, di universitas umum seperti Universitas Gajah Mada, juga telah didirikan Pusat Studi Agama-agama dan Lintas Budaya. Meskipun baru seumur jagung.

Hal itu bisa menjadi pertanda dan sekaligus harapan bagi pengembangan paham keagamaan yang lebih toleran dan pada akhirnya lebih manusiawi. Juga bermunculan lembaga- lembaga kajian agama, seperti Interfidei dan FKBA di Yogyakarta, yang memberikan sumbangan dalam menumbuhkembangkan paham pluralisme agama dan kerukunan antarpenganutnya.

Kedua, para pemimpin masing-masing agama semakin sadar akan perlunya perspektif baru dalam melihat hubungan antar-agama. Mereka seringkali mengadakan pertemuan, baik secara reguler maupun insidental untuk

menjalin hubungan yang lebih erat dan memecahkan berbagai problem keagamaan yang tengah dihadapi bangsa kita dewasa ini.

Kesadaran semacam ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin agama, tetapi juga oleh para penganut agama sampai ke akar rumput sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara pemimpin agama dan umat atau jemaatnya. Kita seringkali prihatin melihat orang-orang awam yang pemahaman keagamaannya bahkan bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Inilah kesalahan kita bersama. Kita lebih mementingkan bangunan-bangunan fisik peribadatan dan menambah kuantitas pengikut, tetapi kurang menekankan kedalaman (*intensity*) keberagamaan serta kualitas mereka dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.

Ketiga, masyarakat kita sebenarnya semakin dewasa dalam menanggapi isu- isu atau provokasi-provokasi. Mereka tidak lagi mudah disulut dan diadu-domba serta dimanfaatkan, baik oleh pribadi maupun kelompok demi target dan tujuan politik tertentu. Meskipun berkali-kali masjid dan gereja diledakkan, tetapi semakin teruji bahwa masyarakat kita sudah bisa membedakan mana wilayah agama dan mana wilayah politik.

Ini merupakan ujian bagi agama autentik (*authentic religion*) dan penganutnya. Adalah tugas kita bersama, yakni pemerintah, para pemimpin agama, dan masyarakat untuk mengingatkan para aktor politik di negeri kita untuk tidak memakai agama sebagai instrumen politik dan tidak lagi menebar teror untuk mengadu domba antarpenganut agama. Jika tiga hal ini bisa dikembangkan dan kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya, maka setidaknya kita para pemeluk agama masih mempunyai harapan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan pada gilirannya bisa hidup berdampingan lebih sebagai kawan dan mitra daripada sebagai lawan.

REFERENSI

- Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001).
- Adeng Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer Suatu Refleksi Keagamaan Yang Dialogis* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- Ali Imron, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol. 5 No.1 Tahun 2011.
- Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985).
- John L. Esposito, *Islam The Straight Path*, (New York: Oxford University Press, 1988).
- Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010).
- M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Intermedia, 1992).
- M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1988).
- Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), h.19.
- Mun'im A. Sirri. (ed), *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004).
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006
- S.A Kamal, *Religion in A Pluralistic Society*, (Leiden: E.J Brill, 1976).
- Saefuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Cet Ke-2 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998).
- Taufiq Rohman Dhohiri, et. al. *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira, 2007).

Sumber Internet

<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-agama-ciri-fungsi-dan-contoh-lengkap/>. Diakses pada tanggal 28 September 2022

<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-agama-ciri-fungsi-dan-contoh-lengkap/>. Diakses pada tanggal 28 September 2022

<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-agama-ciri-fungsi-dan-contoh-lengkap/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<https://Brainly.Co.Id>. Diakses Pada Tanggal 17 September 2022

Moderasi Beragama Dalam Konteks Budaya

(Fauziah Nurdin & Asmanidar)



A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan kebangsaan hari ini adalah meruncingnya konsep bernegara dan beragama. Dilema ini semakin memuncak khususnya ketika gesekan politik membawa embel-embel agama sebagai atribut yang paling ‘mudah’ namun sangat efisien dalam meraup suara. Titik baliknya, rakyat dan masyarakat selaku konsumen politik menjadi bulan-bulanan pemangku kepentingan yang berakhir pada lahirnya disintegrasi bangsa. Sikap ini kemudian tertanam dalam jati diri para pemeluk agama, keyakinan bahwa aliran atau agama sendiri yang boleh eksist membuat pemahaman keagamaan terisolasi dan memunculkan karakter beragama yang inklusif.

Pada akhirnya, para pemeluk agama fokus dalam ajarannya secara sempit. Mereka tutup mata dengan permasalahan sosial di luar golongannya. Secara berkesinambungan ini melahirkan konsep beragama yang tajam ke atas namun tumpul ke samping. Padahal, agama bukanlah ajaran yang hanya fokus pada urusan ibadah semata, melainkan turut diseimbangkan dengan perkara sosial. Menyikapi gesekan ini, pemerintah mencanangkan berbagai gerakan moderasi beragama pada berbagai dimensi. Moderasi beragama diyakini sebagai solusi terbaik tanpa melibatkan pergerakan militer atau tindakan yang melahirkan pertumpahan darah.

Moderasi beragama berupaya mencerdaskan masyarakat yang awalnya berfikir sempit (fanatik) menjadi lebih terbuka (toleran). Moderasi beragama bukanlah teori atau gagasan baru, ini adalah teori lama yang sudah ada dalam Alquran dengan sebutan ‘*Islam wasattiyah*’. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementerian Agama. Dalam konteks keIndonesiaan,

moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragaman.

Moderasi Beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama, yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dijadikan jalan tengah di tengah keberagaman beragama.¹

Indonesia adalah sebuah negeri tempat tumbuh suburnya beragam kebudayaan yang di pelihara dan dijaga oleh masyarakatnya. Di negeri ini terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis serta 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa.² Disamping itu, mereka juga menganut berbagai agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan beratus agama dan kepercayaan setempat yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal setempat. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, Berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik.

¹Kementerian PPN/Bapenas. 2020. Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

²Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), h. 1.

Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia.³ Maka dari itu, alur peradaban keIslaman di Indonesia tidak bisa terlepas dari realitas di atas. Selain itu, kondisi Indonesia yang multi etnis menyebabkan moderasi sebagai alternatif yang mau tidak mau mesti diimplementasikan guna mempersempit gesekan mazhab dan agama. Ini pula yang disinyalir menjadi akar eksistensinya Islam moderat dan mampu survive ditengah karakter masyarakat yang plural. Lebih jauh, sikap moderat akan menumbuhkan kedewasaan beragama dengan produk yang dikenal dengan kerukunan beragama.

B. Moderasi Beragama

1. Moderasi

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. Pengurangan kekerasan, dan 2. Penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.⁴ Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

³Agus Akhmadi, Religious Moderation In Indonesia's Diversity, dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019, h. 45.

⁴Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 15.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) peleraai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.⁵

2. Beragama

Secara Bahasa Beragama berarti menganut (memeluk) agama. Contoh : Saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Beragama berarti beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama). Contoh : Ia datang dari keluarga yang beragama. Beragama berarti sangat memuja-muja; gemar sekali pada; mementingkan (Kata percakapan). Contoh: Mereka beragama pada harta benda. Secara Istilah Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun dimanapun dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir ditengah-tengah kita agar harkat, derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi.

Oleh karenanya jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Beragama itu Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari

⁵Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi*,...h. 16.

pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. menjaga, menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri dan menjaga jagat raya ini.

Jadi Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*bate speech*), hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama

adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.⁶

Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok terlebih terhadap antar agama. sehingga perlunya memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya.⁷

Yusuf Al Qardhawi merupakan salah satu penggerak *al-wasathiyah school of thought* yang sesungguhnya sudah dirintis oleh generasi zaman jamaluddin al-afghani, Muhammad Abdh, dan Rasyid Ridha. Mereka berusaha ingin membebaskan umat yang belenggu, memadukan serta memberi keseimbangan antara adil dan moderat. Maka dari itu perlu adanya konsep moderasi, berikut merupakan salah satu konsep moderasi versi Yusuf Al Qardhawi:

- a. Komitmen pada nilai moralitas akhlak.

Mempunyai nilai akhlak yang mulia kejujuran, amanah, kesepakatan, bersikap rendah hati dan malu, begritu juga pada hal dengan moralitas sosial seperti keadilan, kebijakan, berasosiasi dengan kelompok masyarakat.

- b. Kerjasama kombinatif antara dua hal yang bersebrangan

Posisi moderat yang memperlihatkan dapat mengambil manfaat dari kelebihan dan menjahui kekurangan dari dua sisi aspek yang konfrontatif tersebut. Sehingga tidak boleh memihak pada satu sisi dan menjahui sisi yang lain sehingga akan bersikap ekstrim.

⁶Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi*,...hal. 17-18.

⁷Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYA", Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), h. 21.

c. Perlindungan hak-hak agama minoritas

Kewajiban mereka sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, namun dalam hal agama ibadah harusnya adanya pemisahan tidak bercampur. Negara tidak diperkenankan untuk mempersempit ruang gerak aktifitas keagamaan minoritas seperti larangan makan babi dan minuman keras.

d. Nilai-nilai humanis dan sosial

Nilai-nilai humanis dan sosial sesungguhnya merupakan khazanah otentik Islam. Perkembangan modern lebih mengidentifikasi hal tersebut sebagai nilai barat. Ia menjadi nilai yang paralel dengan konsep keadilan di tengah masyarakat dan pemerintah, kebebasan, kemuliaan dan hak asasi manusia.

e. Persatuan dan royalitas

Semua komponen umat harus bisa berkerja sama dalam hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang sudah disepakati semua orang.

f. Mengimani pluralitas

Keimanan akan pluralitas religi, pluralitas tradisional, pluralitas bahasa, pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya konsistensi antar berbagai peradapan.⁸

C. Indikator Moderasi Beragama

Ada empat hal indikator moderasi beragama yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen kebangsaan;
- 2) Toleransi;
- 3) Antikekerasan; dan
- 4) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

⁸Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi : Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, vol .36, No. 1 (Agustus 2013), 3-10.

Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan kembali dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme.⁹

Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.¹⁰

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika

⁹Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi*,...h. 42.

¹⁰Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi*,...h. 43.

seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intraagama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.¹¹

Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku.¹²

Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror

¹¹Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi*,...h. 43-44.

¹²Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi*,...h. 45

pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihakpihak yang mengancam identitasnya.¹³

Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersamaan, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror.

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan

¹³Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi...*h. 46.

kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.

Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama.¹⁴

D. Tujuan Moderasi Beragama

Tujuan moderasi beragama adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Tujuan moderasi beragama tak lain untuk menghadirkan harmonisasi di dalam kehidupan Kita sebagai sesama anak bangsa.

Sebagai warga negara Indonesia, Kita diberikan kebebasan dalam menjalankan keyakinan Kita, akan tetapi perlu diingat dalam Undang-Undang telah diatur tentang kewajiban Kita pula untuk menjaga hak pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya, oleh karenanya dalam menjalankan keyakinan, Kita harus tetap memperhatikan hak orang lain. Jangan sampai justru dengan ibadah yang Kita lakukan malah menimbulkan masalah bagi pemeluk agama atau orang lain.

Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama:

¹⁴Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi*,...h. 47.

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewannya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebihan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk

agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya.

Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai.

Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang. Selain dari tiga poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga.

Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya

memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal.¹⁵

E. Konteks sosial budaya

1. Pengertian sosial budaya

Menurut Andreas Eppink , sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Burnett, kebudayaan adalah keseluruhan berupa kesenian,moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir dalam bentuk lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat dan keseluruhan bersifat kompleks. Dari kedua pengertian tersebut bahwa sosial budaya memang mengacu kepada kehidupan bermasyarakat yang menekankan pada aspek adat istiadat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Beberapa pengertian sosial dan budaya di atas dapat disimpulkan bahwa Sosial budaya adalah struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Landasan sosial budaya,mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat dan individu secara alami, artinya aspek yang telah ada sejak manusia dilahirkan. Definisi sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Fungsi Budaya Bagi Masyarakat

Menurut Koenjaraningrat¹⁶ bahwa kebudayaan terdiri atas tiga wujud, ketiga wujud kebudayaan itu semuanya merupakan kebutuhan masyarakat yaitu:

¹⁵Joni Tapingku, *Moderasi Beragama Sebagai Perekat Dan Pemersatu Bangsa*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021) Disampaikan Pada Pembukaan Kuliah Semester Gasal 2021/2022.

1. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Sementara itu, dilihat dari sudut pandang teori konflik sosial, menurut kebudayaan berfungsi untuk memelihara ketidaksamaan sosial, dengan kata lain kebudayaan sesungguhnya berfungsi untuk memelihara dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap kelompok lainnya. Adanya dominasi kelompok tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan kelompok lain. Hal itu pada gilirannya akan mendorong timbulnya perubahan sosial. Apabila dicermati, kedua sudut pandang tersebut memiliki kebenaran masing-masing.

Karena itu keduanya memiliki pandangan yang saling melengkapi dalam memahami fungsi kebudayaan. Atas dasar kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan setidaknya memiliki fungsi untuk mempersatukan masyarakat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan mendorong terjadinya perubahan masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi kebudayaan dapat ‘mempersatukan masyarakat’ umumnya makin problematis. Hal itu karena masyarakat sekarang cenderung merupakan masyarakat beragam budaya.

Tak jarang yang terjadi, kebudayaan bukannya mempersatukan masyarakat, tetapi malah memecah belah masyarakat. Karena itu, tantangan masyarakat sekarang adalah bagaimana membuat agar kebudayaan bisa berfungsi mempersatukan masyarakat di tengah kondisi keragaman kebudayaan. Menurut Herskovits dalam Setiadi dkk.¹⁷ kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,

¹⁶Setiadi, Elly M. dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: kencana, 2007), h. 29.

¹⁷Setiadi, Elly M. dkk, *Ilmu...*, h. 37.

norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain.

Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia. Budaya akan terus berkembang karena kemampuan manusia untuk belajar sehingga merupakan pola hidup menyeluruh dan bersifat kompleks yang terbentuk dari berbagai unsur yang rumit di antaranya sistem agama, kemasyarakatan, adat istiadat, bahasa, teknologi, kesenian, serta pengetahuan. Dengan demikian kebudayaan lebih dari sekedar kesenian atau adat istiadat saja, tetapi meliputi bidang yang tiada terbatas.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keanekaragaman budaya dimaknai sebagai proses, cara atau pembuatan menjadikan banyak macam ragamnya tentang kebudayaan yang sudah berkembang. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan bermasyarakat memiliki corak kehidupan yang beragam dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Menurut Koenjaraningrat¹⁸ akulturasi dapat di definisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun di terima dan di olah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (Convorculture), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (Onvorculture). Convorculture misalnya: sistem nilai-nilai budaya, keyakinan-keyakinan keagamaan yang di anggap keramat, beberapa

¹⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II Pokok-Pokok Etnografi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 233.

adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat dan beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan onvorculture misalnya kebudayaan fisik seperti alat-alat dan bendanya yang berguna, juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan.

F. Agama Islam Sebagai Sistem Nilai dan Simbol

Agama Islam sebagai Sistem Nilai dan Simbol Alqur'an dalam surah al-Baqarah ayat 148 mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan tentang sifat Islam yang antiplural, sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam Alqur'an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan dan konflik dengan agama-agama lain, selama mereka tidak saling memaksakan.

Selanjutnya di dalam Islam kita mengenal adanya konsep tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan bahwa manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Nya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan manusia tak lain kecuali menyembah kepadaNya. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah. Inilah merupakan kunci dari seluruh ajaran Islam.¹⁹ Dengan kata lain, di dalam Islam, konsep mengenai kehidupan berpusat kepada Tuhan. Sistem nilai tauhid mendasarkan diri pada pandangan semacam ini.

Menurut Islam, manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, atau disebut sebagai

¹⁹Deni Miharja, *Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia*, *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014, h. 197-198.

humanisme teosentris yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Dari tema inilah muncul sistem simbol, sistem yang terbentuk karena proses dialektik antara nilai dan kebudayaan. Misalnya dalam Alqur'an, kita mengenal adanya rumusan amr ma'ruf nahyi munkar, yaitu perintah untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dari rumusan itu kita bisa melihat adanya dua proses yang sekaligus berlawanan tetapi sekaligus merupakan satu kesatuan: emansipasi dan pembebasan. Dalam konteks ini seluruh sistem simbol yang muncul dari rumusan amr ma'ruf nahi munkar ditujukan untuk serangkaian gerakan pembebasan dan emansipasi. Nahi munkar, atau mencegah kemungkaran berarti membebaskan manusia dari semua bentuk kegelapan (zhulmat) dalam berbagai manifestasinya.

Dalam bahasa ilmu sosial ini juga berarti pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan. Sementara, amr ma'ruf yang merupakan langkah berangkai dari gerakan nahi munkar, diarahkan untuk mengemansipasikan manusia kepada amr, kepada cahaya petunjuk Ilahi, untuk mencapai keadaan fitrah. Fitrah adalah keadaan di mana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia. Dari nilai inti humanisme teosentris, Islam telah menginspirasi lahirnya gerakan pembebasan dan emansipasi.

Tapi kendatipun demikian, gerakan pembebasan dan emansipasi ini sesungguhnya juga tumbuh dari suatu prinsip dialektis lain yang disebut tazkiyah. Tazkiyah adalah usaha rasional manusia beriman yang berorientasi filosofisnya adalah humanisme teosentris untuk selalu membersihkan diri atau meningkatkan kualitas ruhaninya secara terus menerus. Demikian pula dengan ekspresi simbolis dari karya-karya Muslim, seperti kesenian, kesusastraan dan hasil-hasil budaya lainnya, pada dasarnya juga mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sentral Islam itu melalui prinsip tazkiyah.²⁰

²⁰Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 229-230.

Islam menjadi nilai sangat penting bagi wilayah pengembangan kebudayaan, Islam bisa dilihat dari sejarah maju mundurnya pada masa pembaharuan dalam sejarah, Islam sangatlah menjadi titik utama bagi pengkajian-pengkaji kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan sering dikaitkan dengan adanya sejarah Islam yang berada di wilayah tempat tersebut. Karena para pengembang Islam lari ke wilayah-wilayah yang diperlukan umat Islam untuk lebih maju, dan tidak mengabaikan budaya yang sedang berada di wilayah tersebut.

Maju mundurnya umat Islam dalam tataran historis sebagaimana telah disebut pembaharuan dalam Islam yang disebut modern dan mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam kepada kemajuan sebelum masuk ke dalam pokok masalah, ada baiknya diuraikan terlebih dulu sejarah Islam secara ringkas, bukan hanya untuk mengetahui waktu mulanya periode Modern itu, tetapi juga untuk melihat perkembangan maju mundurnya umat Islam yang terjadi dalam sejarah peradaban. Jika dilihat dari masa periode sejarah Islam, dapat dibagi ke dalam tiga periode besar yaitu: klasik, pertengahan dan modern.²¹

Islam merupakan agama yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Bukan itu saja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*). Islam mengandung dua unsur. Unsur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk. Unsur ibadah dan muamalah. Islam mempunyai kaidah, mengenai soal ibadah, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Islam memberikan dasar-dasar untuk mengatur hidup keduniaan yang bersifat abadi. Islam jika dilihat secara sejarah sejak kelahirannya, tersimpul dalam sabda Nabi Muhammad SAW., “Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak yang baik.”

²¹Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 4.

Maka jika Islam menjadi dasar negara, dengan sendirinya ia akan segera melihat dan memeriksa apa nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat.²² Islam datang dengan teguran Qur'an, "Janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan bermusuhan-musuhan." Islam mengatur nilai dalam tatanan hidup bagi manusia dengan nilai demokrasi atau musyawarah.²³ Islam hanyalah salah satu sekian mata rantai peradaban umat manusia. Oleh karena itulah, sumbangan Islam harus diberikan dalam kerangka kebersamaan dengan semua pihak, bukan menyendiri di luar sejarah. Islam memperlihatkan pertalian dengan pandangan hidup lainnya dalam tatanan universal.

Sejarah Islam merupakan masa berkembangnya pemikiran yang paling subur yang pernah dilalui alam pikiran budaya manusia. Ia melahirkan pemikiran di segala bidang pemikiran budaya yang masa kini masih tetap hidup dan berkembang memengaruhi alam pikiran sikap dan perilaku umat Islam. Islam bukan hanya pencipta perkembangan politik, ekonomi sosial yang luar biasa dalam sejarah, tetapi juga pencipta alam pikiran keilmuan dan filsafat. Ia melahirkan dan mengembangkan pemikiran keagamaan yang berdasarkan wahyu, juga pemikiran yang berkaitan dengan filsafat dan ilmu pengetahuan kemanusiaan pada umumnya.

Jadi budaya Islam di samping mengembangkan pemikiran agama, juga mengembangkan segala aspek pemikiran kemanusiaan yang menghidupkan dan memberikan fasilitas pada warisan sebelum Islam. Islam lahir di Semenanjung Arabia pada abad ke-6 Masehi. Pada awal kehadirannya, ia mengalami hambatan kultur sebab lahir di tengah masyarakat nomaden dan tidak berperadaban (*vacuum cultural*). Dalam perkembangan selanjutnya, penyebaran telah menakjubkan para ahli sejarah. Sebab, dalam jangka yang relatif pendek Islam telah dianut oleh penduduk yang mendiami setengah wilayah dunia.

²²Mohammad Nasir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: SEGAR ARSY, 2004), h. 60.

²³Deni Miharja, *Persentuhan...*, h. 199.

Oleh karena itu, sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap, Islam memberi tempat pada dua jenis penghayatan keagamaan. Pertama, eksoterik (zahiri), yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi pada formalitas atau pada norma dan aturan-aturan keagamaan yang ketat. Kedua, esoterik (bathini), yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi dan menitikberatkan pada inti keberagamaan dan tujuan beragama.²⁴

Islam diakui sebagai agama yang ajarannya mengandung muatan universal, yang mencakup sebagai dimensi, baik dimensi-dimensi lainnya. Karena keuniversalitasannya tersebut, ketika berbicara soal aliran Islam dan wacana sosial, kerap kali kita berjumpa dengan pembicaraan tentang bagaimana universalitas Islam tersebut dapat ditransformasikan dalam kehidupan manusia. Berbagai format alternatif pun kemudian dimunculkan oleh para pemikir muslim.²⁵

²⁴Dadang Kahmad, *Tarekat Dalam Islam: Spiritualitas Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 63-64.

²⁵Muhtar Solihin, *Prinsip-prinsip Dasar Pemikiran Keislaman*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 169.

REFERENSI

- Agus Akhmadi, Religious Moderation In Indonesia's Diversity, dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019.
- Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi : Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, vol .36, No. 1 (Agustus 2013).
- Dadang Kahmad, *Tarekat Dalam Islam: Spiritualitas Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Deni Miharja, Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia, *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014.
- Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010).
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).
- Joni Tapingku, *Moderasi Beragama Sebagai Perekat Dan Pemersatu Bangsa*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021) Disampaikan Pada Pembukaan Kuliah Semester Gasal 2021/2022.
- Kementerian PPN/Bapenas. 2020. Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II Pokok-Pokok Etnografi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991).
- Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Mohammad Nasir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: SEGAR ARSY, 2004).
- Muhtar Solihin, *Prinsip-prinsip Dasar Pemikiran Keislaman*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003).
- Setiadi, Elly M. dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: kencana, 2007).
- Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYA", Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019).

Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Umat Beragama

(Muhammad & Mufassirin)



A. Latar Belakang

Agama membawa peraturan yang menjadi hukum yang harus dipatuhi setiap penganutnya. Agama kemudian menguasai diri seseorang membuat ia patuh dan tunduk kepada Tuhan dengan cara menjalankan ajaran agama tersebut. Agama selanjutnya membawa kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang, jika tidak maka menjadi hutang baginya.¹ Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa melalui ajaran dan peraturannya, agama bisa membuat manusia patuh kepada tuhan. Agama mengatur manusia dalam segala aspek, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia maupun manusia dengan alam sekitarnya. Agama juga memberikan bimbingan kepada manusia tentang kehidupan umat beragama yang damai dan toleran terhadap sesama. Dalam kondisi umat beragama yang tengah terjadi saat ini, peran tokoh agama harus mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Bersama dengan itu pula saran, tindak lanjut terhadap pemerintah maupun lembaga keagamaan yang berwenang dari para tokoh agama ini sangat diperlukan.

Pelibatan tokoh agama ini karena tokoh agama secara esensial memiliki dua fungsi keagamaan yang cukup sentral yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan ajaran Agama. Fungsi pemeliharaanmaksudnya adalah tokoh agama memiliki hak dan wewenang untuk memimpin ritual keagamaannya. Karena fungsi pemeliharaan inilah maka tokoh agama akan selalu mengajarkan

¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 188.

kepada pengikutnya untuk melakukan ritual agama secara benar dan berperilaku sesuai dengan ajarannya.

Sedangkan dengan fungsi pengembangan ajaran tokoh agama akan berupaya melakukan misi dakwah untuk menyiarkan agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya. Melalui fungsi ini setiap agama memungkinkan untuk dapat hidup dan berkembang. Tokoh agama harus bisa memberdayakan umat beragama agar memiliki daya tangkal terhadap gerakan keagamaan yang transnasional yang tidak sejalan dengan kultur dan nilai ajaran agama yang ada di Indonesia, membina dan mengembangkan sikap kerukunan dan keharmonisan dalam kerukunan antar dan intern umat beragama.

Dalam kehidupan beragama, perbedaan pemahaman agama bahkan pandangan yang menyalahi dari konsep agama yang sebenarnya sudah sering kita temui. Pengamalan keagamaan yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan agama juga merupakan permasalahan yang sering mewarnai kehidupan umat beragama. Fenomena serupa seperti banyak yang mengaku Islam tetapi sikap dan tingkah lakunya tidak mencerminkan pribadi seorang muslim juga sering terjadi, “Bahkan ada yang mengira dirinya telah berpegah kepada ajaran asli dari Allah padahal ia hanyalah berpegang kepada kitab karangan manusia”.²

Disinilah letak pentingnya peranan para tokoh agama untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kesadaran umat beragama kepada masyarakat, seperti memberikan penjelasan tentang ajaran agama yang benar disertai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, melalui dakwah, serta sosialisasi-sosialisasi keagamaan yang bekerjasama dengan pihak tertentu untuk dapat meningkatkan kesadaran keagamaan kepada umat beragama. Munculnya

²Berlian Somad, *Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 12.

kesadaran beragama pada umumnya didorong oleh adanya keyakinan keagamaan yang merupakan keadaan yang ada pada diri seseorang.

Kesadaran beragama merupakan konsistensi antara pengetahuan dan kepercayaan pada agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif (perasaan ini bisa dilihat dari motivasi beragama seseorang), dan perilaku keagamaan sebagai unsur psikomotor. Oleh karena itu, kesadaran beragama merupakan interaksi secara kompleks antara pengetahuan agama, motivasi beragama, dan perilaku keagamaan dalam diri seseorang. Dengan kesadaran itulah akhirnya lahir tingkah laku keagamaan sesuai dengan kadar ketaatan seseorang terhadap agama yang diyakininya.

B. Pengertian Status, Peran Dan Tokoh Agama

Pemuka agama, kiai atau ustadz, romo atau pastor, dalam kehidupan social memiliki peran dan pengaruh penting. Peranan penting di sini karena pemuka agama dalam stratafikasi atau struktur sosial menempati posisi atau status sebagai pemimpin (informal) dalam hal sosial keagamaan tanpa perlu adanya sebuah prosesi pengangkatan. Masyarakat memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap pemuka agama karena kapasitas keilmuan agamanya dan moralitasnya. Peran di sini lahir karena posisi atau status yang melekat pada pemuka agama atau seseorang dalam struktur sosialnya.

Dengan demikian, kedudukan (status) dengan peranan tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling bergantung. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social. Tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau tak akan ada kedudukan tanpa peranan. Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Peran diartikan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang (pemuka agama) dalam posisinya. Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam status sosialnya disebut sebagai peranan.

Menurut Levinson, seperti dikutip Soerjono Soekanto, posisi merupakan unsur statis yang hanya menunjukkan tempat individu dalam kelompok masyarakat. Sedangkan peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi seseorang dengan mencakup tiga hal.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³

Sedangkan pengertian pemuka atau tokoh agama, seperti yang tertera pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. Kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan Tokoh sebagai orang yang terkemuka dan ternama dalam bidang yang di kuasainya. Orang yang berhasil dibidangnya dan memiliki karya-karya monumental serta mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitar bisa disebut dengan tokoh. Pengertian tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu Agama yang mumpuni, amal dan ahklak sesuai dengan ilmunya. Bila ditinjau dari sudut pandang masyarakat Islam seorang tokoh dapat disebut dengan Tokoh Agama Islam.

³Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers ; Raja Grafindo Persada, 2013), h. 24.

Sedangkan pengertian agama yang dikemukakan Syahminan Zaini, kata “agama” berasal dari bahasa sang sekerta yang terdiri atas dua kata, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa “Agama atau ajaran merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Buddha”. Harun Nasution⁴ mengatakan bahwa: Agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.⁵

Dalam analisa Kartini Kartono, pemuka agama bisa dikategorikan sebagai pemimpin informal yang tidak perlu pengangkatan formal, namun karena sejumlah kualitas unggul yang dimilikinya sehingga mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini, sebagai pemimpin informal, pemuka agama didasarkan atas akseptasi atau pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pemuka agama dengan sejumlah kualitas pribadinya, yakni kualitas keilmuan agamanya moralitasnya dan juga atas dasar penerimaan dan penghormatan dari masyarakat atau kelompok umat beragama, cenderung memiliki kharisma.

Istilah kharisma erat kaitannya dengan teologi dan menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada seseorang sebagai pemimpin agama. Artinya, kharisma ini menyangkut bakat rahmat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu sebagai pemimpin agama.⁶ Kharisma ini digunakan oleh Weber untuk menggambarkan pemimpin-pemimpin agama di mana dasar dari

⁴Harun Nasution, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 12.

⁵Harahap, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007), h. 854.

⁶Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), h.169.

kepemimpinan itu adalah kepercayaan dari masyarakat bahwa pemuka atau pemimpin agama memiliki suatu hubungan khusus dengan ilahi, atau mampu mewujudkan karakteristik- karakteristik ilahi itu sendiri.⁷

Dalam analisa Weber, istilah kharisma akan diterapkan pada suatu mutu tertentu yang terdapat pada keperibadian seseorang, yang karenanya terpisah dari orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi dengan kekuasaan atau mutu yang bersifat adiduniawi, luar biasa, atau sekurang-kurangnya merupakan kekecualian dalam hal-hal tertentu.⁸ Pemuka agama Katolik, dalam istilah bahasa Indonesia, disebut dengan istilah romo atau pastor, padri atau bapak. Istilah panggilan bapak ini juga merujuk pada penggunaan dalam bahasa Jawa.

Tetapi umat Katolik yang tinggal di luar Pulau Jawa biasa memanggil dengan sebutan Pastor. Sebutan bapak juga didasarkan pada 1 Korintus 4:15 dan 1 Tesalonika 2:11-12. Untuk istilah Pastor dalam Efesus 4:11 disebut dengan gembala. Secara khusus dalam Al Kitab menyebut istilah gembala dalam dua hal. Pertama, Gembala dikaitkan dengan tugas memelihara ternak (Kejadian 4:2, 29:9, 37:2 ; 1 Samuel 16:11, 17:15, Kel 22:5, 33:1, Lukas 2:8), dan kedua, gembala dipandang sebagai pemimpin (2 Samuel 5:2, 1 Raja-raja 22:17, Yeremia 3:15, Zak 10:2, 11:6, Bilangan 27:17, Yehezkiel 13:15, 34:23,31; Mikha5:4). Pemuka agama dalam Islam biasa disebut dengan panggilan kiai atau ustadz. Sebutan ini merujuk pada kata sapaan untuk seseorang yang pandai dalam ilmu agama Islam (alim ulama) atau guru agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia kiai dianggap sebagai orang yang memiliki kepandaian dalam ilmu keagamaan dan dianggap paling berwewenang (punya otoritas) dalam menafsirkan hal-hal yang bersifat keagamaan.

⁷Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rineka Pers, 2008), h. 42.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 124.

C. Pengertian Kesadaran Beragama

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran berarti perasaan mengetahui dan memahami, mengetahui atau mengingat (keadaan sebenarnya), dan memahami kesadaran.⁹ Dalam penjelasan yang lain, kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yang mempunyai arti; merasa, tahu dan ingat kepada keadaan yang sebenarnya, ingat kembali dari pingsan dan sebagainya, bangun tidur, insaf, tahu dan mengerti. Kesadaran berarti; keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.¹⁰

Kesadaran adalah pemahaman lengkap tentang identitas seseorang yang memungkinkan tindakan dan perilaku yang fleksibel berdasarkan kemampuan dan keterbatasan alami seseorang. Adapun kata agama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, terdiri dari (a= tidak; gam= pergi) mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun. Berdasarkan penjelasan diatas menurut Harun Nasution, intisarinnya adalah ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan harus dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap melalui panca indera, namun memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.¹¹

Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa- raga manusia, maka kesadaran bergama pun mencakup aspek-aspek afektif, kognitif dan motorik. Keterlibatan fungsi afektif terlihat didalam pengalaman ke-Tuhanan, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif nampak dalam keimanan dan kepercayaan.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi 3), (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 205.

¹⁰Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2009), cet. IV, h. 727.

¹¹Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Cet III, h.12.

Sedangkan keterlibatan fungsi motorik nampak dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, aspek-aspek tersebut sukar dipisahkan karena merupakan suatu sistem kesadaran beragama yang utuh dalam kepribadian seseorang. Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi. Disamping itu dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau aktivitas agama; sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dan kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.

Dalam kesadaran beragama dan pengalaman beragama, menggambarkan sisi batin seseorang yang terkait dengan sesuatu yang sakral dan dunia ghaib. Dari kesadaran dan pengalaman agama tersebut, muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan ketaatannya pada agama yang dianutnya. Sikap tersebut muncul karena adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif. Jadi sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan, perasaan serta tindak keagamaan dalam diri seseorang. Pencapaian kesadaran beragama dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor psikologis, individu yang memiliki jiwa yang tidak sehat maka internalisasi nilai-nilai agama dalam dirinya tidak dapat diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Individu tersebut belum dapat menselaraskan antara nilai-nilai agama dengan tingkah laku dan perbuatannya, oleh karena itu jiwa yang tidak sehat akan mengurangi rasa keberagamaannya.
2. Faktor umur, individu yang memasuki usis remaja dan dewasa akan dapat memiliki rasa kesadaran beragama yang tinggi disebabkan saat

memasuki usia ini biasanya individu tersebut memiliki semangat pencarian terhadap nilai-nilai kebenaran agamanya yang sangat tinggi.

3. Faktor kelamin, individu yang berjenis kelamin laki-laki lebih memiliki rasa kesadaran beragama dibanding wanita. Hal ini disebabkan adanya tuntutan masyarakat yang membuat laki-laki menjadi lebih aktif, mandiri dan kompetitif, sementara wanita menjadi pasif tergantung dan konformis.
4. Faktor pendidikan dan kecerdasan, seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi akan mampu merefleksikan nilai-nilai keagamaan yang diyakini kebenarannya pada kehidupannya sehari-hari.

Kesadaran beragama menurut Zakiah Darajat yaitu, aspek mental dari aktivitas agama. Aspek ini merupakan bagian dari agama yang terasa hadir dalam pikiran dan dapat diuji dengan cara introspeksi. Dengan adanya kesadaran agama dalam diri seseorang yang akan ditunjukkan melalui aktivitas keagamaan, maka munculah pengalaman beragama. Adapun yang dimaksud dengan pengalaman beragama ialah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan dalam tindakan (amaliah) nyata.¹²

D. Aspek-Aspek Kesadaran Beragama

- 1) Aspek Kesadaran
 - a. Pemujaan atau pengalaman spiritual

Pemujaan adalah suatu ungkapan perasaan, sikap dan hubungan. Menurut Malinowski sebagaimana yang dikutip oleh Thomas F. ODea bahwa; perasaan, sikap dan hubungan ini diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam dirinya sendiri, mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan. Sedangkan pengalaman spiritual mempunyai nilai miseri yang terkait dalam

¹²Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), cet. 9, h. 7.

dirinya sehingga kita tidak dapat menalarannya secara penuh. Hubungan yang diungkapkan dalam pemujaan maupun pengalaman spiritual tersebut merupakan hubungan dengan obyek suci.¹³

Sehingga dalam hubungannya dengan sesuatu yang suci tersebut dapat membangkitkan daya pikirannya yang selanjutnya mereka menghayati dan meyakini bahwa ada sesuatu yang obyektif bersifat suci untuk dijadikan sebagai tempat dan tujuan pengabdian diri. Kesadaran ini timbul akibat adanya ungkapan perasaan, sikap dan hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap suci.

b. Hubungan sosial

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transedensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam, dan manusiapun membutuhkan sesuatu yang mentransedensi pengalaman untuk kelestarian hidupnya, karena:

1. Manusia hidup dalam ketidakpastian, sebagai hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia di luar jangkauannya. Dengan kata lain eksistensi manusia ditandai dengan ketidak pastian.
2. Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi kondisi hidupnya, walaupun kesanggupan tersebut semakin meningkat. Pada titik dasar tertentu, kondisi manusia dalam kondisi konflik antara keinginan diri dengan lingkungan yang ditandai oleh ketidakberdayaan.
3. Manusia harus hidup bermasyarakat, dan masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan

¹³Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.75.

ganjaran.¹⁴ Pengalaman manusia dalam konteks ketidakpastian dan ketidakberdayaan membawa manusia keluar dari perilaku sosial dan batasan cultural dari tujuan dan norma sehari-hari, maka sebagai konsekuensinya manusia harus mengembalikan ketidakpastian dan ketidakberdayaan tersebut kepada kesadarannya untuk menuntunnya dalam mentaati norma-norma masyarakat untuk menuntunnya dalam mencapai ketentraman hidupnya.

c. Pengalaman dan pengetahuan

Menurut Robert W. Crapps, bahwa kebenaran harus ditemukan, bukan hanya melalui argument logis dan teoritis, tetapi melalui pengamatan atas pengalaman maka jalan lapang menuju ke kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang. Kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang didapat dari pengalaman, sehingga proses kesadaran seperti ini adalah adanya perpindahan pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang dilaksanakan dengan secara konsisten dan konsekuen.¹⁵

d. Eksperimen

Eksperimen merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme. Kemiripan itu terletak pada usaha untuk menggali arti melalui pengamatan (observasi) dan penguraian perilaku secara teliti.¹⁶ Dalam penyelidikan empiris teori psikoanalisis tentang agama berusaha mengadakan secara eksperimental tiga hipotesis yang diambil dari psikoanalisis; bahwa bila teori analisis tentang perilaku keagamaan benar, maka prosedur eksperimen juga harus dapat menunjukkan sebagai berikut:

¹⁴Ramayulis, *Psikologi...*, h. 7-8.

¹⁵Robert W. Crapps, *Dialog Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 147.

¹⁶Thomas F. O'Dea, *Sosiologi...*, h. 124.

1. Bahwa semakin besar religiusitas seseorang, maka semakin besar kecenderungan seseorang untuk membuat proyeksi.
2. Bahwa perasaan dan konsep seseorang tentang Tuhan berkorelasi dengan perasaan dan konsep seseorang tentang orang tua mereka.
3. Bahwa orang laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar daripada orang perempuan dalam memandang Tuhan sebagai tokoh penghukum.¹⁷

Kesadaran juga dapat timbul dengan adanya eksperimen, dimana penghayatan dan pengalaman agama dapat terlaksana secara baik setelah seseorang yang beragama telah memandang dan mengakui kebenaran agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupannya, bahwa seseorang akan merasa damai dan tenteram dalam kehidupannya setelah mereka mendekati diri kepada sesuatu yang dipercayainya (Allah SWT) dan menyerahkan kembali segala persoalan yang dihadapinya hanya kepada-Nya daripada seseorang yang tak kenal agama. Hal ini akan membuktikan bahwa kesadaran akan muncul setelah seseorang mengetahui hasil dari eksperimen tentang agama tersebut benar-benar dirasakan sebagai suatu hal yang memang dibutuhkan dalam kehidupannya.

2) Dimensi Keagamaan

Menurut Glock dan Stark sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa mereka telah membagi dimensi keagamaan menjadi lima bagian, yaitu: dimensi ideologi, dimensi ritualistik, dimensi eksperensial, dimensi inetelktual, dan dimensi konsekeuensial.

a) Dimensi Ideologi

Bagian dari keberagaman yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar.

¹⁷Thomas F. O'Dea, *Sosiologi...*, h. 127.

Inilah yang membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Ada tiga kategori kepercayaan. Pertama, kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama, yaitu percaya adanya Tuhan dan utusannya dalam agamanya. Kedua, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan Ilahi dalam penciptaan manusia. Ketiga, kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk melaksanakan tujuan Ilahi tersebut, seperti orang Islam harus percaya bahwa untuk beramal shaleh mereka harus melakukan pengabdian kepada Allah SWT dan perkhidmatan kepada sesama manusia.¹⁸

b) Dimensi ritualistik

Dimensi ritualistic adalah dimensi keberagamaan yang berkaitan dengan sejumlah perilaku, yang dimaksud dengan perilaku disini bukanlah perilaku umum yang dipengaruhi keimanan seseorang melainkan mengacu kepada perilaku- perilaku khusus yang ditetapkan oleh agama, seperti tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, atau menjalankan ritus-ritus khusus pada hari-hari yang suci, seperti ritualistic dalam agama Islam adalah menjalankan sholat dengan menghadap kiblat berserta ruku' dan sujudnya.

c) Dimensi eksperensial

Dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau dalam psikologi dapat dikatakan dengan religious experiences. Pengalaman keagamaan ini bisa saja terjadi sangat moderat, seperti kekhusukan di dalam menjalankan shalat untuk agama Islam. Pengalaman keagamaan adalah suatu pengalaman mengenai kekuasaan atau kekuatan, pengalaman keagamaan juga merupakan tanggapan terhadap hal atau peristiwa yang dialami sebagai hal yang suci, yakni suatu pelepasan dari

¹⁸Jalauddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), cet. I, h. 43-44.

kekuasaan yang menanamkan suatu tanggapan tertentu yang sama-sama memadukan rasa hormat yang dalam dan daya tarik yang kuat.

d) Dimensi intelektual

Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya. Ilmu fikih dalam Islam menghimpun informasi tentang fatwa ulama berkenaan dengan ritus-ritus keagamaan. Sikap orang dalam menerima atau menilai ajaran agamanya berkaitan erat dengan pengetahuan agama yang dimilikinya. Orang yang sangat dogmatis tidak mau mendengarkan pengetahuan dari kelompok manapun yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.

e) Dimensi konsekuensial

Dimensi konsekuensial menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung dan secara khusus ditetapkan agama (seperti dalam dimensi ritualistic). Inilah efek ajaran agama pada perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Efek agama ini bias jadi positif atau negative baik pada tingkat personal maupun sosial.¹⁹ Dimensi ini mengacu pada kebutuhan manusia terhadap agama, bahwa pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kehidupan manusia yang penuh dengan persoalan ini harus dikembalikan kepada agama dalam penyelesaiannya agar ditemukan kedamaian dan kesejahteraan.

E. Konsep Kerukunan Umat Beragama

Istilah kerukunan, dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang multi agama dan kultur, mulai muncul dari pidato K.H. M. Dachlan sebagai Menteri Agama pada masa orde baru yang kemudian menjadi istilah baku dalam

¹⁹Jalauddin Rakhmat, *Psikologi...*, h. 46-47.

berbagai peraturan perundangan-undangan seperti Keputusan Presiden atau Keputusankeputusan Menteri Agama dan peraturan lainnya. Secara etimologis kata kerukunan berasal dari kata rukun.²⁰ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rukun memiliki arti sebagai berikut: rukun (adjective) berarti: baik dan damai; tidak bertengkar. Sedangkan kata kerukunan berarti (noun): perihal hidup rukun, rasa rukun. Jadi, kerukunan hidup umat beragama bisa diartikan sebagai hidup rukun dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar antar umat beragama.

Rukun, menurut Niels Mulder seperti dikutip oleh Franz Magnis Suseno berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, dan tanpa perselisihan dan pertentangan. Artinya, hidup rukun (umat beragama) atau yang disebut dengan keadaan rukun berarti semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Atau dalam pengertian sehari-hari. Pengertian dari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Bilamana kata kerukunan dipergunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun ditafsirkan sesuai tujuan, kepentingan dan kebutuhan.

Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah kerukunan sementara, politis dan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Jika musuh yang dihadapi bersama sudah tidak ada, maka keadaan akan kembali seperti semula, yakni kembali berkonflik. Kerukunan politis adalah kerukunan di mana biasanya terjadi dalam keadaan peperangan yang kemudian untuk sementara waktu mengadakan perdamaian atau bersepakat untuk melakukan gencatan senjata sampai waktu yang ditentukan. Kedua kerukunan ini merupakan kerukunan yang semu.

²⁰Akhmad Syarief Kurniawan, Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Islam, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 303-314, oct. 2013.

Sedangkan untuk kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama.²¹

Dengan demikian, kerukunan yang dibutuhkan oleh segenap umat beragama adalah kerukunan hakiki, bukan kerukunan semu, tetapi kerukunan murni yang mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh dan hipokrisi yang dilandasi dan dijiwai oleh ajaran agama masing-masing. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kerukunan umat beragama mengandung beberapa unsur penting yaitu: *Pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. *Ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya dan *Keempat*, kemauan untuk saling menghormati dan bekerjasama. Kerukunan itu bisa muncul dalam dua aspek yang saling terkait sebagai bagian dari konsep kerukunan.

Aspek *pertama* adalah kerukunan yang bersifat eksklusif, yaitu meyakini secara absolut kebenaran ajaran agama yang dianut dan dipilihnya sebagai jalan hidup tanpa membuka diri terhadap kebenaran lain. Artinya, setiap orang punya hak dan kebebasan yang sama dalam memilih dan menentukan keyakinannya tanpa kemudian saling mempertentangkan klaim kebenaran ajaran agama masing-masing. Dengan demikian, tidak tepat jika kemudian ada upaya untuk membujuk, apalagi memaksa, orang yang berbeda keyakinan untuk percaya dan pindah terhadap kepercayaan dan keyakinan yang lain. Karena keyakinan terhadap ajaran agama tidak mungkin muncul dan tercipta karena adanya sebuah bujukan dan paksaan, namun lahir dari kepercayaan dan keyakinan yang mendalam dan sungguh-sungguh.

²¹Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997).

Aspek *kedua* adalah kerukunan yang bersifat inklusif, yaitu perilaku keberagamaan yang dilandasi oleh perasaan yang penuh menghormati, menghargai, dan membebaskan dan bahkan saling mendukung orang lain mengamalkan keyakinannya. Bahkan dengan hal ini bisa ikut merasakan kekhusyuk atau kesahduan orang lain dalam mengamalkan ajaran agamanya. Sedangkan untuk konsep kerukunan umat beragama yang secara resmi digunakan oleh pemerintah mencakup tiga kerukunan, yaitu: Kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.

Konsep kerukunan ini dikenal dengan istilah Trilogi Kerukunan yang dicetuskan pertama kali oleh Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara. Tentunya, kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada pertentangan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Namun kerukunan itu adalah hubungan harmonis dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud:

1. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
2. Saling menghormati dan bekerja sama intern pemeluk agama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggungjawab membangun Bangsa dan Negara.
3. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

Kerukunan atau keadaan hidup rukun umat beragama itu harus dikehendaki secara sadar dan bebas tanpa ada paksaan.²² Setiap orang terdorong oleh semangat kerukunan yang sungguh-sungguh, atau memang ingin rukun, butuh hidup damai dan tenang, bukan karena sekedar ingin dikatakan rukun.

²²Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta, Puslitbang, 2008).

Kerukunan tidak berhenti asal tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan, tetapi harus tampak dalam sebuah bentuk kerjasama. Kerjasama ini tercipta melalui sebuah interaksi, terbina melalui komunikasi yang akrab. Sehingga kemudian terbentuk kerjasama yang saling membutuhkan dan menguatkan. Kerukunan semacam ini merupakan kerukunan yang dinamis dan fungsional. Kerukunan ini dilandasi dengan semangat kerukunan sejati, bukan kerukunan yang pura-pura atau semu.

F. Konsep Konflik Umat Beragama

Dalam kehidupan sosial (umat beragama), konflik bersifat inhern sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari realitas kehidupan. Konflik senantiasa ada dalam setiap waktu, di mana saja dan kapan saja. Oleh karenanya, konflik dan kerukunan merupakan gejala yang selalu ada dalam kehidupan umat beragama. Munculnya konflik dan kerukunan didorong karena adanya perbedaan dan persamaan kepentingan. Apalagi manusia dipersepsi sebagai makhluk konfliktris (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela ataupun terpaksa.

Konflik, secara etimologis, berasal dari bahasa latin, *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan hal lainnya yang melibatkan dua pihak atau lebih. Secara sederhana, konflik diartikan sebagai perselisihan atau pertentangan antara dua pihak (*individu* atau *kelompok*) di mana salah satu pihak atau semua pihak sama-sama ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.²³

Konflik itu terjadi, secara garis besar disebabkan oleh: *Pertama*, Kemajemukan Horizontal, di mana struktur masyarakat yang majemuk dari segi

²³Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2), 217–228

agama, etnis, ras dan budaya menjadi penyebab terjadinya konflik karena masing-masing ingin mempertahankan identitas dan karakteristiknya masing-masing. Dalam konstruk masyarakat yang demikian ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik dapat menimbulkan kekerasan dan peperangan. *Kedua*, Kemajemukan Vertikal, di mana dalam struktur masyarakat ada polarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan.

Kemajemukan vertikal bisa menimbulkan konflik karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar sementara sebagian besar yang lain sebaliknya. Artinya, akses dan distribusi sumber-sumber nilai yang tidak merata menyebabkan kepincangan di dalam masyarakat dan menyebabkan terjadinya konflik. Konflik umat beragama menjadi bagian dari berbagai macam konflik yang terjadi dalam konteks ke-Indonesia-an.

Konflik umat beragama diartikan dengan terjadinya ketegangan dan kekerasan menyangkut persoalan agama atau simbol-simbol agama yang berakibat pada kerusakan fisik dan jatuhnya korban jiwa. Konflik yang kerap mewarnai dinamika kehidupan umat beragama di Indonesia dari awal Orde Baru hingga Reformasi adalah persoalan perjumpaan Islam dan Kristen/Katolik yang dinamis dan fluktuatif. Konflik berawal dari kecurigaan dan kebencian antar kedua agama terkait persoalan kristenisasi atau penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah di daerah-daerah yang diasosiasikan dengan identitas agama tertentu.

Misalkan daerah Aceh diasosiasikan dengan Islam, Papua dengan identitas Kristennya, atau Suku Madura dengan Identitas Islamnya. Kerentanan yang awalnya hanya dipicu oleh segregasi social berbasis etnis, kemudian dipertajam dengan segregasi sosial berbasis identitas etnis yang diasosiasikan dengan agama tertentu. Kondisi inilah yang mewarnai konflik Islam-Kristen sejak awal Orde Baru hingga era Reformasi, bahkan dalam kondisi Indonesia kekinian.

Ma`ruf Amin menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik antar umat beragama, secara mendalam disebabkan oleh dua hal; *pertama*, lemahnya ideology kerukunan dalam salah satu atau masing-masing umat beragama sehingga mempengaruhi cara pandang dan sikap terhadap agama lain dengan pola curiga, menuduh, dan mendeskreditkan, bahkan menyingkirkan. *Kedua*, penyiaran agama sebagai salah satu bentuk provokasi dan distorsi terhadap ajaran agama lain. Sehingga mengakibatkan terjadinya efek balik dari umat agama lain yang Terprovokasi.

Lebih jauh disebutkan, bahwa konflik antar umat beragama atau konflik yang bernuansa agama yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemahaman keagamaan yang literal dan radikal, kepentingan politik dan ekonomi, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, salah faham informasi di antara pemeluk agama, tidak efektifnya penegakan hukum dan juga kurangnya pengembangan sistem pencegahan konflik secara dini.

Ini menegaskan bahwa konflik yang melibatkan umat beda agama yang terjadi di Indonesia semua tidak disebabkan oleh akar tunggal yakni agama, namun dari akar serabut yang dipicu oleh banyak faktor, seperti kepentingan politik kelompok tertentu, kepentingan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan konflik yang disebabkan oleh faktor agama terkait pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama, serta hal lain yang menyangkut persolan dan simbol agama.²⁴

²⁴Anwar Hafidzi, Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia, Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019), h. 51-61.

REFERENSI

- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rineka Pers, 2008).
- Akhmad Syarief Kurniawan, Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 303-314, oct. 2013.
- Anwar Hafidzi, Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia, *Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2* (2019).
- Berlian Somad, *Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).
- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Harahap, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007).
- Harun Nasution, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985).
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Cet III.
- Jalauddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), cet. I.
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).
- Robert W. Crapps, *Dialog Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers ; Raja Grafindo Persada, 2013).

- Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta, Puslitbang, 2008).
- Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2009), cet. IV.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2).

DAFTAR PUSTAKA



- A.Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1992.
- Abdol Karim Soroush, "Jenis-jenis Religiositas", *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam*, Vol. 2 No.4, 2001.
- Abdul Munir Mulkhan, *Sufi Piinggiran: Menembus Batas-Batas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001).
- Abdullah Idi, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rineka Pers, 2008).
- Adeng Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer Suatu Refleksi Keagamaan Yang Dialogis* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Agus Akhmadi, Religious Moderation In Indonesia's Diversity, dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019.
- Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi : Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, vol .36, No. 1 (Agustus 2013).
- Ahmad Norma Permata, (ed.). *Metodologi Studi Agama*, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Tafsir, *Berjalan Menuju Langit*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012).
- Akhmad Syarief Kurniawan, Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 303-314, oct. 2013.
- Alfred Schutz, *On Phenomenology and Social Relation*, Edited and with Introduction by Helmut R. Wagner, (Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1970).
- Ali Imran, *Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat*, dalam *Jurnal Hikmah*, Vol. II, No. 1 (Januari-Juni 2015).

- Ali Imron, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol. 5 No.1 Tahun 2011.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. I. (Bandung: Mizan,1999).
- Anand Khrisna, *Islam Esoteris: Kemuliaan dan Keindahan*, (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Anwar Hafidzi, *Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia*, Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019).
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000).
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*. cet. I. (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Agama, *Moderasi Beragama*. (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Berlian Somad, *Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).
- Bernard Raho, *Agama Dalam Perpektif Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Obor, Cet. I, 2003).
- Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Cliffort Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Jogyakarta: Kanisius, 1992).
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- *Tarekat Dalam Islam: Spiritualitas Masyarakat Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Deni Miharja, *Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia*, *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014.
- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997).

- , *Ilmu Perbandingan Agama, Proyek Pembinaan PT/LAIN*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1981).
- Departemen Agama RI, *Bingkai Teologi*, Proyek Kerukunan Umat Beragama, 1979.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010).
- Elizabeth K, Nottingam, *Religion And Society*, ter, Adbul Muis Naharong, Cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip, “*Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecabannya*”, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Fachry Ali dan Bahtiar Efendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986).
- Fadilla Mutmaina, *Fungsi Lembaga Keagamaan Dalam Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Wahdah Islamiyah*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2022).
- Fahrurrozi, *Ekspresi Keberagaman Masyarakat Islam Indonesia: Mozaik Multikulturalisme Indonesia* , dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015.
- Faiqah, Nurul dan Toni Pransiska. 2018. “Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018.
- Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- , *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).

- George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 5.
- Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Cet V (Jakarta: Jaha Masagung, 1993).
- Hamid Fahmy Zarkasyi, “*Islam: Toleransi Tanpa Pluralisme*”, *Insists*, Ahad, 12 November 2017.
- Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam, (Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis)*, (Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), Cet. I, 2009).
- Harahap, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007).
- Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, Kanisius, Jakarta, 1989.
- Hartono Ahmad Jaiz, *Faham dan Aliran Sesat di Indonesia*, (Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Harun Nasution, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- , *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985).
- , *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Cet. Kesembilan, (Jakarta: Kanisius, 1993).
- Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Idrus Ruslan, *Lembaga-Lembaga Keagamaan*, (Bandar lampung: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014).
- Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Jajat Burhanuddin, “The Pragmentation of Religious Authority: Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia” dalam *Studia Islamica*, Vol 11. No. 1 2004.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Cet III.
- Jalauddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), cet. I.

- Jamal A. Badawi, “*Hubungan Antaragama: Sebuah Perspektif Islam*”, dalam Franz Magnis Suseno, et.al., *Memahami Hubungan Antaragama*, terj. Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007).
- James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984).
- John L. Esposito, *Islam The Straight Path*, (New York: Oxford University Press, 1988).
- Joni Tapingku, *Moderasi Beragama Sebagai Perikat Dan Pemersatu Bangsa*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021) Disampaikan Pada Pembukaan Kuliah Semester Gasal 2021/2022.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Jakarta, 1983.
- Kadek Hengki Primayana, Putu Yulia Angga Dewi Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital “*Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*”, Volume 19, Nomor 1. 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian PPN/Bapenas. 2020. Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1993).
- , *Pengantar Antropologi II Pokok-Pokok Etnografi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991).
- Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010).
- L. Rudy Rustandi, Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital, dalam *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 1, (2020).

- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2018, *Moderasi Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Publishing Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2019).
- Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Intermasa, 1992).
- M. Akmansyah, Membangun Toleransi Dalam Perspektif Pendidikan Spiritual Sufistik, dalam *Kalam*, Volume 10, No. 2, Desember 2016.
- M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1988).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1992).
- , *Membumikan Al-Quran*, cet. II, (Jakarta: Miza, 1992).
- , dkk. *Atas Nama Agama*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1998.
- M. Rusli Karim, *Agama Modernisasi dan Sekulerisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Margareth Drabble, *The Oxford Companion to English Literature*, Oxford University: Oxford, 1998.
- Mawardi, dkk, *Manajemen Lembaga Keagamaan*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019).
- Media Zainul Bahri, *Esoterisme dan Kesatuan Agama-Agama dalam Jurnal Titik Temu*, Volume 2, No 1 Juli Desember 2009.
- Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan*, (New York: Harper and Row Publ, 1957).
- Mohammad Nasir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: SEGAR ARSY, 2004).
- Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), h.19.
- Muhtar Ghazali Adeng, *Agama dan Keberagamaan dalam Kontek Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Muhtar Solihin, *Prinsip-prinsip Dasar Pemikiran Keislaman*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

- Mun'im A. Sirri. (ed), *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004).
- Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Norman Geisler & Corduan Winfried, *Philosophy of Religion*, (Michigan: Grand Rafids, 1988).
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Pandji Anoraga, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Cet I (Jakrta: Rineka Cipta, 1997).
- Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.
- Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the sociology of Knowledge*, (New York: Anchor Books, 1967).
- , *The Sacred Canopy: Element of a Sociological Theory of Religion*, (New York: Anchor Books, 1969).
- Rahmat Yani, *Manajemen Pembinaan Keagamaan Panti Asuhan*, (Banda Aceh: (UIN Ar-Raniry, 2018).
- Raimundo Panikar, *Dialog Intra Religius*, Kanisius, Jakarta.1994.
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).
- Rizal Mubit, Eran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia, dalam *Epistemé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Robert W. Crapps, *Dialog Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Rodolf Otto, *The Idea of the Holy*, (England: Penguin Books, 1959).
- Roma Ulinnuha, *Islam, Ruang Publik dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 09, Nomor 2, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam, dalam *ADDIN*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013.

- Rya Fitrianasari, *Peran Lembaga Agama Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Di Lazdai Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).
- S.A Kamal, *Religion in A Pluralistic Society*, (Leiden: E.J Brill, 1976).
- Saefuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Cet Ke-2 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998).
- Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).
- Setiadi, Elly M. dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: kencana, 2007).
- Seyyed Husein Nars, *Pengetahuan dan Kesucian*, Ter. Suharsono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Shonhaji , Agama Sebagai Perikat Social Pada Masyarakat Multikultural, Dalam *Jurnal Al-AdYaN*. Vol VII, N0. 2 Juli-Desember 2012.
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).
- Siti Makhmudah, Dinamika dan Tantangan Masyarakat Islam di Era Modernisasi, *dalam Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Volume 1, Nomor 2, September 2015.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers ; Raja Grafindo Persada, 2013).
- Suharno, *Membangun Kebangsaan Multikultural: Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2016).
- Sulaiman Saat, Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial, Dalam *Journal UIN Alauddin*. Volume V, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, “Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAHAH”, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019).
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet IV (Yogyakarta: BPPFE, 1980).
- Syafaruddin & Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*, (Medan: Perdana Publishing, 2011).

- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Syahrin Harahab, *Theologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Taufiq Rohman Dhohiri, et. al. *Sosiologi Suatu Kajian Kebidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira, 2007).
- Thomas F. O’Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- , *The Sociologi Of Religion*, Terj. Tim.YASOGAMA, Yogyakarta: Rajawali Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Cet. I, 1985.
- Thomas Mautner, *Dictionary of philosophy: the Language and Concepts of Philosophy Explained*, Emglan: Peguin Book, 2005.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta, Puslitbang, 2008).
- Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2009), cet. IV.
- Ulil Abshar Abdalla, *Menolak Tunduk pada Teks dalam Memahami Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007).
- Van deer Leeuw, *Religion in Essence and Manifestation*, (New York: Gloucester, 1967).
- WA Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2004).
- Will, Kymlicka, “*Mitsunderstanding Nationalism*” dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999).
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2).
- Zakiah Daradjat, dkk. *Perbandingan Agama-2*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

-----, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, XIII, 1991).

-----, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

Sumber Internet

<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-agama-ciri-fungsi-dan-contoh-lengkap/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<https://Brainly.Co.Id>. Diakses Pada Tanggal 17 September 2022.

Siswayanti, Novita. Memperkuat NKRI dengan Moderasi Beragama. Diunduh dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menguatkan-nkridengan-moderasi-beragama>, pada tanggal 22 Nopember 2020.